

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
PESISIR (PEMP) DI KABUPATEN WAKATOBI**



**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

**LA ODE SAFIHUDDIN
NIM . 014938528**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
KENDARI
2010**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat 15418
Telp. (021) 7415050, Fax (021) 7415588**

PENDAFTARAN UJIAN SIDANG

Nama : LA ODE SAFIHUDDIN
 NIM : 014938528
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Alamat :
 Telp/Fax : 081524761535
 Judul TAPM : Persepsi Masyarakat terhadap Implementasi Kebijakan
 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di
 Kabupaten Wakatobi
 Persyaratan (Terlampir): a. LKAM
 b. Keterangan TAPM layak uji dari pembimbing
 c. Bukti setor pembayaran ujian sidang
 d. TAPM rangkap 5 (lima)

Permintaan Waktu Pelaksanaan Ujian Sidang :

Hari :
 Tanggal :
 Waktu : Pukul

Jakarta 2010

Menyetujui,

Pembimbing I,


Dr. Bahar, M.Si.
 NIP 131946 653

Yang Mendaftar,


La Ode Safihuddin
 NIM. 014938528

Pembimbing II,


Prof. Dr. Onu Laola, S.E., M.Si.
 NIP 131 679 669

Mengetahui,
 Kepala UPBJJ UT Kendari

Drs. Wawan Ruswanto, M.Si.
 NIP. 19630715 199103 1 006

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat 15418
Telp. (021) 7415050, Fax (021) 7415588**

**Kepada
Yth. Direktur PPs UT
Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe
Tangerang 15418**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya selaku Pembimbing TAPM dari Mahasiswa:

Nama : LA ODE SAFIHUDDIN/014938528
Judul TAPM: Persepsi Masyarakat terhadap Implementasi Kebijakan
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di
Kabupaten Wakatobi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa TAPM dari mahasiswa yang bersangkutan telah selesai ~~100%~~ sehingga dinyatakan sudah layak uji dalam Ujian Sidang Akhir Program Magister (TAPM).

Demikian keterangan ini dibuat untuk menjadikan periksa.

Jakarta 2010

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

NAMA : LA ODE SAFIHUDDIN
NIM : 014938528
PROGRAM STUDI : Magister Administrasi Publik
JUDUL TAPM : Persepsi Masyarakat terhadap Implementasi Kebijakan
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di
Kabupaten Wakatobi

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/ Tanggal : Sabtu, 28 Agustus 2010

Waktu : 13.00 – 15.00 WITA

Dan telah dinyatakan LULUS/~~TIDAK LULUS~~

Panitia Penguji TAPM

Ketua Komisi Penguji

Nama : Surachman Dimiyati, Ph.D

Penguji Ahli

Nama : Dr. Adi Suryanto, M.Si

Pembimbing I

Nama : Dr. Bahtiar, M.Si

Pembimbing II

Nama : Prof. Dr. Onu Laola, SE, M.Si

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER SAINS DALAM ILMU ADMINISTRASI
BIDANG MINAT ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Persepsi Masyarakat terhadap Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kabupaten Wakatobi adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

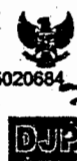
Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, 2010

METERAI
TEMPEL

9EF64AAF225020684

6000



Yang Menyatakan,

La Ode Safihuddin

NIM. 014938528

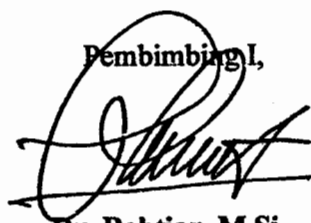
UNIVERSITAS TERBUKA

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

JUDUL TAPM : Persepsi Masyarakat terhadap Implementasi Kebijakan
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di
Kabupaten Wakatobi
NAMA : La Ode Safihuddin
NIM : 014938528
PROGRAM STUDI : Sains dalam Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik

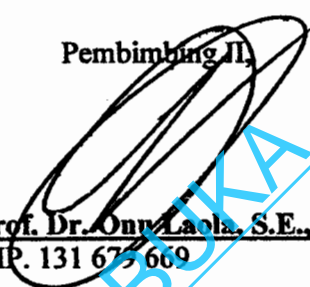
Menyetujui:

Pembimbing I,



Dr. Bahtiar, M.Si.
NIP. 131 946 653

Pembimbing II,



Prof. Dr. Ony Laela, S.E., M.S.
NIP. 131 675 669

Mengetahui:

Ketua Bidang Ilmu/Program Magister Sains dalam Ilmu Administrasi, Direktur Program Pascasarjana,



Dra. Susanti, M.Si.
NIP. 132 052 021



Prof. Dr. Udin S. Winataputra, M.A.
NIP. 130 367 151



ABSTRAK**Persepsi Masyarakat terhadap Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kabupaten Wakatobi**

La Ode Safihuddin
Universitas Terbuka
safihuddin@yahoo.com

Kata Kunci: persepsi masyarakat, pemberdayaan masyarakat pesisir, sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, penguatan dana.

Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) persepsi masyarakat terhadap mekanisme penyaluran dana PEMP di Kabupaten Wakatobi dan (2) faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap beban pengembalian dana yang dirasakan masyarakat nelayan kebijakan PEMP di Kabupaten Wakatobi.

Metode penelitian adalah metode deskriptif dengan teknik pendekatan secara kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, *interview* (wawancara), dan studi pustaka. Responden penelitian berjumlah 100 yang berasal dari 50 penerima dana PEMP di Desa Mola Utara, Kec. Wangi-Wangi Selatan dan 50 penerima dana PEMP di Desa Waha, Kec. Wangi-Wangi.

Hasil penelitian menunjukkan (1) rata-rata tingkat penerimaan yang belum baik dari masyarakat sebesar 43%, sedangkan penerimaan yang baik dari masyarakat terhadap implementasi dana PEMP sebesar 57%. Umumnya masyarakat menunjukkan tingkat penerimaan yang belum baik terhadap program PEMP dan (2) faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap implementasi PEMP di Kab. Wakatobi meliputi aspek (a) sumberdaya manusia, (b) kelembagaan, dan (c) dana (modal). *Aspek sumberdaya manusia* yaitu tidak efektifnya sumberdaya manusia pengelola program di tingkat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi. *Aspek kelembagaan* yakni kelompok sasaran, berupa lemahnya manajemen keuangan, manajemen usaha, tidak efektifnya penegakan monitoring dan evaluasi, sanksi, serta lemahnya intervensi Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera. *Aspek dana (modal)* meliputi tidak proporsionalnya jumlah dana yang diberikan dengan volume dan jenis usaha yang dilakukan oleh kelompok sasaran.

ABSTRACT**Society Perception Toward The Implementation Of Wisdom to The Deceive
Economic of Society at Coastal Area (PEMP) in Wakatobi District**

La Ode Safihuddin
Universitas Terbuka
safihuddin@yahoo.com

Key words: perception society, the deceive economic of society at coastal area, human resources, institution strengthen, financial strengthen.

This research that aim know (1) society perception toward the delivery mechanism of PEMP finance in Wakatobi District, and (2) The influence factor of society perception toward on the back load finance have felt to fisherman society of wisdom PEMP in Wakatobi District.

The research method is the descriptive method with technique approach in a qualitative of manner. The collecting data that to do with observation of manner, interview and bibliography. Research to the respondent 100 of numbers from 50 received finance PEMP in north Mola Village, South Wangi-Wangi Sub district and 50 received Finance PEMP in Waha village, Wangi-Wangi Sub district.

The research of result to showing (1) the received levels was not yet right from society as big as 43% ,so the received right from society toward implementation the finance PEMP of as big as 57%. The generally of society to showing levels to receiving was not yet right toward PEMP program and (2) the factors are influencing perception of society toward of implementation PEMP in Wakatobi districts are aspect (a) human resources (b) institute in (c) financial. The aspect human resources aren't affective of human resources to management program in the levels on department of ocean and department of fisheries at Wakatobi district. The aspect of institute as well as groups of to target. As weakness financial management, business, management, wasn't effective in the upright of monitoring and evaluation, sanction, with weakness Wakatobi prosperous to the aspect financial as not amount will be giving with volume and business of kinds to done by target groups.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis bersyukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis yang berjudul “Persepsi Masyarakat terhadap Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kabupaten Wakatobi” ditulis untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik, pada Universitas Terbuka.

Gagasan yang melatari tajuk permasalahan ini lahir dari hasil pantauan penulis terhadap respon atau reaksi masyarakat terhadap implementasi kebijakan PEMP di Kabupaten Wakatobi. Respon dari masyarakat antara lain program PEMP belum dilaksanakan dengan baik. Hal inilah yang menginspirasi penulis untuk melakukan penelitian mengenai Persepsi Masyarakat terhadap Implementasi Kebijakan PEMP di Kabupaten Wakatobi.

Selama dalam penelitian dan penyusunan tesis ini, banyak hambatan dan kendala yang merintanginya penulis. Akan tetapi, dengan ketabahan dan jiwa besar, serta berkat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa pemikir maupun motivasi, maka tesis ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada

1. Ir. Hugua (Bupati Wakatobi) dan Drs. H. Anas Maisa, M.BA. (Sekretaris Daerah Wakatobi) yang telah mengizinkan penulis melanjutkan studi pada program pascasarjana Universitas Terbuka.

2. Drs. Wawan Ruswanto, M.Si. (Koordinator UPBJJ UT Kendari) dan staf yang telah berjasa memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan yang baik selama mengikuti studi pada Program Studi Administrasi Publik Universitas Terbuka.
3. Dr. Bahtiar, M.Si. (Pembimbing I) dan Prof. Dr. Onu Laola, S.E., M.S. (Pembimbing II) yang dengan kesabaran dan ketulusan hati telah meluangkan waktu untuk menuntun dan membimbing penulis sejak awal sampai penyelesaian penyusunan tesis ini.
4. Amiconi, S.Pd. (Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Wakatobi) dan Rusdin, S.H. (Kepala Badan KB, PM, dan Pemdes Kab. Wakatobi) atas dukungan moril dan materil selama penulisan tesis.
5. Nelayan Wakatobi penerima program PEMP yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data penelitian.
6. Mahasiswa pascasarjana UPBJJ UT Kendari yang tetap setia menyelesaikan studi. Kerja sama yang erat mampu menumbuhkan semangat penulis untuk tetap menyelesaikan studi sampai saat ini.
7. Adik Asrif, M.Hum. yang telah membantu sejak penulisan proposal sampai penyelesaian tesis ini.
8. Istri tercinta dan terkasih, Asriati, A.Ma., dan kedua harapan agama, negara, dan keluarga, ananda Wa Ode Kodrat Rahmatika dan ananda La Ode Ashadul Islam yang telah mengizinkan, memotivasi, dan mendoakan penulis untuk melanjutkan studi.

9. Hormat dan doa penulis kirimkan kepada kedua orang tua, La Ode Rawa (alm.) dan Wa Awu (almh.) yang dengan segala kasih sayang telah mengasuh dan mendidik penulis sampai akhir hayat keduanya. Seluruh saudaraku, mertua, kemenakan, dan iparku, tak lupa saya ucapkan terima kasih. Semoga segala bantuan, petunjuk, dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis dapat bernilai ibadah dan memperoleh imbalan yang berlipat ganda dari Allah swt.

Akhir kata, penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi perbaikan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan terutama dalam memperbaiki implementasi program PEMP di Kab. Wakatobi.

Wangi-Wangi, 21 November 2009

Penulis

UNIVERSITAS TERBUKA



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	v
Lembar Pengesahan	vi
Abstrak	viii
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	xiii
Daftar Gambar	xv
Daftar Tabel	xvi
Daftar Diagram	xvii
Daftar Lampiran	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Konsep Persepsi	13
B. Organisasi Persepsi	14
C. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	16
D. Pendekatan Pengembangan yang Bertumpu pada Masyarakat	19
E. Konsep dan Pengelolaan Wilayah Pesisir	21
F. Sumberdaya Manusia Masyarakat Nelayan	25
G. Proses Perencanaan	33
H. Implementasi Kebijakan	34
I. Kerangka Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Desain Penelitian	37
B. Teknik Pengumpulan Data	38
C. Teknik Analisis Data	49
D. Lokasi Penelitian	40
E. Informan (Responden)	41
F. Definisi Operasional	42

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	44
B. Temuan	59
C. Pembahasan	63
1. Persepsi Masyarakat terhadap Mekanisme Penyaluran Dana PEMP	64
2. Persepsi Masyarakat terhadap Beban Pengembalian Dana yang Dirasakan Masyarakat Nelayan	88
3. Faktor yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat terhadap Implementasi PEMP di Kabupaten Wakatobi..	95
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	112
A. Simpulan	112
B. Saran	113

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Alur Kegiatan Program PEMP.....	9
Gambar 2.1 Model Umpan Balik dalam Sikap Individu.....	13
Gambar 2.2 Skema Kerangka Pikir Penelitian.....	36

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 4.1	Kategori Penerima Dana PEMP (Responden).....	61
Tabel 4.2	Tingkat Pendidikan Responden.....	63
Tabel 4.3	Persepsi Masyarakat terhadap Tahapan-tahapan Penyaluran Dana PEMP.....	65
Tabel 4.4	Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksana Penyaluran Dana PEMP.....	69
Tabel 4.5	Persepsi Masyarakat terhadap Kelompok Sasaran (<i>Target Group</i>).....	72
Tabel 4.6	Persepsi Masyarakat tentang Sasaran Kegiatan/Usaha PEMP.....	76
Tabel 4.7	Persepsi Masyarakat tentang Jaminan Pinjaman.....	81
Tabel 4.8	Persepsi Masyarakat terhadap Pertimbangan Prioritas dalam Pengucuran Dana PEMP.....	82
Tabel 4.9	Persepsi Masyarakat terhadap Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Penyaluran Dana PEMP.....	85
Tabel 4.10	Persentase Rata-Rata Keseluruhan Indikator Masalah Penelitian 1 (Persepsi Masyarakat terhadap Mekanisme Penyaluran Dana Program PEMP).....	87
Tabel 4.11	Persepsi Masyarakat tentang Besaran Modal Pinjaman Dana PEMP.....	89
Tabel 4.12	Persepsi Masyarakat terhadap Bunga Pinjaman.....	90
Tabel 4.13	Persepsi Masyarakat tentang Sistem Pengembalian Dana PEMP.....	91
Tabel 4.14	Persepsi Masyarakat tentang Jangka Waktu Pengembalian (Jatuh Tempo).....	92
Tabel 4.15	Persentase Rata-Rata Keseluruhan Indikator Masalah Penelitian 2 (Persepsi Masyarakat terhadap Beban Pengembalian Dana yang Dirasakan Masyarakat Nelayan).....	94

DAFTAR DIAGRAM

	Halaman
Diagram 4.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Wakatobi Berdasarkan Jenis Kelamin	47

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Identitas Masyarakat Kena Sampel di Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi.
- Lampiran 2. Identitas Masyarakat Kena Sampel di Desa Mola Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan.
- Lampiran 3. Data Kajian Hasil Sosialisasi pada Masyarakat Kena Sampel di Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi.
- Lampiran 4. Data Kajian Hasil Sosialisasi pada Masyarakat Kena Sampel di Desa Mola Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan.
- Lampiran 5. Data Kajian Hasil Pembentukan Kelompok pada Masyarakat Kena Sampel Desa Waha.
- Lampiran 6. Data Kajian Hasil Pembentukan Kelompok pada Masyarakat Kena Sampel di Desa Mola Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan.
- Lampiran 7. Data Kajian Hasil Penentuan Jenis Kelompok pada Masyarakat Kena Sampel di Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi.
- Lampiran 8. Data Kajian Hasil Penentuan Jenis Kelompok Masyarakat Kena Sampel di Desa Mola Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan.
- Lampiran 9. Data kajian Hasil Penilaian Masyarakat terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan pada Masyarakat Kena Sampel di Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi.
- Lampiran 10. Data Kajian Hasil Penilaian Masyarakat terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan pada Masyarakat Kena Sampel di Desa Mola Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan.
- Lampiran 11. Data Kajian Hasil Penilaian Masyarakat terhadap Tim Pendamping Desa pada Masyarakat Kena Sampel di Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi.
- Lampiran 12. Data Kajian Hasil Penilaian Masyarakat terhadap Tim Pendamping Desa pada Masyarakat Kena Sampel di Desa Mola Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan.
- Lampiran 13. Data Kajian Hasil Penilaian Masyarakat terhadap Koperasi Nelayan Wakatobi Sejahtera Pada Masyarakat Kena Sampel Di Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi
- Lampiran 14. Data Kajian Hasil Penilaian Masyarakat terhadap Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera pada Masyarakat Kena Sampel di Desa Mola Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan.
- Lampiran 15. Pedoman Wawancara terhadap Informan (Responden) Penelitian mengenai “Persepsi Masyarakat terhadap Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kabupaten Wakatobi”.
- Lampiran 16. Peta Lokasi Penelitian

RIWAYAT HIDUP

La Ode Safihuddin, lahir di Waha, Kec. Tomia, Kab. Wakatobi, Sulawesi Tenggara, pada tanggal 21 Oktober 1968. Penulis adalah anak ke-10 dari 10 bersaudara, pasangan La Ode Rawa (alm.) dan Wa Awu (alm.).

Tamat pendidikan dasar pada tahun 1981 di SDN 3 Waha Tomia dan pada tahun 1984 menamatkan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di SMPN Waha Tomia. Pada tahun 1987, penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 2 Baubau, kala itu masih merupakan wilayah Kab. Buton. Gelar Sarjana Sosiologi diraih pada tahun 1993 di Universitas Haluoleo, Kendari.

Pada tahun 1996, penulis diangkat menjadi pegawai negeri sipil Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kab. Buton dan ditugaskan di Kec. Binongko sebagai tenaga fungsional penyuluh Keluarga Berencana (KB) yang sekarang telah menjadi wilayah Kab. Wakatobi. Tahun 2003, penulis dipindahtugaskan menjadi penyuluh KB di Kec. Tomia. Pada tahun 2004, dialihfungsikan dari pegawai fungsional ke pegawai struktural sebagai Kepala Seksi Ketenteraman dan Keteriban Kelurahan Waha, Kec. Tomia, Kab. Wakatobi. Pada tahun 2006 s.d. 2008, penulis menjabat sebagai Kepala Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi. Tahun 2009, diangkat sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kependudukan dan

Catatan Sipil Kab. Wakatobi. Pada tahun 2009 sampai sekarang, menjabat sebagai Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintahan Desa, Kab. Wakatobi.

Pendidikan pascasarjana ditempuh pada tahun 2007 di Universitas Terbuka, UPBJJ Kendari, Jurusan Administrasi Publik.

UNIVERSITAS TERBUKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.508 buah, dengan garis pantai 81.000 km dan sekitar 70% wilayah berupa laut. Hal ini merupakan suatu sumber daya yang sangat besar manfaatnya, apabila digunakan dan dimanfaatkan dalam upaya meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Indonesia sebagai negara maritim, memiliki penduduk sekitar 60% tinggal dan menggantungkan hidupnya di daerah pantai dan laut. Lebih dari 90% produksi ikan dihasilkan di daerah perairan pesisir oleh nelayan. Ironisnya, potensi alam yang sangat besar itu belum bisa dimanfaatkan dengan maksimal sehingga dari segi ekonomi, pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir sangat lamban dan sebagian besar penduduknya masih termasuk kategori miskin.

Peningkatan kesejahteraan penduduk masyarakat pesisir oleh Pemerintah Pusat melalui Departemen Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan program Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Program tersebut dilaksanakan pada daerah-daerah pesisir di setiap kabupaten/kota yang telah ditetapkan. Penanggung-jawab pusat dari program ini adalah Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan Bappenas.

Tujuan dari program PEMP adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui sebuah program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada aspek ekonomi (pendapatan), aspek sosial (pendidikan, kesehatan, dan agama), lingkungan, dan infrastruktur. Pengembangan aspek ekonomi dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan sehari-hari Masyarakat. Peningkatan aspek sosial masyarakat bertujuan meningkatkan iptek, sikap, dan perilaku. Begitu pula halnya dengan peningkatan aspek lingkungan dan infrastruktur berguna untuk melestarikan sumberdaya pesisir, laut, dan pemukiman.

Penerapan program PEMP di Kabupaten Wakatobi dikhususkan pada masyarakat yang bermukim di kawasan pesisir. Kawasan pesisir merupakan kawasan peralihan (*interface area*) antara ekosistem laut dan darat. Kawasan ini memiliki kompleksitas ekosistem yang sangat tinggi, sehingga dalam pengelolaannya perlu melihat ekosistem yang saling terkait yaitu antara lain daerah aliran sungai, *mangrove*, terumbu karang yang dipengaruhi oleh berbagai proses, seperti ekologi (*nutrient flow*), ekonomi (produksi dan pemasaran hasil laut), dan budaya komunitas lokal (*local wisdom, indigeneous knowledge*).

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengisyaratkan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan,

pelayanan, pemberdayaan, dan peran-serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), telah mengakibatkan Pemerintah Daerah berusaha secara maksimal untuk dapat memanfaatkan sumber daya (alam, manusia, dan buatan) sebagai sumber-sumber peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberi peluang yang sangat luas kepada masyarakat pesisir untuk menyejahterakan masyarakat. Kedua Undang-Undang tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan mengelola kawasan tersebut agar menjadi kawasan berkelanjutan bagi kehidupan selanjutnya. Kenyataan yang dihadapi selama ini dalam pengelolaan kawasan pesisir adalah terjadinya eksploitasi sumberdaya pantai dan laut secara berlebihan tanpa memikirkan keberlanjutan (*sustainable*) dari lingkungan yang digali potensinya. Eksploitasi tersebut yakni penangkapan ikan secara berlebihan mengakibatkan ikan Hiu semakin sulit ditemukan di kawasan laut Indonesia bagian timur.

Lingkup sasaran program PEMP mempunyai adalah kelompok masyarakat pesisir dari keluarga nelayan miskin dan anggota masyarakat lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan sumberdaya laut dan pesisir. Program PEMP dilaksanakan di tingkat desa/kelurahan yang diawali dengan pembentukan Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP). Tahapan berikutnya

yakni pelaksanaan sosialisasi kegiatan yang dilaksanakan dalam Forum Masyarakat Desa (FMD), difasilitasi oleh kepala desa/kelurahan, dan dihadiri oleh PjOK, FK, aparat desa/kelurahan, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat lokal desa/kelurahan, dan kelompok masyarakat pemanfaat.

Kelompok merupakan wadah bagi anggota-anggotanya dalam bekerja sama dan mengelola kegiatan. Akan tetapi, dalam kenyataannya sering terjadi pembentukan kelompok menjadi tidak efisien dan berakhir pada kegagalan. Kegagalan pembentukan kelompok dapat dijumpai pada program-program terdahulu, misalnya pada program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Kegagalan pembentukan kelompok, kadang disebabkan oleh adanya diintervensi dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan, misalnya aparat desa dan kecamatan. Pembentukan kelompok yang diintervensi oleh pemerintah mengakibatkan pembentukan kelompok tersebut menjadi tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.

Penyusunan rencana kegiatan di tingkat desa terutama dalam memilih jenis kegiatan kadangkala kurang mencerminkan aspirasi masyarakat atau kelompok penerima program. Adanya intervensi dari pihak lain yang memiliki pengaruh terhadap kelompok penerima program menjadi faktor yang mampu menggagalkan pelaksanaan program. Intervensi dari pihak luar kelompok berpengaruh pada sikap anggota kelompok yang menjadi apatis terhadap program-program yang seharusnya dijalankan oleh kelompok mereka.

Kabupaten Wakatobi sebagai salah satu daerah pesisir penerima program PEMP memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Pada tahun 1998,

Kabupaten Wakatobi memiliki sejumlah 5.387 rumah tangga perikanan dengan jumlah perahu penangkapan sebanyak 3.565 buah.

Program PEMP merupakan program pemerintah yang diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat miskin yang berada pada daerah-daerah pesisir. Program tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki sumberdaya kelautan yang berlimpah ruah, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat. Parahnya, eksploitasi sumberdaya tersebut selama ini malah berdampak memperdalam kesenjangan antara golongan pelaku usaha, khususnya antara perikanan rakyat dan perikanan modern.

Program PEMP Kabupaten Wakatobi merupakan stimulan bagi terbentuknya masyarakat pesisir yang sejahtera dan mandiri. Harapan dari program PEMP yakni terbentuknya kemandirian masyarakat pesisir melalui kebebasan memilih, merencanakan, dan menearkan kegiatan ekonomi dari sumberdaya alam yang ada. Dengan demikian, tanggung jawab pengelolaan ekonomi dan sumberdaya alam dapat dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri.

Visi program PEMP dalam pelaksanaan kegiatan adalah proses menuju masyarakat pesisir yang mandiri secara ekonomi yang disusun dalam bingkai pendekatan yang harmonis dengan memperhatikan sistem nilai dan kelembagaan yang berkembang dalam masyarakat, optimalisasi sumber potensi lokal dan sumberdaya alam yang ada. Program PEMP Kabupaten Wakatobi mengandung misi yakni pemberdayaan ekonomi harus diarahkan untuk

membuat mereka berdiri sendiri sehingga terwujud kecukupan ekonomi dan sosial masyarakat pesisir.

Upaya pencapaian misi PEMP harus didasarkan pada empat unsur pokok berikut ini.

- 1) Program yang terencana.
- 2) Membangkitkan kemampuan untuk menolong dirinya.
- 3) Bantuan teknis yaitu fasilitas modal dan manajemen.
- 4) Sumberdaya alam yang mendukung.

Program PEMP Kabupaten Wakatobi bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan kelembagaan sosial ekonomi dan partisipasi masyarakat dengan mendayagunakan sumber daya pesisir dan laut secara berkelanjutan. Tujuan khusus program PEMP Kabupaten Wakatobi, yakni:

- 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat.
- 2) Memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat dalam mendukung pengembangan wilayahnya.
- 3) Mengembangkan keragaman kegiatan usaha dan memperluas kesempatan kerja masyarakat nelayan sehingga pendapatan masyarakat dapat meningkat.
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut sesuai dengan kaidah kelestarian lingkungan.

- 5) Meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat, aparat desa/kelurahan, dan aparat kecamatan dalam memfasilitasi proses pengembangan masyarakat.

Pendekatan program yang digunakan dalam rangka mewujudkan tujuan PEMP di Kabupaten Wakatobi sebagai berikut ini.

- 1) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian pembangunan.
- 2) Kemitraan antara masyarakat, aparat, dan swasta dalam pengembangan kegiatan.
- 3) Keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.

Prinsip-prinsip pengelolaan dan pengembangan program PEMP Kabupaten Wakatobi sebagai berikut ini.

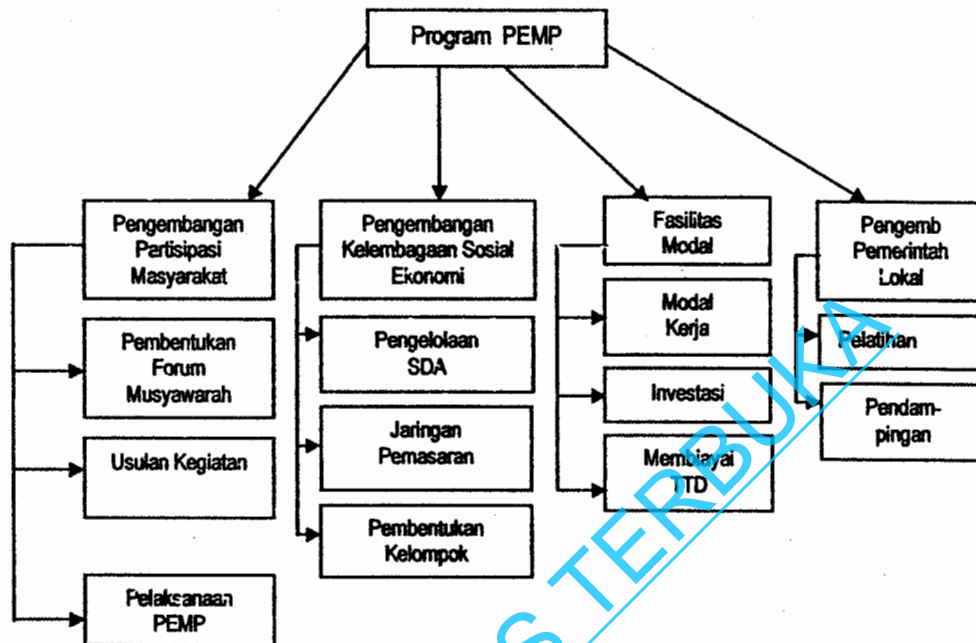
- 1) Pilihan kegiatan ekonomi (usaha) berdasarkan potensi sumberdaya lokal, kelayakan usaha, serta sesuai kebutuhan, keinginan, dan kemampuan masyarakat agar kegiatan tersebut memperoleh dukungan dari masyarakat.
- 2) Proses pemilihan peserta dan kegiatan program PEMP dilakukan secara musyawaran.
- 3) Pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka, diinformasikan dan diketahui masyarakat sehingga masyarakat dapat ikut memantaunya.
- 4) Pengelolaan kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

- 5) Pengelolaan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal.
- 6) Pemberian kesempatan kepada kelompok lain yang belum memperoleh kesempatan agar semua masyarakat memperoleh manfaat langsung.
- 7) Setiap ketentuan dalam pemanfaatan dana ekonomi produktif masyarakat diharapkan mampu mendorong terciptanya kompetisi yang sehat dan jujur dalam mengajukan usulan kegiatan.

Sasaran pemanfaat program PEMP Kabupaten Wakatobi adalah kelompok masyarakat pesisir (KMP) yang meliputi nelayan miskin, keluarga buruh nelayan, dan anggota masyarakat lainnya yang mata pencahariannya berkaitan dengan sumberdaya lokal. Lokasi pemanfaat program PEMP adalah desa/kelurahan pantai berpenduduk relatif lebih banyak dan memiliki potensi sumberdaya alam untuk dikembangkan. Lokasi ini bisa terdiri dari satu atau lebih kecamatan.

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Wakatobi memiliki alur atau mekanisme pelaksanaan program yang sistematis. Alur kegiatan program PEMP Kabupaten Wakatobi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.1 Alur Kegiatan Program PEMP di Kabupaten Wakatobi



Keterangan: TTD (Tenaga Teknis Desa)

Bertolak dari permasalahan yang terjadi pada program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Wakatobi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka peneliti menetapkan judul penelitian yakni “Persepsi Masyarakat terhadap Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kabupaten Wakatobi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, diketahui bahwa persepsi masyarakat berpengaruh terhadap dukungan dan keberhasilan pelaksanaan program PEMP. Persepsi masyarakat akan menentukan sikap masyarakat selanjutnya dalam pengelolaan program PEMP. Untuk mengetahui pengaruh persepsi masyarakat dan akibat yang ditimbulkan dari persepsi tersebut, dirumuskan beberapa masalah berikut ini.

- 1) Bagaimana persepsi masyarakat terhadap mekanisme penyaluran dana program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kabupaten Wakatobi?
- 2) Bagaimana persepsi masyarakat terhadap beban nelayan dalam pengembalian dana program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kabupaten Wakatobi?
- 3) Faktor apa yang memengaruhi implementasi program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kabupaten Wakatobi?

Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan program PEMP di Kabupaten Wakatobi dapat diketahui pada saat melakukan observasi, tanggapan masyarakat melalui pengisian kuesioner dan wawancara terhadap unit analisis yang diteliti di Kabupaten Wakatobi. Persepsi masyarakat terhadap sebuah program pemerintah pada dasarnya akan menjadi dasar keberhasilan atau sebaliknya kegagalan program yang dicanangkan oleh pemerintah.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai “Persepsi Masyarakat terhadap Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Wakatobi” bertujuan:

- 1) Mengetahui persepsi masyarakat terhadap mekanisme penyaluran dana program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Kabupaten Wakatobi.
- 2) Mengetahui persepsi masyarakat terhadap beban nelayan dalam mengembalikan dana program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Kabupaten Wakatobi.
- 3) Mengetahui faktor yang memengaruhi implementasi program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Kabupaten Wakatobi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tentang “Persepsi Masyarakat terhadap Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Wakatobi” diharapkan bermanfaat atau berguna sebagai berikut ini.

- 1) Masukan bagi pengelola program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, yakni DKP Kabupaten Wakatobi, TPD, Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera, dalam upaya meningkatkan keberhasilan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada

tahap-tahap berikutnya dan program pemberdayaan lainnya di Kabupaten Wakatobi.

- 2) Untuk lebih melengkapi khazanah ilmu pengetahuan di bidang pemberdayaan, khususnya pemberdayaan yang dijalankan daerah-daerah pesisir dan tertinggal. Data dan fakta tentang kebijakan pemberdayaan masyarakat (dana program PEMP) Kabupaten Wakatobi merupakan cakrawala pengetahuan tentang bagaimana kualitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para peneliti, dan praktisi pemberdayaan masyarakat pesisir yang memerlukan informasi mengenai pelaksanaan program PEMP Kabupaten Wakatobi. Selain itu, hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Wakatobi.

UNIVERSITAS TERBUKA



BAB II

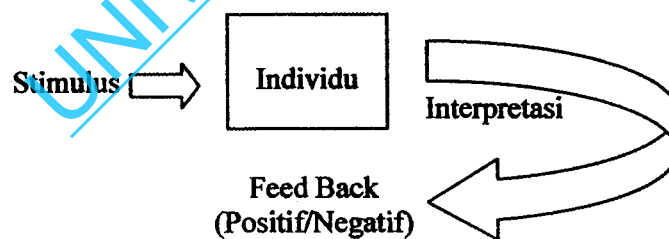
TINJAUAN PUSTAKA

Unit analisis pelaksanaan penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan program PEMP di Kabupaten Wakatobi adalah kelompok masyarakat. Ada beberapa konsep yang perlu dideskripsikan untuk menjadi landasan dalam menganalisis masalah-masalah penelitian. Konsep-konsep yang perlu dideskripsikan tersebut, yaitu:

A. Konsep Persepsi

Persepsi merupakan proses kognitif yang dialami oleh setiap orang/individu di dalam memahami setiap informasi tentang lingkungannya. Informasi ini bisa didapat dari penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, maupun penciuman. Hal penting di dalam pemahaman tentang persepsi adalah adanya rangsangan (stimulus) yang diinternalisasikan ke dalam diri individu sehingga membuat adanya umpan-balik di dalam sikap (perilaku yang ditampilkan) individu tersebut. Gambar di bawah ini disajikan untuk memudahkan pemahaman mengenai umpan-balik.

Gambar 2.1 Model Umpan Balik dalam Sikap Individu



Persepsi sebagai sebuah konsep bermakna sebagai proses dengan mana seseorang (individu) atau sekelompok orang yang memberikan muatan makna atau arti tertentu atas pentingnya sesuatu peristiwa atas stimulus atau rangsangan tertentu yang berasal dari luar dirinya atau lingkungannya. Alison dalam Wahab, S.A. (1997) mengemukakan bahwa persepsi adalah 'lensa konseptual' yang ada pada diri individu berfungsi sebagai kerangka analisis untuk memahami suatu masalah. Karena dipengaruhi oleh daya persepsi inilah, maka pemahaman dan tentu saja perumusan atas suatu isu sesungguhnya amat bersifat subjektif.

Davidoff (1975) mengemukakan bahwa persepsi antara orang yang satu dengan yang lain sepatutnya berbeda. Ditinjau dari prosesnya, persepsi adalah suatu proses yang mengorganisir dan menggabungkan data penginderaan sehingga terbentuk interpretasi dari beberapa pengalaman. Kemudian Robin dalam Muchlas (1994) mendefinisikan persepsi sebagai proses individu mengorganisasi dan menginterpretasi *impressi sensorisnya* supaya memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya.

B. Organisasi Persepsi

Objek-objek yang ada di sekeliling kita ditangkap melalui alat-alat indera dan diproyeksikan pada bagian tertentu di otak. Melalui proses tersebut kita dapat mengamati obyek tertentu. Kemampuan untuk membedakan, mengelompokkan, memfokuskan, dan sebagainya disebut sebagai kemampuan untuk mengorganisasikan pengamatan atau persepsi.

Organisasi dalam persepsi mengikuti beberapa prinsip, yaitu:

- 1) Wujud dan latar, yaitu obyek-obyek yang kita amati di sekitar kita selalu muncul sebagai wujud (*figure*) dengan hal-hal lainnya sebagai latar (*ground*).
- 2) Pola pengelompokan, yaitu hal-hal tertentu cenderung kita kelompok-kelompokkan dalam persepsi kita, dan bagaimana caranya kita mengelompok-kelompokkan itu akan menentukan bagaimana cara kita mengamati hal-hal tersebut.

Persepsi antara manusia satu dengan yang lainnya kadang berbeda. Haywood (1986, dalam Natuna, 2004: 48) menyebutkan beberapa penyebab terjadinya perbedaan persepsi.

1) Perhatian

Biasanya kita tidak menangkap seluruh rangsang yang ada di sekitar kita secara sekaligus, tetapi kita memfokuskan perhatian kita pada satu atau dua obyek saja. Perbedaan fokus antara satu orang dengan orang lainnya, menyebabkan perbedaan persepsi di antara mereka.

2) Set

Set adalah harapan seseorang akan rangsangan yang akan timbul.

3) Kebutuhan

Kebutuhan-kebutuhan sesaat atau yang menetap pada diri seseorang, akan memengaruhi persepsi orang tersebut. Dengan demikian,

kebutuhan-kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan pula perbedaan persepsi.

4) Sistem nilai

Sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat berpengaruh pula pada terhadap persepsi yang dihasilkan oleh seseorang.

5) Ciri kepribadian akan memengaruhi pula persepsi.

6) Gangguan psikologis

Gangguan psikologis dapat menimbulkan kesalahan persepsi yang disebut halusinasi. Halusinasi berbeda dengan ilusi. Halusinasi bersifat individual, jadi hanya dialami oleh penderita yang bersangkutan saja. Penderita *skizofrenia* misalnya dapat mendengar suara-suara atau melihat benda-benda yang tidak terdengar atau terlihat oleh orang lain atau mungkin ia bisa melihat suatu benda jauh berbeda dari bentuknya yang asli, misalnya ia melihat gundukan tanah sebagai harimau yang mau menerkamnya.

C. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat merupakan suatu konsep yang di dalamnya terdapat unsur pengembangan. Pengembangan berarti adanya proses perubahan yang terjadi secara sengaja (adanya perlakuan) dan tidak disengaja. Pemberdayaan masyarakat yakni sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial yang bersifat "*people centred, participatory,*

empowering, and sustainable” (Chambers, 1995 dalam Kartasasmita, 1996: 142).

Kartasasmita (1997: 169—184) menyimpulkan bahwa upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu:

- 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Hal ini didasari bahwa setiap individu atau kelompok masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kualitas hidupnya atau kelompoknya. Pemberdayaan di sini adalah upaya untuk membangun daya (potensi) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi serta berupaya untuk mengembangkan potensi tersebut.
- 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Penguatan potensi masyarakat memerlukan langkah-langkah yang lebih positif selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat makin berdaya. Oleh karena itu, diperlukan adanya program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya karena sebagian program-program umum yang berlaku kurang menyentuh lapisan masyarakat.

- 3) Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Proses pemberdayaan harus mampu mencegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat.

Proses pemberdayaan memerlukan tindakan aktif subjek untuk mengakui daya yang dimiliki objek dengan memberinya kesempatan untuk mengembangkan diri sebelum akhirnya objek akan beralih fungsi menjadi subjek yang baru. Proses tersebut didukung oleh faktor atau stimulus dari luar sehingga subjek disebut sebagai faktor eksternal. Selain itu, faktor internal yang mementingkan tindakan objek atau masyarakat itu sendiri juga merupakan prasyarat penting yang dapat mendukung proses pemberdayaan yang efektif.

Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individu maupun kelompok, tetapi karena proses ini merupakan wujud perubahan sosial atau status hierarki lain yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu "senasib" untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dilihat sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif (Friedman, 1993). Selain itu, melalui kehidupan kelompok, tiap-tiap individu belajar untuk menganalisis secara "kritis" situasi lokal mereka termasuk dimensi politiknya dan berusaha "memperoleh kembali" daya untuk mengubah situasi tersebut. Individu di dalam kelompok, belajar untuk mendeskripsikan suatu situasi, mengekspresikan opini dan emosi mereka, atau dengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah, menganalisisnya, serta merancang suatu solusi dalam memecahkan masalah tersebut.

Konsep pemberdayaan masyarakat dalam kaitannya dengan program PEMP di Kabupaten Wakatobi bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan kelembagaan sosial ekonomi dan partisipasi masyarakat dengan mendayagunakan sumberdaya pesisir dan laut secara berkelanjutan. Kesejahteraan tidak hanya meliputi aspek ekonomi (pendapatan), tetapi juga meliputi aspek sosial (pendidikan, kesehatan dan agama), lingkungan, dan infrastruktur. Pengembangan aspek ekonomi penting untuk meningkatkan pendapatan, aspek sosial penting untuk meningkatkan iptek dan imtak serta sikap dan perilaku. Aspek lingkungan dan infrastruktur penting untuk pelestarian sumber daya pesisir, laut, dan pemukiman. Ketiga aspek tersebut harus ditunjang oleh kelembagaan sosial ekonomi yang kuat dan dikembangkan secara seimbang agar kesejahteraan dapat ditingkatkan secara optimal.

D. Pendekatan Pengembangan yang Bertumpu pada Masyarakat

Menurut Sumodiningrat (1999), paradigma pembangunan secara keseluruhan sejak Repelita VI bergeser ke arah tercapainya pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*). Pelaksanaan paradigma tersebut telah dituangkan dalam kebijaksanaan arah baru pembangunan nasional yang mensyaratkan adanya upaya-upaya pemihakan dan pemberdayaan yang luas dalam masyarakat. Lebih lanjut dikatakan oleh Tjokrowinoto (1999) paradigma ini memberikan peranan kepada individu bukan sebagai objek tetapi sebagai pelaku yang menentukan tujuan yang hendak dicapai, menguasai

sumber-sumber, mengerahkan proses yang menentukan hidup mereka. Paradigma ini memberikan tempat yang penting bagi prakarsa dan keanekaragaman lokal yang menekankan pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri.

Hendrianto (1996) mengemukakan bahwa pendekatan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (individu/kelompok) merupakan suatu pola pendekatan yang mendudukan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Atas dasar pendapat ini, sebaiknya semua keputusan dan tindakan pembangunan didasarkan pada aspirasi, kepentingan/kebutuhan, kemampuan, dan upaya masyarakat. Menurut Parwoto (1997), aplikasi dari pembangunan yang bertumpu pada masyarakat dalam kegiatan pembangunan diwujudkan melalui pembangunan partisipatif di mana tiap tahapan pembangunan mulai dari pengenalan permasalahan dan perumusan kebutuhan, perencanaan, pemrograman, pelaksanaan, dan pengoperasian, merupakan kesepakatan bersama antarpelaku yang terlibat.

Menurut Siswanto (1997), secara empirik banyak studi menunjukkan bahwa masyarakat lebih mampu mengidentifikasi, menilai dan memformulasikan permasalahan baik fisik, sosial, kultural, maupun ekonomi dan kesehatan lingkungan, membangun, visi dan aspirasi dan kemudian memprioritaskan, intervensi, merencanakan, mengelola, memonitor dan bahkan memilih teknologi yang tepat. Selanjutnya, dikatakan bahwa paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat mampu menghasilkan kerelaan yang lebih dari masyarakat untuk memberi kontribusi kerja dan biaya

pembangunan, operasi dan perawatan sehingga seringkali dinilai lebih efektif dan yang pada gilirannya lebih *sustainable*.

E. Konsep dan Pengelolaan Wilayah Pesisir

1. Batasan dan Pengertian Wilayah Pesisir

Pengertian wilayah pesisir yang digunakan di Indonesia adalah kawasan peralihan (*interface area*) antara ekosistem laut dan darat. Merujuk kepada batasan tersebut dapat dipahami bahwa wilayah pesisir secara fisik memiliki batas-batas yang ekosistemnya dipengaruhi oleh dua alam, yaitu darat dan laut. Batas ke arah darat, dari segi *ekologis* merupakan kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan, seperti pasang-surut dan intrusi air laut. Segi *administratif* merupakan batas terluar sebelah hulu dari desa pantai atau jarak definitif secara arbiter (2 km, 20 km, dari garis pantai). Segi *perencanaan* adalah bergantung pada permasalahan atau substansi yang menjadi fokus pengelolaan wilayah pesisir.

Batas ke arah laut, dilihat dari segi *ekologis* adalah kawasan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alamiah di darat, seperti aliran air sungai, *run off*, aliran air tanah, dan lain sebagainya, ataupun dampak kegiatan manusia di darat (bahan pencemar, sedimen, dan lain-lain) atau kawasan laut yang merupakan paparan benua. Dari segi *administratif* adalah sejauh 4 mill, atau 12 mill dari garis pantai ke arah laut. Dari segi *perencanaan* bergantung pada permasalahan atau substansi yang menjadi fokus pengelolaan pesisir (Dahuri,

2001: 5). Batasan wilayah pesisir di atas sesuai dengan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), kewenangan dalam mengelola wilayah laut adalah kewenangan daerah, dan digunakan atau dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Pengelolaan Wilayah Pesisir

Pengelolaan wilayah pesisir harus dilaksanakan secara profesional karena wilayah pesisir memiliki struktur yang berbeda. Adapun struktur wilayah pesisir terdiri dari: (a) kawasan estauria, (b) kawasan padang lamun, (c) kawasan *mangrove*, (d) kawasan terumbu karang, dan (e) kawasan laut. Hal ini berarti dalam upaya pengelolaan wilayah pesisir harus memperhatikan kawasan-kawasan tersebut sebagai satu kesatuan yang apabila tidak diperhatikan akan memberikan dampak yang tidak baik bagi wilayah pesisir. Suatu wilayah pesisir dapat saja terdapat satu atau lebih sistem lingkungan (ekosistem) dan sumber daya pesisir. Ekosistem ini dapat bersifat alami ataupun buatan (*man made*). Ekosistem alami yang terdapat di wilayah pesisir selain seperti kawasan pada struktur di atas ada juga laguna dan delta, sedangkan ekosistem buatan antara lain berupa tambak, sawah pasang surut, kawasan pariwisata, kawasan industri, kawasan agroindustri, dan kawasan pemukiman.

Sumberdaya di wilayah pesisir terdiri dari sumber daya alam yang dapat pulih, yaitu sumber daya perikanan, (plankton, benthos, ikan, moluska, dan krustasea mamalia laut), rumput laut, padang lamun, hutan mangrove, dan terumbu karang. Di wilayah pesisir, juga terdapat sumberdaya alam yang tidak

dapat pulih antara lain minyak dan gas, biji besi, pasir, timah, bauksit, mineral dan bahan tambang lainnya.

PEMP Kabupaten Wakatobi merupakan satu program kerja sama antara Departemen Kelautan dan Perikanan dengan Departemen Keuangan dan Bappenas yang berfokus pada pengelolaan sumber daya laut dan pesisir. Program PEMP Kabupaten Wakatobi telah memasuki tahun ke tujuh. Sesuai dengan yang telah dicita-citakan, program PEMP saat ini sudah memasuki tahap diversifikasi, setelah melewati tahap institusionalisasi. Setelah memasuki tahap tersebut, pemerintah melalui Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), secara simultan meluncurkan pemberdayaan yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Terdapat tiga program yang secara sistematis bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, yakni

- 1) Program *Solar Packed Dealer* untuk Nelayan (SPDN)/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Nelayan (SPBN).
- 2) Pembangunan kedai pesisir.
- 3) Program penguatan modal bagi masyarakat pesisir yang bekerja sama dengan lembaga keuangan.

Program SPDN/SPBN bertujuan mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Keberadaan SPDN/SPBN diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat pesisir akan kebutuhan BBM dengan harga terbaik sesuai ketetapan pemerintah. Melalui program ini beban hidup masyarakat pesisir dapat ditekan sampai pada tingkat yang signifikan.

Bagi nelayan skala usaha mikro dan kecil, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) merupakan kebutuhan yang sangat penting dan utama dalam menjalankan kegiatan perikanan. Pada nelayan skala usaha mikro dan kecil ini, komponen biaya BBM berkisar antara 40—60% dari seluruh biaya operasional penangkapan ikan. Ketersediaan bahan bakar minyak juga memengaruhi usaha perikanan budidaya.

Saat ini, armada perikanan tangkap yang beroperasi di Indonesia berjumlah ± 474.540 buah. Armada perikanan tangkap yang beroperasi di Indonesia terdiri atas 230.360 perahu tanpa motor, 125.580 motor tempel, dan 118.600 kapal motor. Sejumlah 474.540 buah armada perikanan tangkap tersebut, 106.330 buah di antaranya didominasi kapal yang berukuran di bawah 30 GT. Kelompok kapal berukuran di bawah 30 GT inilah yang paling merasakan dampak kenaikan harga BBM.

Kenaikan harga BBM jenis solar sebesar 28% akan menambah beban biaya produksi penangkapan sebesar $28\% \times 40\% = 11,2\%$ (dengan asumsi biaya BBM Solar = 40% dari biaya produksi total). Artinya dengan kenaikan tersebut, nelayan mengalami beban tambahan yang harus dikeluarkan sebesar 11,2%. Kejadian seperti ini sangat memberatkan nelayan. Selama ini masyarakat pesisir pada umumnya memenuhi kebutuhan BBM Solar melalui pihak ketiga (tengkulak), yang harganya lebih mahal sekitar 30% dari harga ketentuan Pemerintah.

Program pembangunan SPDN dihadirkan guna membantu nelayan dan pembudidaya ikan skala mikro dan kecil dalam pemenuhan kebutuhan BBM.

Melalui kerja sama yang sinergis antara DKP, Pertamina, dan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPP HNSI), maka pembangunan SPDN di daerah akan terwujud. Program ini mulai diinisiasi pada tahun 2003 dan hasilnya cukup menggembirakan karena sampai dengan Mei tahun 2008 telah terbangun 225 SPDN.

Namun, dalam perjalanannya, program pembangunan SPDN tersebut menemui berbagai kendala, seperti jumlah kebutuhan BBM nelayan yang terlalu sedikit pada lokasi yang diusulkan, akses jalan bagi mobil angkut Pertamina, dan ketersediaan lahan yang kurang memenuhi syarat, serta ketidaksiapan pengelola. Kendala-kendala tersebut perlu dikaji ulang dan dicarikan solusi demi percepatan pembangunan SPDN.

Salah satu daerah atau lokasi pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir ini adalah Kabupaten Wakatobi. Kabupaten Wakatobi merupakan salah satu wilayah pesisir yang memiliki sumber daya alam laut dan pesisir yang sangat potensial untuk dikembangkan. Kehadiran program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir.

F. Sumberdaya Manusia Masyarakat Nelayan

Nelayan identik dengan kemiskinan. Ada banyak penyebab terjadinya kemiskinan pada masyarakat nelayan, seperti kurangnya akses kepada sumber-sumber modal, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar maupun rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Alasan

lain dan yang akan banyak dibahas dalam bagian ini adalah faktor-faktor sosial seperti pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi, rendahnya tingkat pendidikan, dan rendahnya tingkat kesehatan serta alasan-alasan lainnya seperti kurangnya prasarana umum di wilayah pesisir, lemahnya perencanaan spasial yang mengakibatkan tumpang tindihnya beberapa sektor pada satu kawasan, polusi dan kerusakan lingkungan. Selama ini, baik pada masa orde baru maupun masa sesudahnya telah banyak intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah, namun tetap saja keluarga nelayan masih belum dapat diberdayakan menjadi lebih mandiri.

Pertanyaan besar yang perlu mendapat jawaban atau setidaknya tidaknya menginventarisir jalan keluar yang paling mungkin ditempuh adalah masih adakah jalan keluar untuk mengatasi persoalan kehidupan nelayan? Apakah dengan penerapan iptek terpadu untuk keluarga nelayan dapat melahirkan aktivitas baru, berupa perluasan kesempatan kerja terkait, misalnya penerapan teknologi pengeringan, kemasan, klinik usaha, manajemen pemasaran, keterkaitan institusi bisnis antara nelayan dengan pengusaha, serta memperbaiki sumberdaya manusia (SDM) keluarga nelayan dapat mengubah kemiskinan yang selama ini menyelimuti nelayan?

Persoalan kemiskinan yang menimpa nelayan diharapkan dapat terjawab melalui serangkaian kegiatan yang terintegrasi sedemikian rupa sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi masalah yang dialami oleh masyarakat nelayan. Salah satu upaya untuk menemukan model pemberdayaan masyarakat nelayan adalah dengan melakukan *study base line*.

Meskipun telah banyak studi atau kajian yang telah dilakukan untuk memahami kehidupan nelayan, tetapi beberapa pertanyaan perlu dielaborasi secara lebih mendalam seperti bagaimanakah karakteristik nelayan sebagai *target group* muncul dan karakteristik nelayan terhadap kemungkinan nelayan untuk secara perlahan dapat mengembangkan kehidupannya menjadi lebih baik dari sekarang, bagaimana kehidupan sehari-hari nelayan serta bagaimana peranan kelompok masyarakat beserta peranan tiap tokoh yang nantinya dapat dijadikan sebagai dasar mendesain proses sosialisasi iptek tepat guna. Perlu dipelajari juga bagaimana kemungkinan kebutuhan kredit untuk perluasan investasi khususnya yang ditujukan kepada nelayan, baik sebagai individu rumah tangga maupun kelompok. Semua pertanyaan ini diperlukan untuk merumuskan bagaimana intervensi yang diperlukan guna memperbaiki keadaan sosial ekonomi masyarakat nelayan.

1. Kondisi Umum Masyarakat Nelayan

Sensus penduduk tahun 2000 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia sekitar 210 juta jiwa. Pada saat ini, setidaknya terdapat 2 juta rumah tangga yang menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan. Dengan asumsi, tiap rumah tangga nelayan memiliki 6 jiwa, maka sekurang-kurangnya terdapat 12 juta jiwa yang menggantungkan hidupnya sehari-hari pada sumberdaya laut termasuk pesisir tentunya.

Mereka pada umumnya mendiami daerah kepulauan, sepanjang pesisir termasuk danau, dan sepanjang aliran sungai. Penduduk tersebut tidak

seluruhnya menggantungkan hidupnya dari kegiatan menangkap ikan, akan tetapi masih ada bidang-bidang lain seperti usaha pariwisata bahari, pengangkutan antar pulau danau dan penyeberangan, pedagang perantara/eceran hasil tangkapan nelayan, penjaga keamanan laut, penambangan lepas pantai, dan usaha-usaha lainnya yang berhubungan dengan laut dan pesisir.

Sejak dari dahulu sampai sekarang nelayan telah hidup dalam suatu organisasi kerja secara turun-temurun tidak mengalami perubahan yang berarti. Kelas pemilik sebagai juragan relatif kesejahteraannya lebih baik karena menguasai faktor produksi seperti kapal, mesin alat tangkap maupun faktor pendukungnya seperti es dan garam. Kelas lainnya yang merupakan mayoritas adalah pekerja atau penerima upah dari pemilik faktor produksi dan walaupun mereka mengusahakan sendiri faktor/alat produksinya masih sangat konvensional, sehingga produktivitasnya tidak berkembang, kelompok inilah yang terus berhadapan dan digeluti oleh kemiskinan.

Rumah tangga nelayan pada umumnya memiliki persoalan yang lebih kompleks dibandingkan dengan rumah tangga pertanian. Rumah tangga nelayan memiliki ciri-ciri khusus seperti penggunaan wilayah pesisir dan lautan (*common property*) sebagai faktor produksi, jam kerja yang harus mengikuti siklus bulan yaitu dalam 30 hari satu bulan yang dapat dimanfaatkan untuk melaut hanya 20 hari sisanya mereka relatif menganggur. Selain itu, pekerjaan menangkap ikan merupakan pekerjaan yang penuh resiko dan umumnya karena itu hanya dapat dikerjakan oleh lelaki, hal ini mengandung arti keluarga yang lain tidak dapat membantu secara penuh.

Persoalan-persoalan yang dihadapi rumah tangga nelayan tersebut perlu dicarikan perhatian dan solusi yang multi dimensi. Tantangan yang terbesar adalah bagaimana membangun sektor ini agar dapat mengangkat harkat dan martabat kehidupan masyarakat nelayan maupun masyarakat lainnya yang terkait dengan sumber daya kelautan dan pesisir.

Masalah pembangunan nelayan adalah masalah manajemen pengembangan masyarakat pesisir yang meliputi tiga masalah yaitu: masalah sosial ekonomi rumah tangga nelayan, masalah kenapa mereka miskin dan selanjutnya bentuk intervensi yang bagaimana diperlukan. Selanjutnya jika didasarkan pada dimensi waktu, maka kebijakan pembangunan rumah tangga nelayan dibagi menjadi tiga dimensi waktu yaitu kebijakan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.

2. Membangun Sumberdaya Manusia (SDM)

Aspek demografi rumah tangga dalam beberapa literatur, ditemukan bahwa nelayan memiliki beban ketergantungan yang relatif tinggi. Indikasi tersebut dapat dijelaskan dari tingginya tingkat angka kelahiran pada rumah tangga nelayan dibandingkan dengan rumah tangga lainnya. Kecenderungan ini sekaligus menunjukkan bahwa laju pertumbuhan rumah tangga nelayan lebih tinggi daripada laju pertumbuhan rumah tangga bukan nelayan.

Fenomena keseharian masyarakat nelayan yaitu anak-anak lelaki maupun wanita secara lebih dini terlibat dalam proses pekerjaan nelayan mulai dari persiapan orang tua mereka untuk ke laut sampai dengan menjual hasil

tangkapan. Hal ini tentunya berimplikasi kepada kelangsungan pendidikan anak-anak nelayan. Tingginya partisipasi anak keluarga nelayan pada bidang profesi orang tuanya dipastikan akan menyita waktu belajar anak. Di samping itu pada aspek kesehatan, keluarga nelayan relatif lebih beresiko terhadap munculnya masalah kesehatan seperti kekurangan gizi, diare, dan infeksi saluran pernafasan atas (ISPA). Ancaman kesehatan disebabkan oleh persoalan lingkungan seperti sanitasi, air bersih, *indoor pollution*, dan minimnya prasarana kesehatan seperti Puskesmas ataupun Posyandu yang tidak digunakan dan difungsikan secara optimal.

Data dari beberapa referensi menunjukkan bahwa pada tahun 2002, angka partisipasi sekolah anak-anak nelayan untuk pendidikan tingkat SLTP baru mencapai 60%, dan SLTA baru mencapai 30% (Elfindri, 2002). Dengan kondisi yang demikian, maka dalam jangka panjang pendidikan untuk masyarakat nelayan perlu menjamin agar angka partisipasi sekolah khususnya SLTA dapat dicapai menjadi sekurang-kurangnya 80%, hal ini berarti 50% dari anak SLTP saat ini dan 30% anak usia SLTP menjadi *target group* dalam pengembangan pelayanan pendidikan.

Pendekatan pendidikan bagi masyarakat nelayan perlu mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi rumah tangga nelayan. Aspek sosial-ekonomi nelayan lebih memfokuskan sasaran target pelayanan pendidikan kepada mayoritas rumah tangga nelayan yang miskin. Selanjutnya, intervensi pendidikan untuk nelayan harus memberikan prioritas kepada anak laki-laki usia 13 tahun ke atas. Selain itu, dalam pendekatan pelayan kesehatan perlu

dilakukan perbaikan dengan menata kembali fungsi kader penggerak posyandu, serta kebijakan pengendalian kelahiran melalui program keluarga berencana.

Aspek demografi dalam pembangunan SDM masyarakat nelayan hendaknya menjadi prioritas utama. Tingginya angka kelahiran keluarga nelayan memerlukan sebuah penanganan khusus/program untuk mengendalikan angka kelahiran. Pengendalian kelahiran pada masyarakat nelayan memang sangat mendesak agar dalam jangka panjang besarnya anggota rumah tangga nelayan dapat dikendalikan secara berangsur-angsur. Oleh karena itu, pendidikan keluarga berencana yang didesain untuk masyarakat nelayan pada masa yang akan datang perlu dirancang.

Pada bidang pendidikan, perlu dipertahankan tingkat daftaran anak usia sekolah baik pria maupun wanita sebagai target kebijakan pendidikan untuk masyarakat nelayan. Perlu ditetapkan bahwa anak nelayan diharuskan menyelesaikan pendidikan minimal setingkat SMU, baik umum maupun kejuruan. Pembangunan pendidikan pada masyarakat dalam jangka panjang harus dapat menjamin kemampuan generasi mendatang dapat memilih tindakan-tindakan alternatif sehingga dapat ditentukan pilihan yang rasional.

Program pendidikan pada komunitas nelayan bagi pengelola pendidikan, memang memerlukan pendekatan-pendekatan tersendiri agar selain terlaksananya pelayanan pendidikan, juga sekaligus dapat mengembangkan kreasi dan kualitas pendidikan yang diperoleh anak-anak nelayan. Sementara itu, pada aspek kesehatan dalam membangun SDM masyarakat nelayan adalah pelayanan kesehatan ibu dan anak balita. Sasaran yang ingin dicapai adalah

mengaktifkan sarana tempat ibu anak balita untuk saling berinteraksi dan belajar. Semakin sering mereka berinteraksi akan semakin meningkat pengetahuan, kesadaran, dan praktek hidup bersih.

Penataan posyandu merupakan langkah yang akan menghasilkan peningkatan sumberdaya manusia lebih khusus nelayan. Selain itu, perlu pula perbaikan sanitasi dan kebersihan lingkungan tentunya akan menjadi agenda yang penting.

Pada aspek kesehatan lingkungan, kesadaran masyarakat nelayan diakui masih rendah. Lingkungan perumahan yang bersih sesuai syarat-syarat kesehatan masih jauh dari tradisi masyarakat nelayan. Menyangkut masalah kesehatan, persoalan *indoor pollution* perlu menjadi target untuk diturunkan atau direalisasikan pada masa mendatang.

Pendekatan pengembangan sumberdaya manusia masyarakat nelayan, baik aspek nelayan pendidikan maupun aspek pelayanan kesehatan perlu dilakukan secara sistematis dan disesuaikan dengan masa-masa produksi dan reproduksi rumah tangga nelayan. Bila proses pengembangan sumberdaya manusia nelayan dapat didahulukan dalam proses pembangunan satu daerah, maka dengan sendirinya konsep pengembangan wilayah pesisir dan kelautan akan berhasil. Pengembangan sumberdaya manusia yang menggantungkan hidupnya kepada lingkungan pesisir dan kelautan dapat dilakukan melalui peningkatan ilmu pengetahuan nelayan dan kesehatan lingkungan nelayan itu sendiri.

Selama ini, ada beberapa kendala pemberdayaan masyarakat nelayan yang dilakukan melalui program pemerintah yaitu jangka waktu implementasi sangat pendek sementara dana yang harus disalurkan relatif besar, dan pada saat yang bersamaan tenaga lapangan sangat terbatas. Program pemerintah selama ini menggunakan pendekatan *participatory rural appraisal* yang membutuhkan tenaga fasilitator dalam jumlah yang banyak agar mampu menampung aspirasi masyarakat. Akan tetapi, pada kenyataannya ketersediaan tenaga fasilitator sangat terbatas. Di samping kedua hal di atas, kendala pemberdayaan masyarakat melalui program pemerintah adalah proses penyaluran dana mulai dari Pemerintah Pusat sampai pada penerima bantuan masih dihadapkan dengan mata rantai yang cukup panjang. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan kondisi penerima bantuan seperti musim maupun keadaan iklim.

G. Proses Perencanaan

Umumnya, beberapa bentuk proses perencanaan yang dikemukakan hampir sama. Patton dan Sawicki (1986) mengemukakan bahwa proses dengan *six-step process* dapat dilakukan melalui pendefinisian problem, penentuan kriteria evaluasi, pengidentifikasian alternatif, perbandingan alternatif, dan *monitor outcomes*. Menurut Alexander (1988), proses perencanaan merupakan serangkaian urutan langkah-langkah, yaitu diagnosis masalah, mengartikulasi tujuan, prediksi dan proyeksi alternatif, desain alternatif, implementasi, dan evaluasi.

Conyers dan Hill (1984) mengemukakan bahwa proses perencanaan merupakan suatu proses yang siklikal dan secara berurutan tahapannya yang di desain untuk menghubungkan rumusan kebijakan tujuan dengan desain program/projek dan dari implementasi program dan projek dapat menjadi masukan pada lingkaran perencanaan selanjutnya.

Keputusan awal untuk mengadopsi suatu perencanaan sebagai alat untuk penanganan problem pembangunan serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki merupakan suatu hal yang krusial. Kemudian diikuti dengan adanya suatu kerangka kerja dari organisasi perencanaan pemerintah atau agen perencanaan. Organisasi perencanaan tersebut dibentuk untuk menangani proses perencanaan baik itu kesuksesan maupun kegagalan.

H. Implementasi Kebijakan

Beberapa pakar telah merumuskan konsep tentang implementasi kebijakan. Antara kebijakan dan implementasi memiliki hubungan yang saling terikat dan salah satunya tidak dapat diabaikan. Kebijakan dan implementasi perlu berjalan beriringan. Implementasi merupakan pembuktian kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kebijakan yang telah ditetapkan dapat diterapkan pada masyarakat untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut berpengaruh pada masyarakat.

Anderson (dalam Sugondo dan Bambang, 1994: 8) mendefinisikan implementasi sebagai upaya mewujudkan pilihan dan keputusan untuk menjadi kenyataan. Pendapat yang lebih luas dikemukakan oleh Edwards (dalam

Winarno, 2008: 174) yang menurutnya implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2006: 146) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok), pemerintah, maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

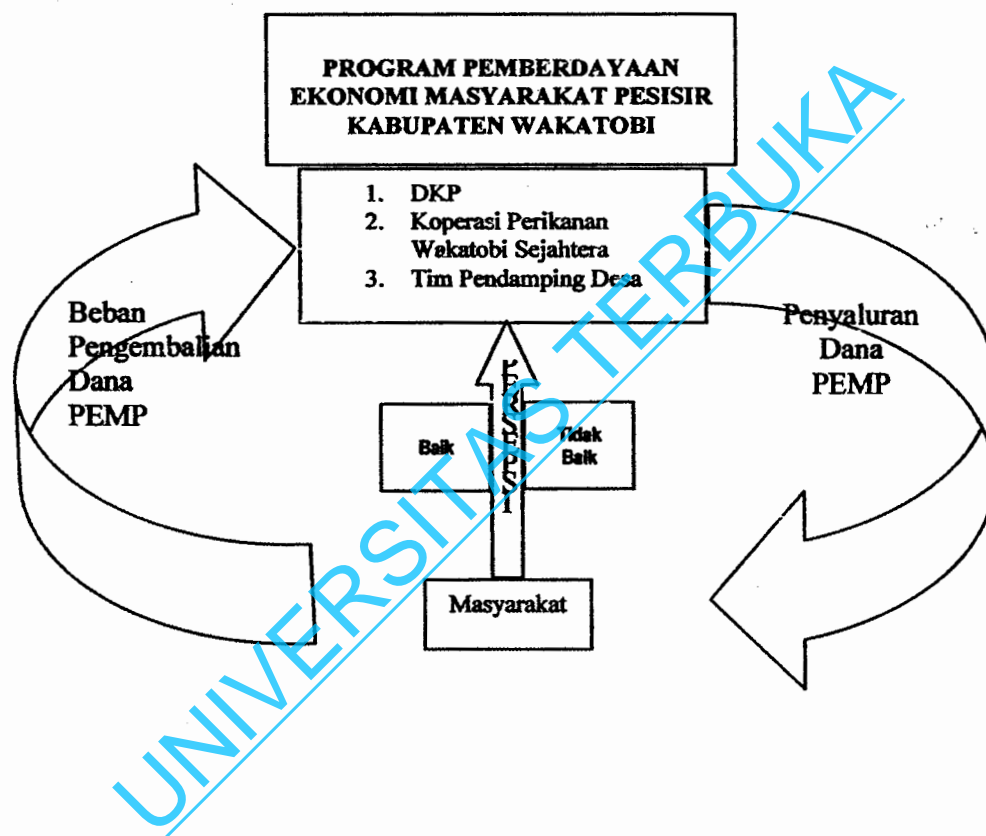
Van Meter dan Van Horn menyebutkan bahwa beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan tipologi kebijakan-kebijakan publik, yakni pertama, kemungkinan implementasi yang efektif akan bergantung sebagian pada tipe kebijakan yang dipertimbangkan. Kedua, faktor-faktor tertentu yang mendorong realisasi atau nonrealisasi tujuan-tujuan program akan berbeda dengan tipe kebijakan yang lain. Suatu implementasi akan berhasil bila perubahan marginal diperlukan dan konsensus tujuan adalah tinggi. Sebaliknya, bila perubahan besar ditetapkan dan konsensus tujuan rendah, maka prospek atau peluang implementasi yang efektif akan sangat diragukan.

I. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam suatu penelitian dibutuhkan sebagai pedoman dalam melakukan kajian analisis, teori, dan data empiris yang dijumpai dan akan dikembalikan pada alur pikir yang telah ditetapkan. Kerangka pikir penelitian ini merupakan hasil telaahan dari teori persepsi sebagaimana pendapat Haywood

(1986) sebagaimana dikutip Natuna (2004: 48). Selain itu, teori Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2006: 146) tentang pengimplementasian program/kebijakan juga dirujuk untuk saling melengkapi dengan teori-teori lainnya dalam menelaah masalah penelitian. Penelitian yang berjudul “Persepsi Masyarakat terhadap Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kabupaten Wakatobi”, menggunakan alur pikir seperti yang tergambar di bawah ini.

Gambar 2.2 Skema Kerangka Pikir Penelitian





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini ingin memberikan gambaran metode yang aktual dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, menganalisis data, dan menginterpretasikannya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik pendekatan secara kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2001: 3) mengatakan bahwa prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati disebut metodologi kualitatif.

Penelitian ini lebih merupakan studi kasus yang merupakan pengujian yang mendalam dan terinci dari suatu konteks, dari suatu objek, dari satu kumpulan dokumen, atau dari satu kejadian khusus. Tujuannya yakni memperoleh pemahaman yang mendalam, holistik, mengabaikan representatif subyektif peneliti terhadap responden, tidak menggunakan sampel besar, dan tidak dianalisis dengan angka secara statistik.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Alasan penulis menggunakan metode kualitatif yakni agar peneliti mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi/data mengenai persepsi masyarakat terhadap pengimplementasian program PEMP di Kabupaten Wakatobi. Selain itu, akan ditelusuri faktor-faktor apa yang memengaruhi program PEMP di Kabupaten Wakatobi. Melalui penjangkaran informasi tersebut diharapkan terkumpul

informasi mengenai tentang faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan program PEMP Kabupaten Wakatobi.

B. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, kuesioner, dan wawancara.

1) Observasi

Teknik observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pengimplementasian program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Wakatobi. Observasi diperlukan untuk mengetahui tindakan yang ditempuh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi, Tim Pendamping Desa, dan Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera, serta melihat perubahan kondisi perekonomian nelayan penerima program. Hasil observasi digunakan sebagai pembandingan data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner.

2) Kuesioner

Teknik ini dipakai untuk menjaring data dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner. Penggunaan instrumen ini dipandang lebih tepat karena data dapat diperoleh melalui pernyataan responden tentang persepsi responden terhadap pengimplementasian program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Wakatobi.

3) Wawancara

Teknik wawancara juga dilakukan untuk mengetahui tanggapan pihak pengimplementasi program, yakni pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi, Tim Pendamping Desa, dan pengurus Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera. Wawancara kepada pihak pengimplementasi program PEMP Kabupaten Wakatobi berguna untuk membandingkan hasil observasi peneliti dan data hasil kuesioner yang merupakan tanggapan nelayan penerima program dengan tanggapan pihak pengimplementasi program (DKP Kabupaten Wakatobi, Tim Pendamping Desa, dan Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera).

C. Teknik Analisis Data

Penelitian apapun perlu menggunakan metode sistematis untuk memperoleh pengetahuan, yaitu suatu alat untuk memperoleh pengertian tentang dunia samar atau dunia gelap yang masih belum seberapa dipahami (Sanapiah, 1990: 88). Pengetahuan dan pengertian yang dimaksudkan Sanapiah tersebut yakni suatu cara kerja penginterpretasian data untuk menjelaskan dunia yang tersamar atau dunia gelap. Interpretasi diawali melalui pengumpulan data/informasi yang selanjutnya data/informasi tersebut dianalisis guna mengenali bagian-bagiannya dan mengintegrasikan antarbagian dalam membentuk keseluruhan fenomena.

Pengetahuan atau pengertian tersebut pada kenyataannya bersandar pada relasi antarsymbol yang membentuk makna tertentu. Untuk memperoleh makna

tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan induksi-konseptualisasi. Melalui pendekatan ini maka peneliti akan bertolak dari faktor/informasi empiris untuk membangun konsep.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis domain. Teknik analisis ini digunakan untuk memperoleh gambaran/pengertian yang bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang apa yang tercakup di suatu fokus/pokok permasalahan yang tengah diteliti. Metode analisis domain digunakan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan program PEMP Kabupaten Wakatobi berdasarkan persepsi responden. Persepsi yang dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada mekanisme penyaluran dan beban pengembalian dana program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP).

D. Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai “Persepsi Masyarakat terhadap Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir” bertempat di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya Kecamatan Wangi-Wangi dan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan. Pemilihan Kabupaten Wakatobi sebagai Lokasi atau tempat penelitian atas pertimbangan:

- 1) Kabupaten Wakatobi merupakan penerima program PEMP dari pemerintah pusat.
- 2) Nelayan di Kecamatan Wangi-Wangi dan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan adalah nelayan penerima dana program PEMP.

- 3) Penulis merupakan warga yang bermukim di daerah program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Kabupaten Wakatobi.

Penelitian ini mengkaji dua masalah utama, yakni *pertama*, persepsi masyarakat penerima program PEMP terhadap mekanisme penyaluran, *kedua*, persepsi masyarakat penerima program PEMP terhadap beban pengembalian dana pinjaman, dan yang *ketiga*, faktor-faktor yang memengaruhi implementasi program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Metode penelitian yang digunakan adalah metode observasi, kuesioner, dan wawancara. Melalui metode ini peneliti secara langsung mengunjungi lokasi penelitian untuk melakukan observasi, menyebarkan kuesioner ke nelayan penerima program, dan mewawancarai pihak pengimplementasi program PEMP Kabupaten Wakatobi (lokasi penelitian dapat dilihat pada halaman lampiran).

E. Responden dan Informan

Objek penelitian ini adalah nelayan penerima program PEMP di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kelompok nelayan penerima program PEMP ditetapkan sebagai responden penelitian yang berperan mengisi kuesioner yang dibagikan peneliti. Nelayan penerima program PEMP merupakan responden utama karena kelompok tersebut diketahui memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dengan permasalahan penelitian. Responden penelitian berjumlah 100 orang yang terdiri atas 50 orang dari

Kecamatan Wangi-Wangi dan sejumlah 50 orang dari Kecamatan Wangi-Wangi Selatan.

Data yang diperoleh dari responden dilengkapi dengan informasi tambahan dari pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan dana program PEMP Kabupaten Wakatobi. Data tambahan tersebut diperoleh dengan hasil mewawancarai pengelola program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Kabupaten Wakatobi yang terdiri atas:

- 1) Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Wakatobi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) beserta stafnya yang terlibat langsung.
- 2) Pengurus Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera.
- 3) Tim Pendamping Desa (TPD).

F. Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan sejumlah istilah utama/kunci yang berhubungan dengan masalah penelitian. Istilah-istilah yang tersebut yakni *persepsi, masyarakat pesisir, penerima program PEMP, implementasi program, dan program PEMP*. Semua istilah tersebut penulis berupaya mendefinisikannya guna menyamakan pengertian dan menghindari kesalahpahaman antara maksud penulis dan pembaca.

Guna maksud menyamakan definisi mengenai istilah-istilah yang penulis pakai, berikut ini diberikan batasan istilahnya.

- 1) *Persepsi* merupakan pemahaman yang diperoleh seseorang atau kelompok (nelayan penerima program dana PEMP) melalui suatu proses internalisasi nilai-nilai yang didapat dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan program.
- 2) *Masyarakat pesisir* yakni masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir pantai yang memilih profesi sebagai nelayan.
- 3) *Penerima program PEMP* yakni masyarakat pesisir yang memperoleh dana program PEMP setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak implementor (DKP, TPD, dan Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera).
- 4) *Implementasi program* merupakan pelaksanaan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok), pemerintah, maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.
- 5) *Program PEMP* yakni program Pemerintah Pusat yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir (nelayan) melalui sebuah bantuan dana pendukung kegiatan perikanan. Program PEMP dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan, bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan, dan Bappenas.



BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Kabupaten Wakatobi merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Buton melalui Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339). Secara umum kondisi wilayah Kabupaten Wakatobi dapat digambarkan seperti penjelasan berikut ini.

Kabupaten Wakatobi—dulu dikenal dengan sebutan Kepulauan Tukang Besi—merupakan singkatan dari empat nama kecamatan utama di kepulauan tersebut, yakni Kecamatan *Wangi-Wangi*, Kecamatan *Kaledupa*, Kecamatan *Tomia*, dan Kecamatan *Binongko*. Kabupaten yang memekarkan diri dari Kabupaten Buton pada tahun 2003 ini terletak di sebelah Timur Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang membentang dari utara ke selatan di antara $5^{\circ}12'$ – $6^{\circ}10'$ LS (sepanjang kurang lebih 160 km) dan $123^{\circ}20'$ – $124^{\circ}39'$ BT (sepanjang kurang lebih 120 km). Kepulauan Wakatobi merupakan gugusan pulau-pulau kecil bahkan dapat dikatakan sebagai gugusan pulau sangat kecil, berjumlah 48 buah pulau dengan luas daratan 823 km^2 dan luas perairan 55.113 km^2 serta panjang garis pantai 251,96 km.

Kabupaten Wakatobi berbatasan dengan beberapa wilayah kabupaten yang ada di sekitar Kepulauan Wakatobi, yakni:

- 1) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Buton.
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores.
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan Laut Banda.
- 4) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Buton dan Muna.

Pada tahun 1995, Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Kehutanan menetapkan Kepulauan Wakatobi sebagai Taman Wisata Alam Laut (SK Menteri Kehutanan RI Nomor 462/KPTS-II/1995). Penetapan Kepulauan Wakatobi sebagai Taman Wisata Alam Laut dengan pertimbangan Kepulauan Wakatobi merupakan salah satu wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati laut yang terlengkap di dunia. Selanjutnya, pada tahun 1996, Taman Wisata Alam Laut ditingkatkan statusnya menjadi wilayah konservasi dengan status Taman Nasional (SK Menteri Kehutanan RI Nomor 393/Kpts-VI/1996).

Seiring dengan perubahan politik nasional yang menekankan otonomi dan desentralisasi kewenangan, Kabupaten Wakatobi berdiri sebagai daerah otonom baru melalui Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 (tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara). Kondisi ini tentunya akan menempatkan Wakatobi sebagai daerah otonom sekaligus daerah konservasi laut (kabupaten konservasi), baik dalam konteks ruang wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara maupun dalam skala yang lebih luas.

Kepulauan Wakatobi berada di pusat Segi Tiga Karang Dunia (*Coral Tri-angle Center*). Daerah ini memiliki jumlah keanekaragaman hayati kelautan

tertinggi di dunia yakni 750 jenis karang dari 850 spesies karang dunia, 900 jenis ikan dunia dengan 46 *dive sites* teridentifikasi (salah satunya Marimabok). Wakatobi memiliki 90.000 ha terumbu karang dan atol Kaledupa (48 km). Atol Wakatobi merupakan atol kedua terpanjang di dunia setelah atol di benua Australia.

Penduduk Kabupaten Wakatobi menurut hasil sensus penduduk tahun 2000 berjumlah 87.793 jiwa yang terdiri atas laki-laki 42.620 jiwa dan perempuan 45.173 jiwa. Hasil pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan pada tahun 2003, tercatat bahwa penduduk Wakatobi berjumlah 91.497 jiwa (laki-laki sebanyak 44.843 jiwa dan perempuan 46.654 jiwa). Sebaran jumlah penduduk di setiap kecamatan adalah Kecamatan Wangi-Wangi sejumlah 21.221 jiwa, Wangi-Wangi Selatan sejumlah 22.519 jiwa, penduduk Kaledupa berjumlah 17.307 jiwa, Tomia sejumlah 16.420 jiwa, dan Binongko berpenduduk sekitar 14.030 jiwa.

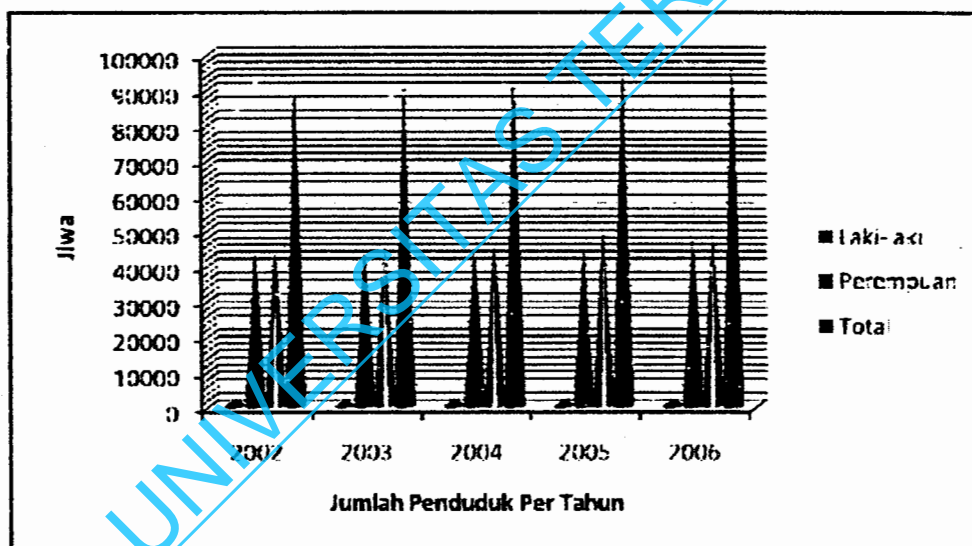
Penduduk Kabupaten Wakatobi memiliki pertumbuhan rata-rata 1,41% per tahun. Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Wakatobi sebesar 111 jiwa/km². Adapun wilayah terpadat berada di Kecamatan Kaledupa 166 jiwa/km², menyusul Kecamatan Tomia sejumlah 141 jiwa/km², kemudian Kecamatan Wangi-Wangi Selatan berjumlah 109 jiwa/km², selanjutnya Kecamatan Wangi-Wangi 88 jiwa/km², dan Kecamatan Binongko sebesar 87 jiwa/km².

Struktur penduduk Kabupaten Wakatobi didominasi oleh penduduk usia muda (berusia 15 tahun ke bawah) sejumlah 34,55% atau 31.610 jiwa dari total

penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Wakatobi mempunyai ciri penduduk “muda” karena masih besarnya persentase penduduk di bawah usia 15 tahun. Kondisi ini dapat pula dilihat dari besarnya angka beban tanggungan yang mencapai 67,96%, yang mana angka ini memperlihatkan perbandingan angka antara banyaknya orang yang tidak produktif (umur dibawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan banyaknya orang yang termasuk produktif secara ekonomi (15—64 tahun).

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Wakatobi dari tahun 2000—2005 sebesar 1,70 persen. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2006 sebesar 2,73 persen. Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Wakatobi berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 4.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Wakatobi Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: BPS Kabupaten Wakatobi, tahun 2008.

Berdasarkan perkembangannya, sampai tahun 2008, wajib KTP di Kabupaten Wakatobi yang dilayani di Kota Wangi-Wangi sebanyak 67.014 jiwa. Penduduk Kabupaten Wakatobi yang wajib KTP tersebut terdiri atas laki-laki berjumlah 34.300 jiwa wajib KTP dan perempuan berjumlah 32.714 jiwa wajib KTP.

1. Profil Kecamatan Wangi-Wangi

Kecamatan Wangi-Wangi terletak di jazirah tenggara kepulauan Sulawesi dan bila ditinjau dari peta Provinsi Sulawesi Tenggara secara geografis terletak di bagian utara deretan Kepulauan Wakatobi. Sebelah utara Kecamatan Wangi-Wangi berbatasan dengan Laut Banda, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kaledupa dan pada sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Lasalimu. Kecamatan Wangi-Wangi memiliki luas wilayah $\pm 241,98 \text{ km}^2$ terdiri atas 9 wilayah desa/kelurahan yang semuanya berada di wilayah daratan, yaitu Kelurahan Pongo, Desa Maleko, Desa Longa, Desa Tindoi, Kelurahan Wanci, Kelurahan Wandoka, Desa Sombu, Desa Waha, dan Desa Waetuno.

Desa yang paling luas wilayahnya adalah Desa Waha dengan luas 63,64 km^2 atau 26,30% terhadap total luas wilayah Kecamatan Wangi-Wangi. Sebaliknya, Desa Sombu merupakan desa yang paling sempit wilayahnya dengan luas wilayah hanya 5,50 km^2 atau 2,27% terhadap total luas wilayah Kecamatan Wangi-Wangi.

Keadaan musim di Kecamatan Wangi-Wangi pada umumnya sama seperti di daerah-daerah lain di Indonesia. Terjadi dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Pada bulan April dan Mei, terjadi musim pancaroba yang berakibat pada arah angin dan curah hujan menjadi tidak menentu.

Wilayah administrasi Kecamatan Wangi-Wangi keadaan tahun 2006 terdiri dari 6 desa, 3 kelurahan, dan 51 dusun/lingkungan. Di Kecamatan Wangi-Wangi terdapat program dasawisma, yang mana desa/kelurahan yang paling banyak anggotanya adalah Kelurahan Waetuno yakni berjumlah 986 orang. Desa yang paling sedikit jumlah penduduknya yakni Desa Maleko dengan jumlah 80 orang. Sejumlah 3.307 rumah termasuk kategori permanen. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Wangi-Wangi sudah mulai memikirkan kebutuhan papan selain kebutuhan pangan dan sandang.

Penduduk Kecamatan Wangi-Wangi terhitung tahun 2005 berjumlah 21.967 jiwa. Pada tahun 2007, penduduk Kecamatan Wangi-Wangi mengalami peningkatan yang pesat menjadi 23.572 jiwa. Pertambahan penduduk Kecamatan Wangi-Wangi tersebut dari tahun 2006 hingga tahun 2007 (sensus terakhir) mengalami peningkatan sebesar 1,41% (BPS Kabupaten Wakatobi: Kecamatan Wangi-Wangi dalam Angka, 2008: 25).

Setiap tahun, penduduk Kecamatan Wangi-Wangi mengalami pertambahan. Akan tetapi, pertambahan penduduk Kecamatan Wangi-Wangi tidak dibarengi dengan pemerataan penyebaran penduduk. Penyebaran penduduk pada tahun 2007 tercatat 17,95% penduduk bermukim di Kelurahan Wanci, 15,72% bermukim di Kelurahan Pongo. Kedua kelurahan ini (Wanci dan

Pongo) merupakan dua desa yang paling tinggi jumlah penduduknya. Desa Pookambua merupakan desa yang paling minim jumlah penduduknya, yakni hanya didiami penduduk sekitar 1,87%.

Alat tangkap perikanan yang digunakan penduduk Kecamatan Wangi-Wangi adalah jenis alat tangkap tradisional. Pada umumnya, alat tangkap yang digunakan terdiri atas jaring insang sebanyak 166 unit, jaring angkat sejumlah 26 unit, alat tangkap berupa pancing sejumlah 551 unit, dan perangkap sebanyak 88 unit.

Potensi pertanian di Kecamatan Wangi-Wangi kurang menggembirakan. Kondisi tanah yang kurang memungkinkan untuk menanam jenis tanaman yang bernilai ekonomis tinggi. Tanaman perkebunan yang dikelola oleh penduduk Kecamatan Wangi-Wangi berupa ubi kayu, jalar, jagung, kacang tanah, dan bawang. Luas tanah pertanian juga sangat terbatas karena jenis tanah yang ada di Kabupaten Wakatobi secara keseluruhan berupa tanah berbatu-batu dan gersang yang merupakan ciri tanah di pulau karang. Kendala tanah yang kurang mendukung pertanian secara besar-besaran memaksa penduduk untuk lebih memilih usaha di bidang perikanan.

Pada sektor lain, yakni sektor peternakan, populasi ternak yang dikembangkan oleh penduduk Kecamatan Wangi-Wangi berupa ternak sapi, kambing, ayam, dan itik/bebek. Pada tahun 2007, ternak sapi yang diusahakan oleh penduduk mencapai 103 ekor, ternak kambing berjumlah 854 ekor, ternak ayam buras mencapai 4.691 ekor, dan ternak itik/bebek berjumlah 3.328 ekor.

Ternak yang dikembangkan oleh penduduk Kecamatan Wangi-Wangi tidak dikelola secara profesional, tetapi secara tradisional. Ternak-ternak yang ada dianggap sebagai usaha sampingan. Akibatnya, pengembangan ternak di Kecamatan Wangi-Wangi tidak mengalami pertumbuhan yang maksimal. Sikap masyarakat yang kurang memaksimalkan potensi ternak disebabkan oleh kondisi geografis Kecamatan Wangi-Wangi yang tidak memungkinkan untuk mengembangkan usaha-usaha peternakan secara besar-besaran. Kebiasaan masyarakat Wakatobi yang masih mengutamakan ikan sebagai makanan pokok juga menjadi salah satu penyebab kurang maksimalnya pengembangan usaha peternakan di Kecamatan Wangi-Wangi.

2. Profil Kecamatan Wangi-Wangi Selatan

Kecamatan Wangi-Wangi Selatan terletak di kepulauan jazirah tenggara pulau Sulawesi. Jika ditinjau dari peta Propinsi Sulawesi Tenggara secara geografis Kecamatan Wangi-Wangi Selatan terletak di bagian utara deretan Kepulauan Wakatobi. Sebelah utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan berbatasan dengan Kecamatan Wangi-Wangi, dan sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Laut Banda.

Kecamatan Wangi-Wangi Selatan memiliki luas wilayah $\pm 206,02 \text{ km}^2$ terdiri dari 12 wilayah desa/kelurahan, yakni Desa Liya Mawi, Desa Mola Utara, Desa Liya Togo, Desa Numana, Desa Mola Utara, Desa Wungka, Desa Kumala, Desa Matahora, Desa Kapota, Desa Kabita, Kelurahan Mandati I, dan Kelurahan Mandati II. Desa yang paling luas wilayahnya adalah Liya Togo

dengan luas 47,7 km² atau 23,15% terhadap total luas wilayah Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, sedangkan Mola Utara merupakan desa yang paling sempit luas wilayahnya dengan luas 2,3 km² atau 1,12% terhadap luas wilayah Kecamatan Wangi-Wangi Selatan.

Keadaan musim di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan pada umumnya sama seperti daerah-daerah di Indonesia yang mana mempunyai 2 musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi bulan Desember sampai dengan bulan April, pada saat tersebut angin darat yang bertiup dari Benua Asia dan lautan pasifik yang mengandung banyak uap air. Musim kemarau terjadi antara bulan Juli dan September. Pada bulan-bulan tersebut angin timur bertiup dari benua Australia, sifatnya kering dan kurang mengandung air. Khusus pada bulan April dan Mei, di daerah Kecamatan Wangi-Wangi Selatan arah angin tidak menentu, begitu pula halnya dengan curah hujan. Bulan April dan Mei, oleh masyarakat Wakatobi, dikenal sebagai musim pancaroba.

Tinggi-rendahnya suhu udara pada suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh posisi dan ketinggian tempat tersebut dari permukaan laut. Makin tinggi suatu tempat dari suatu tempat dari permukaan air laut akan semakin rendah suhu udara dan sebaliknya. Wilayah daratan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan mempunyai ketinggian umumnya di bawah 1.000 meter dari permukaan air laut dan berada di daerah khatulistiwa, sehingga daerah ini beriklim tropis.

Wilayah administrasi Kecamatan Wangi-Wangi Selatan pada keadaan tahun 2006 terdiri atas sepuluh desa dan dua kelurahan. Pembagian wilayah

administrasi yang ada yaitu lingkungan/dusun yang terdiri dari 49 desa/kelurahan. Dari dua belas desa/kelurahan yang ada, hanya empat desa/kelurahan yang memiliki balai desa dan sanggar PKK. Kelompok dasawisma terbanyak terdapat di Kelurahan Mandati I dan Mandati II. Jumlah anggota terbanyak terdapat di Kelurahan Mandati I, yaitu mencapai 1.084 orang anggota. Sebagian besar rumah yang ada di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan adalah rumah nonpermanen. Presentase keseluruhan rumah nonpermanen di kecamatan ini mencapai 75 persen, tidak termasuk Desa Kapota, Desa Kabita, dan Desa Liya Mawi.

Penduduk Kecamatan Wangi-Wangi Selatan menurut hasil registrasi penduduk tahun 2005 berjumlah 23.401 jiwa yang terdiri dari 11.454 jiwa penduduk laki-laki dan 11.947 jiwa penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk pada kurun waktu tahun 2005—2006 tercatat sebesar 6,15 persen per tahun. Daerah yang paling tinggi laju pertumbuhannya adalah Desa Numana (12,99%) dan paling rendah adalah Desa Matahora (3,25%).

Jumlah penduduk Kecamatan Wangi-Wangi Selatan pada tahun 2006 sebanyak 24.839, dengan persebaran yang cukup merata. Penduduk terbanyak berada di Kelurahan Mandati I dengan persentase penduduk mencapai 16% dari total penduduk Wangi-Wangi Selatan secara keseluruhan. Kemudian, penduduk terbanyak kedua berada di Desa Mola Selatan dengan persentase penduduk 13%, Mola Utara dan Liya Mawi masing-masing 11%. Daerah yang paling padat penduduknya adalah Desa Mola Utara dengan kepadatan penduduk

mencapai 1.234 jiwa/km². Desa Mola Selatan berpenduduk sekitar 527,33 jiwa/km².

Pelaksanaan pembangunan sosial telah mendorong pemerintah mengupayakan berbagai usaha guna tercapainya kesejahteraan masyarakat. Usaha tersebut meliputi kegiatan-kegiatan di bidang Pendidikan, Kesehatan, Keluarga Berencana, dan sosial lainnya. Pendidikan di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dititikberatkan pada peningkatan mutu dan perluasan wajib belajar di semua jenjang pendidikan, yaitu mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

Upaya meningkatkan mutu pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berilmu pengetahuan. Usaha perluasan wajib belajar dimaksudkan agar pendidikan usia sekolah yang tiap tahun meningkat sejalan dengan laju, pertumbuhan penduduk itu sendiri. Indikator yang dapat mengukur pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan yakni jumlah sekolah, guru dan murid, semua jenjang pendidikan mulai dari pra sekolah (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), sampai jenjang SLTA pada tahun 2006.

Pembangunan kesehatan di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dititikberatkan pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan terwujudnya keluarga bahagia dan sejahtera. Demikian pula pelaksanaan program Nasional Keluarga Berencana (KB) Nasional diarahkan untuk menciptakan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). Untuk mencapai tujuan tersebut di atas baik di bidang kesehatan maupun KB, maka

selama tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Wakatobi telah giat melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan KB secara menyeluruh di setiap kecamatan sampai ke desa/kelurahan. Indikator pembangunan sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan.

Tanah menurut penggunaannya, maka yang paling luas adalah lahan yang sementara tidak diusahakan, yakni seluas 990,5 ha (24%), kemudian perkebunan rakyat 841,2 ha (21%). Lahan yang digunakan untuk lahan pertanian sebesar 32%, meliputi ladang/huma (11%) tegal/kebun (11%) dan perkebunan rakyat (10%).

Jenis populasi ternak yang dikembangkan di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan terdiri dari ternak besar, ternak kecil, dan ternak unggas. Populasi ternak kecil dan unggas mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Populasi ternak besar pada tahun 2006 yang ada hanyalah ternak sapi sebanyak 36 ekor. Bila dibandingkan dengan tahun 2005, populasi ternak sapi di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2005, jumlah sapi di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan berjumlah 22 ekor, dan pada tahun 2006 bertambah menjadi 36 ekor atau meningkat sebanyak 64,64% dari populasi tahun 2005.

Populasi ternak kecil yang dikembangkan pada tahun 2006 adalah ternak kambing sejumlah 679 ekor. Bila dibandingkan dengan tahun 2005, populasi kambing mengalami peningkatan yang pesat mencapai 67,59%, yang mana pada tahun 2005 hanya berjumlah 88 ekor. Populasi ternak unggas seperti itik/bebek

pada tahun 2006 mencapai 113 ekor, yang mana mengalami peningkatan sebesar 276,67% bila dibandingkan dengan tahun 2005 yang hanya mencapai 30 ekor.

Data sarana dan prasarana penangkapan ikan yaitu jumlah alat penangkap ikan dan perahu penangkap ikan. Pada umumnya, alat penangkap ikan di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan masih tradisional yang terdiri dari jaring insang sejumlah 23 unit, jaring angkat sejumlah 67 unit, pancing sejumlah 650 unit, dan lainnya sejumlah 50 unit.

Sarana perekonomian yang tersedia di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan pada tahun 2006 terdiri atas 2 unit pasar umum, 2 unit pasar ikan, 30 kelompok pertokoan, dan 319 unit kios/warung. Sarana perekonomian tersebar di tiap-tiap ibukota kecamatan.

Tersedia dua jenis kendaraan angkutan darat utama untuk memenuhi transportasi darat yaitu angkutan darat bermotor dan tanpa bermotor. Pada tahun 2006 jumlah mobil angkutan penumpang mencapai 15 buah, mobil pribadi (sedan) 16 buah, dan sepeda motor berjumlah 908 buah. Angkutan laut merupakan sarana perhubungan yang sangat penting dan strategis bagi masyarakat Kabupaten Wakatobi karena daerah ini memiliki wilayah perairan laut yang cukup luas dan terdiri dari beberapa pulau. Selain transportasi jalan, komunikasi juga memegang andil besar dalam kelancaran informasi pembangunan. Media komunikasi yang banyak memegang peranan di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan antara lain televisi dan radio.

Hasil inventarisasi data penginapan yang ada di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan pada tahun 2006 terdapat enam buah penginapan dengan jumlah kamar mencapai 43 buah serta 63 tempat tidur. Keenam buah penginapan tersebut tersebar di tiga desa, yaitu Desa Mola Utara, Kelurahan Mandati I dan Kelurahan Mandati II. Hotel dan penginapan hanya terpusat di tiga daerah tersebut sedangkan di desa-desa lainnya, sarana hotel dan penginapan belum ada. Jumlah tamu yang menginap di penginapan-penginapan tersebut selama tahun 2006 mencapai 500 orang. Tarif minimum berkisar antara Rp20.000 s.d. Rp30.000, sedangkan maksimum berkisar antara Rp85.000 s.d. Rp250.000.

3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Kabupaten Wakatobi

Program bantuan dana PEMP Kabupaten Wakatobi merupakan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dari Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang disalurkan melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dana program PEMP dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Wakatobi. Menteri Perikanan dan Kelautan membuat Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kepala DKP Kabupaten Wakatobi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), SPM, dan bendahara. Kepala DKP Kabupaten Wakatobi menjalankan tugasnya sebagai KPA program PEMP sesuai dengan rambu-rambu pelaksanaan program PEMP dari Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Prosedur dan pengelolaan penguatan modal mengenai dana program PEMP dicairkan langsung ke nelayan sasaran program (kelompok sasaran ataupun individu) melalui pihak ketiga (Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera). Pihak Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera akan mencairkan dana tersebut berdasarkan hasil identifikasi Tim Pendamping Desa (TPD) yang didasarkan pada kondisi obyektif nelayan di lapangan. Pengurus TPD diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran program PEMP. Tim Pendamping Desa berfungsi sebagai pendamping masyarakat dan melakukan identifikasi terhadap kebutuhan nelayan masyarakat pesisir. Pengurus TPD memperoleh honor bulanan mencapai Rp1.000.000 per orang.

Dana program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kabupaten Wakatobi digunakan tidak secara bergulir. Peminjam bisa saja memperpanjang lama pinjamannya bilamana memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pengelola program. Kelompok sasaran akan menanggung pengembalian kredit dengan bunga 1,5% di bawah bunga bank dengan jangka waktu pengembalian maksimal dua tahun. Kelompok sasaran yang meminjam dana program PEMP wajib menyertakan jaminan pinjaman berupa harta pribadi yang dinilai oleh Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera.

Kelompok sasaran yang diprioritaskan memperoleh pinjaman adalah kelompok nelayan, budidaya perikanan, pengusaha di bidang perikanan, maupun wisata bahari. Simpanan wajib anggota bagi kelompok peminjam sebesar Rp10.000, simpanan pokok sebesar Rp325.000. Dana program PEMP yang disalurkan di Kabupaten Wakatobi telah melalui dua tahap, yakni tahap

pertama pada tahun 2005 sebesar Rp540.000.000 dan tahap kedua yakni pada tahun 2006 sebesar Rp638.000.000. Total anggaran yang telah dikucurkan pemerintah untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Wakatobi telah mencapai jumlah Rp1.178.000.000.

B. TEMUAN

Penelitian tentang “Persepsi Masyarakat terhadap Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kabupaten Wakatobi” dilaksanakan di dua kecamatan, yaitu di Kecamatan Wangi-Wangi (Desa Waha) dan di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Desa Mola Utara). Responden penelitian berjumlah 50 orang nelayan penerima dana program PEMP dengan uraian sebagai berikut.

- 1) Desa Waha, Kecamatan Wangi-Wangi, jumlah responden yang dimintai persepsinya melalui kuesioner mengenai implementasi PEMP di Kabupaten Wakatobi berjumlah 50 nelayan penerima dana program PEMP.
- 2) Desa Mola Utara, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, jumlah responden yang dimintai persepsinya melalui kuesioner mengenai implementasi PEMP di Kabupaten Wakatobi berjumlah 50 nelayan penerima dana program PEMP.

Selain menjangkau persepsi nelayan mengenai implementasi program PEMP, peneliti juga mengadakan wawancara kepada pihak pengelola program, yakni pihak DKP Kabupaten Wakatobi, Tim Pendamping Desa, dan pengurus

Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera. Hasil wawancara kepada pihak pengelola program menjadi data penting dalam mempertemukan dan membandingkan data hasil kuesioner dengan data hasil wawancara, juga data hasil observasi langsung peneliti.

1. Karakteristik Responden

a. Responden menurut pekerjaan

Pekerjaan dalam kehidupan masyarakat sekarang ini memegang peranan yang sangat penting. Hal ini dijadikan acuan karena pekerjaan berhubungan langsung dengan tingkat pendapatan masyarakat dan sudah tentu adalah tingkat perekonomian masyarakat tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dan Kecamatan Wangi-Wangi, maka secara garis besar dapat dikemukakan di sini ialah bahwa seluruh responden atau anggota Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) adalah bermata pencaharian sebagai nelayan. Hal ini memang beralasan karena dalam ketentuan yang ditetapkan oleh instansi berwenang, yaitu program PEMP Kabupaten Wakatobi harus diberikan kepada keluarga nelayan, tetapi dikhususkan kepada nelayan skala usaha kecil.

Penerima dana program PEMP Kabupaten Wakatobi dikategorikan menjadi 3 jenis usaha, yaitu:

- 1) Penguatan Modal bagi masyarakat pesisir yang bekerja sama dengan lembaga keuangan.

2) *Solar Packed Dealer* untuk Nelayan (SPDN)/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Nelayan (SPBN);

3) Kedai Pesisir; dan

Pengategorian nelayan penerima dana program PEMP Kabupaten Wakatobi dapat dilihat pada tabel berikut 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1 Kategori Penerima Dana Program PEMP (Responden)

No.	Jenis Usaha	Jumlah Responden		
		Kecamatan Wangi-Wangi	Kecamatan Wangi-Wangi Selatan	Total
1.	Penguatan Modal (Nelayan)	27	35	62
2.	Kedai Pesisir	16	10	26
3.	SPDN	7	5	12
	Jumlah	50	50	100

Sumber: Data Hasil Olahan, 2008

Tabel di atas memperlihatkan bahwa dana program PEMP digunakan untuk tiga kebutuhan nelayan sebagaimana peruntukkan dana program PEMP. Ketiga jenis usaha yang dimodali dari dana PEMP yakni penguatan modal nelayan, usaha Kedai Pesisir, dan SPDN. Ketiga jenis pengalokasian dana PEMP di atas memang merupakan kebutuhan utama para nelayan di Kabupaten Wakatobi. Penguatan modal dan keberadaan SPDN memiliki pengaruh yang sangat berarti dalam meningkatkan kemampuan usaha nelayan Wakatobi. Sebaliknya, rendahnya modal yang dimiliki dan sulitnya memperoleh BBM yang disediakan SPDN sering menjadi penghambat upaya meningkatkan

pendapatan nelayan. Oleh karena itu, program bantuan dana PEMP lebih difokuskan pada usaha-usaha kelompok sasaran (nelayan) yang memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan taraf ekonomi masyarakat nelayan.

Apabila dilihat dari jumlah responden, dengan pengategorian nelayan pada Kecamatan Wangi-Wangi dan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, maka dapatlah dijelaskan bahwa di Kecamatan Wangi-Wangi terdapat 27 penerima dana program PEMP untuk penguatan modal (melaut), 16 nelayan penerima dana program PEMP untuk kebutuhan usaha Kedai Pesisir, dan 7 dana program PEMP untuk kebutuhan usaha SPDN. Di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan terdapat 35 penerima dana program PEMP untuk penguatan modal nelayan (melaut), 10 penerima dana program PEMP untuk kebutuhan usaha Kedai Pesisir, dan 5 penerima dana program PEMP untuk kebutuhan usaha SPDN.

Sesuai dengan ketentuan yang ada, maka yang berhak menerima bantuan dana program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kabupaten Wakatobi yakni nelayan skala usaha kecil (bukan PNS, TNI/polri, pengusaha, pelajar, dan mahasiswa). Nelayan skala usaha kecil juga merupakan nelayan yang berada pada kategori miskin. Nelayan kategori miskin menjadi prioritas penerima dana program PEMP Kabupaten Wakatobi agar nelayan penerima dana program dapat menggunakan potensi yang dimiliki yaitu sebagai nelayan. Dana program PEMP dapat dikembangkan menjadi modal dalam mengelola hasil laut yang ada guna meningkatkan pendapatan serta tingkat perekonomian mereka yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

b. Responden menurut tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan responden umumnya telah bebas buta huruf karena tingkat pendidikan terendah para responden yaitu telah lulus Sekolah Dasar (SD). Tingkat pendidikan responden yang umumnya telah lulus SD dapat meningkatkan pemahaman responden dalam proses pelaksanaan program. Lebih jelas mengenai tingkat pendidikan responden ini dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Responden

No.	Tk. Pendidikan Responden	Kecamatan Wangi-Wangi Selatan	Kecamatan Wangi-Wangi	Jumlah
1.	Tidak tamat SD
2.	Tamat SD	30	12	42
3.	SMP	12	21	33
4.	SMA	8	17	26
	Jumlah	50	50	100

Sumber: Data Hasil Olahan, 2008.

C. Pembahasan

Penelitian tentang “Persepsi Masyarakat terhadap Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Kabupaten Wakatobi” mengkaji dan menganalisis tiga objek amatan, yaitu:

- 1) Mekanisme penyaluran dana program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.

- 2) Beban pengembalian dana pinjaman program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.
- 3) Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.

1. Persepsi Masyarakat terhadap Mekanisme Penyaluran Dana PEMP

Persepsi masyarakat terhadap mekanisme penyaluran dana program PEMP Kabupaten Wakatobi, meliputi (a) persepsi masyarakat terhadap tahapan-tahapan penyaluran dana program PEMP, (b) persepsi masyarakat terhadap pelaksana penyaluran dana program PEMP, (c) persepsi masyarakat terhadap kelompok sasaran (target group), (d) persepsi masyarakat terhadap sasaran kegiatan/usaha, (e) persepsi masyarakat terhadap jaminan pinjaman, (f) persepsi masyarakat terhadap pertimbangan prioritas dalam pengucuran dana, dan (g) persepsi masyarakat terhadap monitoring dan evaluasi perkembangan usaha.

a. Persepsi masyarakat terhadap tahapan-tahapan penyaluran dana program PEMP

Tahapan penyaluran dana program PEMP Kabupaten Wakatobi meliputi tiga tahapan, yaitu tahap sosialisasi, tahap pembentukan kelompok, dan tahap penentuan jenis kegiatan kelompok. Tahapan-tahapan penyaluran dana memengaruhi proses penerimaan atau internalisasi pemahaman yang diharapkan sampai ke masyarakat. Segenap tahapan yang dilakukan seharusnya berlangsung secara sistematis yang akan memudahkan penerima dalam mengenali isi

program. Jawaban responden pada kuesioner yang disebar di lokasi penelitian dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3 Persepsi Masyarakat terhadap Tahapan-Tahapan Penyaluran Dana Program PEMP

No.	Persepsi Responden	Kecamatan				Jumlah Total	
		Wangi-Wangi		Wangi-Wangi Selatan			
		Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Baik	17	34	10	20	27	27
2.	Tidak Baik	33	66	40	80	73	73
	Jumlah	50	100	50	100	100	100

Sumber: Data Hasil Olahan, 2008.

Tabel 4.3 menunjukkan persentase persepsi responden terhadap tahapan-tahapan penyaluran dana program PEMP Kabupaten Wakatobi. Dari hasil persentase di atas diketahui bahwa sebagian besar responden (73%) menyatakan tahapan-tahapan penyaluran dana program PEMP Kabupaten Wakatobi tidak baik. Secara keseluruhan terdapat 73 responden atau 73% menjawab tahapan-tahapan penyaluran dana PEMP adalah tidak dilakukan dengan baik, dan hanya 27 responden atau 27% responden yang mengakui bahwa tahapan-tahapan penyaluran dana program PEMP Kabupaten Wakatobi telah dilakukan dengan baik.

Kategori ini bila dilihat per desa penelitian, maka untuk Kecamatan Wangi-Wangi Selatan diketahui bahwa 80% responden menyatakan tahapan-tahapan penyaluran dana program PEMP berjalan tidak baik. Hanya 20%

responden menyatakan bahwa tahapan-tahapan penyaluran dana PEMP tersebut telah dilakukan dengan baik. Persepsi masyarakat Kecamatan Wangi-Wangi menunjukkan 66% responden menyatakan tahapan-tahapan penyaluran dana program PEMP masih dilakukan dengan tidak baik. Hanya 34% responden yang menyatakan tahapan-tahapan penyaluran dana program PEMP Kabupaten Wakatobi telah dilakukan dengan baik oleh pengelola program.

Dari keseluruhan jawaban responden penelitian dapat diindikasikan bahwa persepsi masyarakat terhadap tahapan-tahapan penyaluran dana program PEMP Kabupaten Wakatobi yang dilaksanakan oleh pihak pengelola dana program PEMP adalah tidak dianggap baik oleh masyarakat. Hal ini berarti bahwa sebagian besar masyarakat penerima program PEMP Kabupaten Wakatobi menganggap tidak baik tahapan-tahapan penyaluran dana yang ditetapkan oleh pengelola dana program PEMP Kabupaten Wakatobi. Persentase persepsi responden yang menyatakan tahapan-tahapan penyaluran dana program PEMP tidak baik mencapai 73%. Sebaliknya, responden yang berpersepsi bahwa tahapan-tahapan penyaluran dana program PEMP telah berjalan baik hanya mencapai 27%.

Hasil persentase persepsi responden terhadap tahapan-tahapan penyaluran dana program PEMP Kabupaten Wakatobi oleh pengelola dana program PEMP di atas mengindikasikan bahwa pihak pengelola belum menerapkan tahapan-tahapan penyaluran dana secara baik dan terarah kepada nelayan penerima program. Umumnya, responden belum puas dengan mekanisme tahapan-tahapan penyaluran dana yang ditetapkan oleh pengelola

program. Hasil analisis terhadap persentase jawaban responden juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden penelitian mengakui bahwa mereka kurang memahami pelaksanaan tahapan-tahapan penyaluran dana program PEMP Kabupaten Wakatobi. Akibatnya, sebagian besar responden kehilangan informasi terhadap mekanisme tahapan-tahapan penyaluran dana program PEMP Kabupaten Wakatobi.

Beberapa responden yang ditemui di lapangan menyampaikan persepsinya tentang tahapan-tahapan penyaluran dana program PEMP berdasarkan pengalaman yang mereka alami.

“Saya merasa heran dalam penyaluran dana ini, banyak dibentuk kelompok dadakan agar bisa disalurkan dana bantuan.”
(Tanggapan Ahmad, Wangi-Wangi, Maret 2008).

“Tidak senang, karena ada kelompok yang dibantu tidak ikut sosialisasi sama sekali.”
(Tanggapan Nursana, Wangi-Wangi, Maret 2008).

“Kecewa karena dari kalangan kerabat pengelola dana saja yang kelihatannya diutamakan.”
(Tanggapan Supiati, Wangi-Wangi, Maret 2008).

Tanggapan di atas merupakan tiga tanggapan dari sebagian besar responden (73%) yang menyatakan tahapan-tahapan penyaluran dana program PEMP Kabupaten Wakatobi tidak baik. Responden yang bernama Ahmad, Nursana, dan Supiati, menyesalkan model penyaluran dana program PEMP Kabupaten Wakatobi yang tidak disalurkan kepada calon penerima yang sangat membutuhkan bantuan dana. Ahmad (responden penelitian) menyatakan dana selain diberikan kepada kelompok lama, juga diberikan kepada kelompok-

kelompok yang baru dibentuk (dadakan). Kekecewaan responden lain dialami Nursana yang mengungkapkan bahwa ada beberapa kelompok yang tidak mengikuti sosialisasi penyaluran dana program PEMP tetapi tetap turut menerima dana program PEMP. Selain itu, seperti dinyatakan Supiati, dalam penyaluran dana program PEMP, responden menilai pengelola program lebih mengutamakan keluarga atau kedekatan emosional (keluarga dan teman). Penyaluran dana program PEMP Kabupaten Wakatobi tidak dilakukan secara adil tetapi lebih mengutamakan relasi-relasi pribadi atau hubungan kekerabatan antara pengelola program dengan penerima dana program PEMP.

Tahapan-tahapan penyaluran dana program PEMP Kabupaten Wakatobi yang tidak disalurkan secara profesional dan tidak disampaikan secara terbuka kepada masyarakat sasaran menjadi salah satu penyebab rendahnya pemahaman masyarakat sasaran terhadap kehadiran dana program PEMP itu sendiri. Padahal, masyarakat sasaran sangat antusias untuk menjadi penerima dana program PEMP Kabupaten Wakatobi tersebut.

b. Persepsi masyarakat terhadap pelaksana penyaluran dana program PEMP

Penyaluran dana program PEMP Kabupaten Wakatobi, melibatkan tiga pihak yang dianggap paling berkompeten. Ketiga pihak yang paling menjadi pengelola dana program PEMP Kabupaten Wakatobi, yakni pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Wakatobi, pihak Tim Pendamping Desa (TPD) dan Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera. Dari ketiga pihak yang berkompeten menangani dana program PEMP Kabupaten

Wakatobi, pihak yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana program ke masyarakat sasaran (nelayan penerima program) yakni Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera.

Pihak Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera ditunjuk oleh DKP Kabupaten Wakatobi untuk menyalurkan dana program PEMP. Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera menjadi penyalur dana program PEMP Kabupaten Wakatobi. Masyarakat sasaran yang akan menerima dana program PEMP akan berhubungan dengan pihak Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera. Dengan demikian, segala persepsi masyarakat sasaran (penerima dana program PEMP) hanya ditujukan kepada penyalur dana yakni Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera. Persepsi masyarakat terhadap penyalur dana program PEMP Kabupaten Wakatobi dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.4 Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksana Penyaluran Dana Program PEMP

No.	Persepsi Responden	Kecamatan				Jumlah Total	
		Wangi-Wangi		Wangi-Wangi Selatan			
		Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Baik	25	50	18	36	43	43
2.	Tidak Baik	25	50	32	64	57	57
	Jumlah	50	100	50	100	100	100

Sumber: Data Hasil Olahan, 2008.

Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden (57%) menyatakan penyalur dana program PEMP dianggap belum baik dalam

melaksanakan kewenangannya. Responden yang menyatakan bahwa penyalur dana program PEMP telah melaksanakan tugasnya dengan baik berjumlah 43%. Dari data yang ada pada tabel 4.4, diketahui bahwa sebagian besar responden menganggap cara kerja penyalur dana program PEMP belum baik atau belum maksimal.

Berdasarkan jawaban responden, dapat diketahui bahwa pihak penyalur dana program PEMP yakni Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera dianggap belum baik oleh masyarakat sasaran. Sebagian besar responden menyatakan mereka tidak mengetahui sumber dana yang digulirkan tersebut termasuk nama program yang akan dijalankan. Beberapa kelompok penerima program bahkan tidak tahu dana yang mereka terima merupakan dana program PEMP dari DKP Kabupaten Wakatobi. Kelompok penerima program mengira dana yang mereka terima merupakan dana milik Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera.

Indikasi belum baiknya penyaluran dana program PEMP oleh Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera memberikan suatu gambaran bahwa penyalur dana program PEMP tidak melakukan inisiasi program dengan baik, yaitu secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas. Persepsi masyarakat tentang penyalur dana program PEMP umumnya disampaikan dalam tanggapan kekecewaan.

Beberapa responden yang menyampaikan persepsi kekecewaannya antara lain Resta, Nurmin, Ratno, dan Rasna. Berikut ini merupakan petikan persepsi sebagian besar responden yang menganggap tidak baik pelaksana penyalur dana program PEMP yang diwakili empat responden.

“Kecewa karena kelihatannya yang diutamakan keluarga pendamping saja.”
(Persepsi Resta, Wangi-Wangi, Maret 2008)

“Kesannya, pengelola hanya menekankan persyaratan administratif, ditandai dengan dadakannya kelompok-kelompok yang dibentuk.”
(Persepsi Nurmin, Wangi-Wangi, Maret 2008)

“Saya kecewa, kelihatannya yang diutamakan adalah kelompok dari kalangan keluarga pengelola dana saja.”
(Persepsi Ratno, Wangi-Wangi, Maret 2008)

“Kecewa karena kelihatannya yang dilayani duluan adalah kelompok yang dekat dengan pengelola.”
(Persepsi Rasna, Wangi-Wangi, Maret 2008)

Keempat persepsi di atas merupakan persepsi responden dari 57% responden yang menyatakan kinerja penyalur dana program PEMP dalam hal ini Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera belum baik. Persepsi kekecewaan responden misalnya diungkapkan oleh Resta yang menilai penyalur dana program PEMP terkesan pilih kasih dalam menyalurkan dana program PEMP. Penyalur dana mengutamakan keluarga pendamping (TPD) daripada menyalurkan dana secara adil. Persepsi kekecewaan lainya juga diungkapkan oleh Nurmin yang menyatakan pengelola (Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera) hanya menekankan persyaratan administratif. Menurut Nurmin, penyalur dana program PEMP membentuk kelompok-kelompok penerima dana program PEMP secara dadakan. Pembentukan kelompok secara dadakan tersebut merupakan upaya pihak penyalur dana program PEMP untuk hanya memenuhi persyaratan administratif saja.

Selain Resta dan Numin, dua responden lainnya, yakni Ratno dan Rasna mengungkapkan persepsi kekecewaan yang sama. Masalah utama kekecewaan para responden terhadap cara kerja penyalur dana program PEMP yakni tindakan Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera yang cenderung mengutamakan keluarga pengelola

sebagai penerima dana program PEMP Kabupaten Wakatobi. Ratno dan Rasna menyatakan kelompok yang diutamakan dalam pelayanan dana adalah kelompok yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan pihak pengelola program.

c. Persepsi masyarakat terhadap kelompok sasaran (*target group*)

Keberadaan kelompok sasaran ikut menentukan kesuksesan dana program PEMP Kabupaten Wakatobi karena dalam kelompok itulah dana program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini diterima, dimanfaatkan, dan akan dikembalikan. Ketepatan dalam menentukan kelompok penerima bantuan ini pada hakekatnya adalah untuk ikut menentukan ketepatan arah program PEMP. Lebih jelas tentang persepsi masyarakat terhadap kelompok sasaran (*target group*) dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini.

Tabel 4.5 Persepsi Masyarakat terhadap Kelompok Sasaran (*Target Group*)

No.	Persepsi Responden	Kecamatan				Jumlah Total	
		Wang-Wangi		Wang-Wangi Selatan			
		Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Baik	15	30	18	36	33	33
2.	Tidak Baik	35	70	32	64	67	67
	Jumlah	50	100	50	100	100	100

Sumber: Data Hasil Olahan, 2008

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dikemukakan bahwa sejumlah 33% responden menjawab menerima dengan baik kelompok sasaran (*target group*)

“Tidak senang, karena ada kelompok yang dibantu tidak ikut sosialisasi sama sekali.”

(Persepsi Nurlia, Wangi-Wangi, Maret 2008)

Persepsi Maniu, La Jama, Saleh, dan Nurlia di atas memperlihatkan persepsi kekecewaan terhadap kelompok-kelompok penerima dana program PEMP. Keempat persepsi tersebut hanyalah sebagian kecil dari banyak persepsi kekecewaan responden yang lain yang pada intinya mengungkapkan kekecewaan terhadap banyaknya kelompok-kelompok dadakan. Kelompok-kelompok dadakan hanya berlomba untuk memperoleh bantuan dana. Kelompok jenis ini tidak memiliki program kerja yang jelas. Pemahamannya terhadap program PEMP juga sangat minim karena beberapa kelompok yang memperoleh dana program tidak mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan pihak pengelola.

d. Persepsi masyarakat terhadap sasaran kegiatan/usaha program PEMP

Dana program PEMP Kabupaten Wakatobi ini diberikan kepada para nelayan untuk menjalankan usaha-usaha yang memiliki keterkaitan dengan segala aktivitas nelayan. Usaha-usaha yang dapat digeluti para nelayan penerima program, yakni:

- 1) Penguatan Modal (nelayan).
- 2) Kedai Pesisir.
- 3) *Solar Packed Dealer* untuk Nelayan (SPDN)/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Nelayan (SPBN).

Ketiga jenis usaha di atas memiliki hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya dalam menunjang kebutuhan nelayan. Ketiga jenis usaha tersebut berbeda-beda tetapi merupakan satu kesatuan atau kesinambungan usaha yang dapat dilakukan nelayan penerima program. Dana penguatan modal nelayan penerima program diarahkan untuk membiayai para nelayan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan kenelayanannya, baik peralatan teknis penangkapan ikan maupun kebutuhan teknis pemasarannya. Dana Kedai Pesisir pada hakekatnya diperuntukan bagi usaha-usaha yang menunjang logistik nelayan, misalnya kebutuhan makanan maupun penyediaan fasilitas yang dibutuhkan untuk penangkapan ikan. Sedangkan *Solar Packed Dealer* untuk Nelayan (SPDN)/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Nelayan (SPBN) merupakan usaha yang diharapkan dapat menunjang keperluan bahan bakar para nelayan yang menggunakan perahu-perahu bermesin. Dengan demikian, ketiga jenis peruntukan dana program PEMP Kabupaten Wakatobi tersebut bertujuan memenuhi semua kebutuhan para nelayan.

Salah satu yang ingin diketahui dalam penelitian ini yakni apakah dana program PEMP digunakan sesuai dengan usaha-usaha yang dapat mendukung kegiatan nelayan. Jawaban responden mengenai penggunaan dana PEMP merupakan persepsi responden seperti yang tampak pada tabel 4.6 berikut ini.

Tabel 4.6 Persepsi Masyarakat tentang Sasaran Kegiatan/Usaha Program PEMP

No.	Persepsi Responden	Kecamatan				Jumlah Total	
		Wangi-Wangi		Wangi-Wangi Selatan			
		Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Baik	23	46	24	48	47	47
2.	Tidak Baik	27	54	26	52	53	53
	Jumlah	50	100	50	100	100	100

Sumber: Data Hasil Olahan, 2008.

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa sejumlah 47% responden menerima baik sasaran kegiatan/usaha dari dana program PEMP. Sebaliknya, sejumlah 53% responden justru menyatakan tidak menerima baik sasaran kegiatan/usaha dari dana program PEMP. Dari hasil persentasi pada tabel 4.6 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar responden yakni 53% menyatakan sasaran kegiatan/usaha yang digeluti masyarakat penerima program masih belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Indikasi tidak menerima baik di sini diartikan sebagai suatu pemahaman responden tentang alasan pengelola dana program PEMP yang memberikan banyak pinjaman dana program PEMP justru ke usaha-usaha lain yang tidak mengutamakan kebutuhan nelayan. Usaha-usaha lain tersebut yakni jual-beli sembako atau membuka kios-kios yang sama sekali tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan nelayan. Situasi ini menjadi bertolak belakang

dengan masih banyaknya nelayan yang membutuhkan dana untuk keperluan pengembangan usaha-usaha nelayan.

Pemilihan jenis kegiatan/usaha yang kurang mendukung kegiatan nelayan merupakan penyalahgunaan dari dana program PEMP yang dapat berakibat pada gagalnya tujuan meningkatkan kesejahteraan dan daya saing nelayan Kabupaten Wakatobi. Namun demikian, penyimpangan atau kekeliruan penetapan kegiatan/usaha yang digeluti penerima program seolah dibiarkan oleh pihak pengelola program. Beberapa nelayan penerima program yang tidak setuju dengan jenis usaha yang digeluti sebagian penerima program menyampaikan kekecewaannya sebagai berikut.

“Ternyata bantuan ini, sama dengan bantuan sebelumnya, tidak diperhatikan jenis usaha kelompok yang dijalani.”

(Persepsi Haenuddin, Wangi-Wangi, Maret 2008)

“Saya sedikit kecewa, pas mau cari minyak ternyata agak jauh yang jual bukan teman-teman yang dapat bantuan kemarin.”

(Persepsi Ahalani, Wangi-Wangi, Maret 2008)

“Saya heran, kenyataan di lapangan tidak diarahkan sesuai petunjuk mengenai jenis usaha kelompok yang sesuai.”

(Persepsi Huraeda, Wangi-Wangi, Maret 2008)

“Ternyata jenis usaha kelompok yang lain hanya dibuat-buat saja, paling banyak dengan alasan untuk modal usaha nelayan, tapi banyak yang pinjam hanya jualan kue saja.”

(Persepsi La Poa, Wangi-Wangi, Maret 2008)

“Saya pada akhirnya kurang tertarik dengan bantuan ini, semua teman-teman menggunakannya untuk jenis usaha yang sama.”

(Persepsi Aswahid, Wangi-Wangi, Maret 2008)

“Terus terang pengelolanya kurang tegas, buktinya jenis usaha kelompok saya kurang sesuai, tapi kan dibantu juga.”

(Persepsi Nurlia, Wangi-Wangi, Maret 2008)

Keenam tanggapan di atas merupakan persepsi masyarakat terhadap jenis usaha/kegiatan yang digeluti para penerima dana program PEMP. Responden yang memberi tanggapan di atas menyadari bahwa pihak pengelola bersama-sama dengan nelayan telah menetapkan jenis usaha yang akan digeluti para penerima dana program PEMP. Akan tetapi, baik penerima dana maupun pengelola program, kurang konsisten memegang teguh kesepakatan yang telah disepakati secara bersama.

Komentar ketidaksetujuan responden terhadap usaha yang digeluti para penerima dana program PEMP diungkapkan oleh banyak responden. Haenudin misalnya, nelayan penerima program ini mengungkapkan kekecewaannya dengan menyatakan bahwa penerima bantuan dan pengelola tidak memperhatikan jenis usaha yang utama untuk digeluti nelayan penerima dana program PEMP. Haenuddin menyadari bahwa jenis usaha yang akan dilakukan para penerima program adalah usaha yang mendukung kegiatan penangkapan ikan, bukan kegiatan lain yang tidak berhubungan langsung dengan usaha penangkapan ikan.

Salah seorang nelayan bernama Ahalani mengungkapkan kekesalannya terhadap ketidakefektifan penggunaan dana bantuan usaha nelayan. Ahalani mengungkapkan peristiwa yang pernah dialaminya yakni ketiadaan bahan bakar minyak (BBM) untuk mengisi tangki minyak perahu yang akan dipakainya melaut. BBM yang diperolehnya berasal dari daerah atau warga yang tidak menerima dana program PEMP untuk usaha nelayan. Ahalani mengatakan, nelayan penerima dana PEMP tidak ada yang memilih usaha menjual BBM.

Persepsi yang menyiratkan kekecewaan juga diungkapkan oleh nelayan lainnya. Huraeda mengungkapkan keheranannya melihat jenis usaha di masyarakat yang tidak sesuai dengan petunjuk penggunaan dana jenis usaha PEMP yang tidak sesuai lagi dengan petunjuk yang telah disepakati. Nelayan lain, yakni La Poa mengatakan beberapa kelompok penerima dana PEMP merekayasa jenis usaha yang akan mereka buat. Masih menurut La Poa, penerima dana PEMP 'nakal' menggunakan dana pinjaman dari program PEMP hanya untuk menjual kue, bukan membuat Kedai Pesisir atau menjual BBM bagi para nelayan. Aswahid, nelayan lainnya menjadi kurang simpatik terhadap program bantuan PEMP karena sebagian besar penerima dana PEMP menggunakan pinjaman untuk jenis usaha yang sama sesama nelayan. Penyebab ketidakcocokan pengelolaan dana pinjaman untuk jenis usaha nelayan tersebut diungkapkan oleh Nurlia yang mengatakan pengelola dana pinjaman kurang memiliki ketegasan dalam menilai dan mengawasi jenis usaha yang telah disepakati. Nurlia mengatakan walaupun jenis usaha tidak sesuai dengan jenis usaha yang telah ditetapkan pengelola, tetapi kelompok tetap diberi dana oleh pengelola dana program PEMP.

e. Persepsi masyarakat terhadap jaminan pinjaman program PEMP

Jaminan pinjaman merupakan salah satu syarat utama yang wajib dipenuhi oleh para kelompok penerima dana program PEMP Kabupaten Wakatobi. Semua kelompok yang menjadi penerima dana program PEMP perlu menyiapkan barang/benda jaminan. Ketiadaan jaminan pinjaman bisa menyebabkan suatu kelompok sasaran penerima program tidak akan

memperoleh pinjaman dana program PEMP. Tujuan kewajiban menyediakan jaminan pinjaman yakni agar kelompok sasaran penerima dana program PEMP berhati-hati atau serius dalam menggunakan dana program PEMP. Jika kelompok sasaran penerima dana program PEMP tidak memberikan jaminan, maka dikhawatirkan dana program PEMP berpeluang disalahgunakan untuk tujuan atau kepentingan-kepentingan lain yang tidak sesuai dengan kegiatan yang mendukung usaha-usaha nelayan.

Besaran pinjaman dana program PEMP sangat ditentukan oleh besaran jaminan yang diberikan kelompok sasaran. Semakin besar jaminan yang diberikan kelompok sasaran kepada pengelola program (Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera), maka akan semakin besar pula dana yang dapat diterima oleh kelompok penjamin tersebut. Begitu pula halnya, semakin besar volume pekerjaan yang akan dilakukan, maka akan semakin besar dana yang akan diterima yang disesuaikan dengan volume jaminan dari kelompok penerima program.

Adapun jenis pinjaman bervariasi pula mulai dari barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak dengan nilai sesuai estimasi besarnya nilai rupiah dari jaminan pinjaman tersebut. Barang bergerak yang dapat dijaminkan misalnya kendaraan bermotor (sepeda motor) dan kapal, sedangkan barang yang tak bergerak yang dapat dijaminkan misalnya sertifikat tanah, emas, atau barang berharga lainnya.

Peraturan yang ditetapkan oleh pihak pengelola dana program PEMP mengenai besaran jaminan pinjaman mendapat tanggapan yang beragam dari

responden penelitian. Tanggapan atau persepsi masyarakat penerima program terhadap jaminan pinjaman dana program PEMP dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini.

Tabel 4.7 Persepsi Masyarakat tentang Jaminan Pinjaman

No.	Persepsi Responden	Kecamatan				Jumlah Total	
		Wangi-Wangi		Wangi-Wangi Selatan			
		Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Baik	16	32	23	46	39	39
2.	Tidak Baik	34	68	27	54	61	61
	Jumlah	50	100	50	100	100	100

Sumber: Hasil Data Olahan, 2008.

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa sejumlah 39% responden menjawab menerima baik jaminan pinjaman dana program PEMP, dan sejumlah 61% responden menyatakan tidak menerima baik dengan besaran jaminan pinjaman tersebut. Alasan tidak diterimanya jaminan pinjaman tersebut adalah bagi masyarakat menganggap tinggi atau dirasa memberatkan masyarakat (kelompok) yang menerima pinjaman dana program PEMP tersebut.

f. Persepsi masyarakat terhadap pertimbangan prioritas dalam pengucuran dana program PEMP

Berdasarkan peruntukannya, dana program PEMP Kabupaten Wakatobi diberikan kepada 3 (tiga) jenis kegiatan/usaha yang berhubungan dengan

aktivitas masyarakat pesisir, khususnya kebutuhan nelayan, yakni untuk penguatan modal nelayan, Kedai Pesisir, dan *Solar Packed Dealer* untuk Nelayan (SPDN)/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Nelayan (SPBN). Selain untuk ketiga kategori jenis usaha/kegiatan di atas, tentu saja pertimbangan yang harus dikedepankan adalah kondisi obyektifnya di lapangan. Pertimbangan yang dimaksudkan yakni alasan keberlanjutan usaha, dari sudut pengembangan usaha atas dasar potensi sumberdaya alam, dan pemasarannya.

Persepsi masyarakat terhadap pertimbangan prioritas dalam pengucuran dana program PEMP Kabupaten Wakatobi dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut.

Tabel 4.8 Persepsi Masyarakat terhadap Pertimbangan Prioritas dalam Pengucuran Dana Program PEMP

No.	Persepsi Responden	Kecamatan				Jumlah Total	
		Wangi-Wangi		Wangi-Wangi Selatan			
		Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Baik	24	48	23	46	47	47
2.	Tidak Baik	26	52	27	54	53	53
	Jumlah	50	100	50	100	100	100

Sumber: Data Hasil Olahan, 2008.

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa sejumlah 47% responden menjawab mereka menerima baik atas pertimbangan penentuan prioritas kelompok usaha/kegiatan penerima dana program PEMP. Sebaliknya, sejumlah 53% responden lainnya menyatakan tidak menerima baik pertimbangan penentuan prioritas kelompok usaha/kegiatan penerima dana program PEMP. Hasil

persentase pada tabel 4.8 memperlihatkan temuan yakni sebagian besar responden tidak menerima baik pertimbangan-pertimbangan pengelola program dalam menentukan prioritas penerima dana program PEMP yang diterapkan pengelola program.

Ketidakterimaan responden terhadap pertimbangan dalam menentukan prioritas penerima dana program PEMP tersebut adalah adanya indikasi penyaluran dana program PEMP menggunakan pendekatan kekeluargaan atau kedekatan pertemanan. Menurut sebagian besar responden, pengelola dana program PEMP tidak adil atau subjektif dalam mengucurkan dana program PEMP. Penyaluran dana program PEMP tidak didasarkan pada siapa yang lebih berprioritas menerima dan membutuhkan dana. Pengelola tidak atau kurang melihat aspek pertimbangan prioritas sesuai dengan juknis persyaratan penerima dana program PEMP.

Responden menilai pengelola dana bersikap subjektif dalam memutuskan kelompok yang akan menerima dana program PEMP. Pengelola dana program PEMP mengutamakan kelompok penerima program yang memiliki hubungan keluarga dengan pengelola dan hubungan pertemanan (kedekatan). Pertimbangan-pertimbangan prioritas yang seharusnya menjadi pegangan utama dalam menentukan kelompok yang berharap menerima dana tidak dirujuk oleh pengelola dana program PEMP. Akibatnya, muncul kecemburuan-kecemburuan di kalangan kelompok penerima program ataupun masyarakat lainnya.

kecemburuan-kecemburuan di kalangan kelompok penerima program ataupun masyarakat lainnya.

Sikap pengelola program yang tidak atau kurang mencermati unsur pertimbangan-pertimbangan prioritas saat mengucurkan dana program PEMP menimbulkan persepsi negatif dari kelompok sasaran penerima dana program PEMP. Responden yang tidak menerima atau tidak menganggap baik cara kerja pengelola dana program PEMP dalam mengucurkan dana mengungkapkan persepsinya seperti berikut ini.

“Agak kecewa ternyata yang dibantu termasuk kelompok yang baru saja dibentuk.”

(Persepsi Caong, Wangi-Wangi, Maret 2008)

“Kecewa karena dari kalangan kerabat pengelola dana saja yang kelihatannya diutamakan.”

(Persepsi Supiati, Wangi-Wangi, Maret 2008)

“Heran karena kita yang ikut sosialisasinya tidak didahulukan untuk mendapatkan dana bantuan.”

(Persepsi Jamil, Wangi-Wangi, Maret 2008)

“Saya heran, kita yang ikut sosialisasi tidak didahulukan pembentukan kelompoknya.”

(Persepsi Durahman, Wangi-Wangi, Maret 2008)

Persepsi Caong, Supiati, Jamil, ataupun Durahman di atas menandakan bahwa pihak pengelola dan program PEMP (Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera) tidak atau kurang mempertimbangkan aspek-aspek prioritas dalam mengucurkan dana kepada kelompok sasaran program. Pengelola program hanya mengutamakan persyaratan administrasi, yakni pembentukan kelompok. Ketidakkonsistenan pengelola program untuk mengedepankan pertimbangan-

pertimbangan prioritas tampak juga pada ketidakpedulian pengelola program untuk melakukan pengawasan pada bidang usaha yang dipilih oleh kelompok penerima program. Misalnya saja, tidak ada kelompok penerima dana program PEMP yang membuka bidang usaha pada jual-beli BBM.

g. Persepsi masyarakat terhadap monitoring dan evaluasi perkembangan dana usaha program PEMP

Monitoring dan evaluasi merupakan tahapan penting dalam rangka memastikan ketercapaian program yang dijalankan. Monitoring dilakukan pada saat kegiatan sementara berjalan, sedangkan evaluasi dilakukan setelah tahapan kegiatan selesai. Monitoring dan evaluasi akan menghasilkan rekomendasi perbaikan terhadap kinerja program. Adapun untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap monitoring dan evaluasi perkembangan usaha program PEMP dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini.

Tabel 4.9 Persepsi Masyarakat terhadap Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Dana Usaha Program PEMP

No.	Persepsi Responden	Kecamatan				Jumlah Total	
		Wangi-Wangi		Wangi-Wangi Selatan			
		Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Baik	24	48	25	50	49	49
2.	Tidak Baik	26	52	25	50	51	51
	Jumlah	50	100	50	100	100	100

Sumber: Data Hasil Olahan, 2008.

Sesuai dengan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa sejumlah 49 responden (49%) menjawab menerima baik proses monitoring dan evaluasi penyaluran dana program PEMP, sedangkan 51 responden atau 51% menjawab menerima baik proses monitoring dan evaluasi penyaluran dana program PEMP. Menurut beberapa responden, monitoring dan evaluasi tidak pernah dilakukan, hanya dilakukan pada awal-awal program saja. Pemanfaatan dana program PEMP dilakukan tanpa arahan yang jelas.

“Terus terang pengelolanya kurang tegas, buktinya jenis usaha kelompok saya kurang sesuai, tapi kan dibantu juga.”
(Persepsi Nurlia, Wangi-Wangi, Maret 2008)

“Saya heran, kenyataan di lapangan tidak diarahkan sesuai petunjuk mengenai jenis usaha kelompok yang sesuai.”
(Persepsi Huraeda, Wangi-Wangi, Maret 2008)

“Ternyata jenis usaha kelompok yang lain hanya dibuat-buat saja, paling banyak dengan alasan untuk modal usaha nelayan, tapi banyak yang pinjam hanya jualan kue saja.”
(Persepsi La Poa, Wangi-Wangi, Maret 2008)

“Saya sedikit kecewa, pas mau cari minyak ternyata agak jauh yang jual bukan teman-teman yang dapat bantuan kemarin.”
(Persepsi Ahalani, Wangi-Wangi, Maret 2008)

“Saya pada akhirnya kurang tertarik dengan bantuan ini, semua teman-teman menggunakannya untuk jenis usaha yang sama.”
(Persepsi Aswahid, Wangi-Wangi, Maret 2008)

Tanggapan di atas merupakan empat tanggapan dari 51% responden yang menyatakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan pihak pengelola program PEMP tidak maksimal. Tanggapan-tanggapan di atas memperlihatkan lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap jenis usaha penerima dana yang

kurang sesuai dengan usaha yang mendukung kegiatan perikanan nelayan. La Poa, salah seorang nelayan penerima dana program PEMP mengatakan dana yang diterima nelayan dari pengelola program hanya dipakai untuk jualan kue-kue. Nelayan lainnya, Ahalani, mengungkapkan dirinya kesulitan mencari BBM di sekitar rumahnya. Ahalani memperoleh BBM justru berada jauh dari sekitar rumahnya, padahal, dana program PEMP seharusnya digunakan untuk membuka jenis usaha yang terkait langsung dengan kebutuhan nelayan.

Keterangan yang diungkapkan oleh Nurlia, Huraeda, La Poa, Ahalani, dan Aswahid semakin menegaskan lemahnya monitoring dan evaluasi yang seharusnya dilakukan oleh pihak pengelola dana program PEMP kepada nelayan penerima dana program. Lemahnya monitoring dan evaluasi tersebut seolah memberi peluang kepada nelayan untuk menyalahgunakan dana yang mereka terima. Buktinya, nelayan penerima dana program PEMP menggunakan dana tersebut untuk menjual kue-kue, dan nelayan tetap kesulitan mendapatkan BBM.

Hasil penelitian yang tertera pada tujuh tabel di atas selanjutnya dipersentase untuk mengetahui kecenderungan persepsi masyarakat atas pertanyaan (masalah) penelitian pertama.

Tabel 4.10 Persentase Rata-Rata Keseluruhan Indikator Masalah Penelitian 1 (Persepsi Masyarakat terhadap Mekanisme Penyaluran Dana Program PEMP)

No.	Persepsi Responden	Jumlah Persentase (%) Atas Tujuh (7) Pertanyaan yang Diajukan kepada Responden	Persentase Rata-Rata
1.	Baik	285/7	40,71
2.	Tidak Baik	411/7	59,29

Sumber: Data Hasil Olahan, 2008.

Tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden (59,29%) menyatakan mekanisme penyaluran dana program PEMP tidak (kurang) berjalan dengan baik. Hanya 40,71% responden yang menyatakan mekanisme penyaluran dana program PEMP telah berjalan dengan baik. Ketidakmaksimalan mekanisme penyaluran dana program PEMP terjadi pada:

- 1) tahapan-tahapan penyaluran dana (sejumlah 73% responden);
- 2) pelaksana penyalur dana (sejumlah 57% responden);
- 3) penetapan kelompok sasaran (sejumlah 67% responden);
- 4) penentuan sasaran kegiatan/usaha (sejumlah 53% responden);
- 5) jaminan pinjaman (sejumlah 61% responden); dan
- 6) pertimbangan prioritas dalam pengucuran dana program PEMP (sejumlah 53% responden).
- 7) dan monitoring dan evaluasi perkembangan dana usaha program PEMP (51%).

2. Persepsi Masyarakat terhadap Beban Pengembalian Dana yang Dirasakan Masyarakat Nelayan

Beban pengembalian merupakan hal yang dianggap penting dalam persoalan penyaluran dana program PEMP Kabupaten Wakatobi karena masyarakat mempunyai ketergantungan terhadap beberapa poin. Di antaranya, mengenai besaran modal pinjaman, bunga pinjaman, sistem pengembalian, dan jangka waktu pengembalian (jatuh tempo).

a. Persepsi masyarakat terhadap besaran modal pinjaman program PEMP

Besaran modal pinjaman memengaruhi kemampuan masyarakat untuk mengembangkan usaha yang dimiliki kelompok-kelompok usaha. Semakin besar modal pinjaman yang dimiliki akan berpeluang untuk mengembangkan usaha yang lebih besar. Sebaliknya semakin kecil modal pinjaman yang dimiliki maka semakin kecil juga peluang untuk mengembangkan usaha yang dimiliki. Persepsi masyarakat terhadap besaran modal pinjaman yang diberikan dari dana program PEMP Kabupaten Wakatobi dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut ini.

Tabel 4.11 Persepsi Masyarakat tentang Besaran Modal Pinjaman Dana Program PEMP

No.	Persepsi Responden	Kecamatan				Jumlah Total	
		Wangi-Wangi		Wangi-Wangi Selatan			
		Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Baik	24	48	23	46	47	47
2.	Tidak baik	26	52	27	54	53	53
	Jumlah	50	100	50	100	100	100

Sumber: Data Hasil Olahan, 2008.

Tabel 4.11 di atas dapat dikemukakan bahwa dari keseluruhan responden, 47% responden di antaranya menjawab bahwa mereka menerima baik besaran modal pinjaman dana program PEMP, dan 53% responden menjawab tidak menerima baik besaran modal pinjaman dana PEMP. Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat responden penerima program PEMP mengakui bahwa besaran modal yang mereka terima dianggap belum

terlalu memadai untuk mengembangkan usahanya, responden berharap dana tersebut masih bisa ditambahkan lagi.

b. Persepsi masyarakat terhadap bunga pinjaman program PEMP

Bunga pinjaman dijadikan sebagai salah satu syarat dalam penyaluran dana PEMP Kabupaten Wakatobi, bunga pinjaman diharapkan dapat menjadi pemicu terhadap meningkatnya kinerja kelompok-kelompok usaha. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap bunga pinjaman dalam pengembalian dana program PEMP dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut ini.

Tabel 4.12 Persepsi Masyarakat terhadap Bunga Pinjaman

No.	Persepsi Responden	Kecamatan				Jumlah Total	
		Wangi-Wangi		Wangi-Wangi Selatar			
		Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Baik	22	44	24	48	46	46
2.	Tidak baik	28	56	26	52	54	54
	Jumlah	50	100	50	100	100	100

Sumber: Data Hasil Olahan, 2008.

Berdasarkan tabel 4.12 dapat dikemukakan bahwa hanya 43% responden menyatakan masyarakat menerima baik bunga pinjaman yang ditetapkan. Namun, sebanyak 54% responden yang tidak menerima baik besarnya bunga pinjaman dana PEMP. Indikasi menerima baiknya masyarakat dalam penelitian ini adalah bahwa masyarakat merasa sudah mendapatkan

keringanan dibandingkan dengan bila mereka masih meminjam dana di bank-bank. Masyarakat belum menerima baik besarnya bunga pinjaman, karena pada dasarnya masyarakat masih merasa memberatkan dan berharap tidak ada pembebanan lagi berupa kewajiban membayar bunga dalam pengembalian dana program PEMP.

c. Persepsi masyarakat terhadap sistem pengembalian dana program PEMP

Sistem pengembalian dana program PEMP Kabupaten Wakatobi dilakukan melalui penagihan yang dilakukan oleh Pihak Koperasi Nelayan Wakatobi Sejahtera. Sistem penagihan tersebut melalui kelompok-kelompok penerima dana program PEMP. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap sistem pengembalian dana program PEMP dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut ini.

Tabel 4.13 Persepsi tentang Sistem Pengembalian Dana Program PEMP

No.	Persepsi Responden	Kecamatan				Jumlah Total	
		Wangi-Wangi Selatan		Wangi-Wangi			
		Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Baik	27	54	26	52	53	53
2.	Tidak baik	23	46	24	48	47	47
	Jumlah	50	100	50	100	100	100

Sumber: Data Hasil Olahan, 2008.

Tabel 4.13 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden, yaitu 53% responden menyatakan bahwa mereka menerima baik atas penerapan sistem

pengembalian dana program PEMP. Sejumlah 47% responden lainnya menyatakan tidak menerima baik. Indikasi kepuasan di sini disebabkan adanya mekanisme yang terbangun dalam anggota kelompok-kelompok tersebut, bilamana ada penunggakan maka itu adalah penunggakan pribadi, walaupun secara administrasi pengambilan dana program PEMP dilakukan atas nama kelompok, namun dalam kenyataannya dikembalikan atas nama pribadi.

d. Persepsi masyarakat terhadap jangka waktu pengembalian (jatuh tempo)

Jangka waktu pengembalian dana pinjaman merupakan masa tenggat yang diberikan oleh pihak pengelola (Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera) untuk mengembalikan dana pinjaman. Persepsi masyarakat terhadap jangka waktu pengembalian (jatuh tempo) dana program PEMP Kabupaten Wakatobi dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut ini.

Tabel 4.14 Persepsi tentang Jangka Waktu Pengembalian (Jatuh Tempo)

No.	Persepsi Responden	Kecamatan				Jumlah Total	
		Wangi-Wangi		Wangi-Wangi Selatan			
		Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Baik	23	46	24	48	24	48
2.	Tidak baik	27	54	26	52	26	52
	Jumlah	50	100	50	100	100	100

Sumber: Data Hasil Olahan, 2008.

Berdasarkan tabel 4.14 di atas dikemukakan bahwa sejumlah 48% responden menjawab mereka menerima baik atau tidak mempersoalkan jangka

waktu pengembalian dana pinjaman dari program PEMP. Responden yang berjumlah 48% tersebut menilai aturan yang ditetapkan oleh pihak pengelola dapat dilaksanakan dengan baik oleh nelayan penerima program. Sebaliknya, sejumlah 52% responden yang mengaku tidak menerima kebijakan jangka waktu pengembalian (jatuh tempo). Artinya, mereka merasa jangka waktu atau masa tenggat yang ditetapkan oleh pengelola dana program PEMP perlu diperjang lagi. Nelayan penerima dana program PEMP menghendaki agar masa tenggat (jatuh tempo) dapat diperpanjang sehingga mereka dapat bekerja dengan tenang dan dapat membagi penghasilan dengan biaya kebutuhan sehari-hari.

Ketidakterimaan nelayan penerima program PEMP yakni 52% responden, terhadap jangka waktu pengembalian tersebut beralasan jangka waktu pengembalian dana program PEMP terlalu cepat. Masyarakat masih memerlukan tambahan waktu untuk pengembalian dana pinjaman karena usaha penangkapan ikan tidak memberi keuntungan pada setiap harinya. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, sebagian besar responden menolak atau kurang menyetujui penetapan jangka waktu pengembalian dana pinjaman. Hal tersebut berarti sebagian besar responden meminta kepada pengelola untuk mempertimbangkan kembali penetapan jangka waktu pengembalian dana program PEMP.

Dari keseluruhan pertanyaan yang diajukan untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang beban pengembalian dana program PEMP dapat diketahui bahwa sebagian besar nelayan penerima dana program PEMP beranggapan kebijakan pengelola belum memuaskan nelayan penerima dana program PEMP.

Secara umum, persepsi masyarakat atas pertanyaan yang diajukan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dari keseluruhan indikator yang digunakan dapat dilihat pada tabel 4.15 berikut.

Tabel 4.15 Persentase Rata-Rata Keseluruhan Indikator Masalah Penelitian 2 (Persepsi Masyarakat terhadap Beban Pengembalian Dana yang Dirasakan Masyarakat Nelayan)

No.	Persepsi Responden	Jumlah Persentase (%) Atas Empat (4) Pertanyaan yang Diajukan kepada Responden	Persentase Rata-Rata
1.	Baik	194/4	48,5
2.	Tidak Baik	206/4	51,5

Sumber: Data Hasil Olahan, 2008.

Tabel 4.15 di atas merupakan akumulasi empat persepsi penerima dana program PEMP. Berdasarkan tabel 4.15 tersebut diketahui bahwa tingkat penerimaan masyarakat (menganggap baik) kebijakan pengembalian dana program PEMP mencapai 44% responden, sedangkan ketidakterimaan masyarakat (tidak menganggap baik) berjumlah 56%. Dari kedua persentase ini, tampak secara jelas bahwa sebagian besar masyarakat menganggap kebijakan pengembalian dana pinjaman dari program PEMP membebani masyarakat peminjam. Kebijakan pengelola program yang menurut masyarakat masih belum tepat yakni pada kebijakan besaran modal pinjaman dana kepada nelayan, bunga pinjaman, dan jangka waktu (masa tenggat) pengembalian dana program PEMP. Kebijakan yang menurut sebagian besar masyarakat sudah maksimal

atau memuaskan masyarakat yakni sistem pengembalian dana pinjaman. Masyarakat beranggapan, kebijakan pengelola dana program PEMP telah merumuskan aturan yang baik dan tidak merugikan nelayan.

Masih tingginya kekurangan masyarakat terhadap kebijakan pengelola dana program PEMP yang disalurkan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi perlu mendapat perhatian yang serius dari pihak pengelola program. Kebijakan yang masih dirasa memberatkan masyarakat sebaiknya ditinjau ulang. Peninjauan ulang dan perbaikan sistem bertujuan memaksimalkan penerapan program yang pada akhirnya akan menghasilkan kesuksesan bersama, baik pemerintah maupun masyarakat.

3. Faktor yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat terhadap Implementasi PEMP di Kabupaten Wakatobi

a. Kemampuan sumberdaya manusia (SDM)

Kemampuan SDM mempunyai peran yang strategis dalam menentukan kinerja pelayanan. Kemampuan SDM yang baik akan memberikan manfaat luas bagi organisasi itu sendiri. Sebaliknya, kemampuan SDM yang rendah akan menghasilkan kinerja organisasi yang juga rendah. Kemampuan SDM terbentuk dan dipengaruhi oleh beberapa hal seperti tingkat pendidikan, pengalaman, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai daerah yang akan memengaruhi *performance* organisasi. Di samping itu disadari, kemampuan SDM terbentuk dari sejumlah kompetensi, baik pengetahuan, keterampilan, maupun faktor pembentuk kemampuan lainnya. Dengan demikian, apabila

seorang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang tinggi, diharapkan memiliki kapabilitas yang tinggi pula.

Ada dua entitas SDM yang memengaruhi implementasi program PEMP di Kabupaten Wakatobi. Pertama, SDM pengelola program dianggap masih belum maksimal dalam menjalankan program PEMP. Kedua, kualitas sumberdaya manusia kelompok sasaran (*target group*) masih rendah. Kedua entitas SDM tersebut, baik dari pengelola program maupun penerima program, memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan implementasi program PEMP di Kabupaten Wakatobi.

Pengelola dana program PEMP yang bertanggung jawab dalam kegiatan ini meliputi komponen penanggung jawab program di tingkat Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Wakatobi, yang terdiri atas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kelemahan SDM pengelola program pada tingkat atas terlihat pada minimnya monitoring dan evaluasi program atas kegiatan yang dijalankan oleh Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera. Begitu pula halnya dengan SDM pengurus Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera yang kurang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap nelayan kelompok sasaran.

Keberadaan Tim Pendamping Desa (TPD) yang diharapkan dapat melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi kepada kelompok-kelompok sasaran tidak berjalan dengan baik. TPD tidak efektif menjalankan tugas-tugasnya dalam mendampingi, memonitoring, dan mengevaluasi kegiatan yang dijalankan kelompok sasaran. Akibatnya, pelaksanaan program PEMP di

tingkat kelompok sasaran berjalan dengan tidak efektif. Selain itu, pemilihan jenis usaha dan pengelolaan keuangan kelompok sasaran menjadi tidak terarah dan tidak focus pada usaha-usaha yang mendukung kegiatan nelayan.

Awalnya, pihak DKP Kabupaten Wakatobi melakukan sejumlah kontrol atas kinerja pengelola teknis program PEMP, yakni Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera. *Performance* pengelola teknis pun cukup menjanjikan. *Performance* tersebut tampak dari sejumlah aktivitas yang dilakukan di kantor pengelola serta pendampingan dari TPD ke kelompok-kelompok sasaran.

Pendampingan kepada kelompok-kelompok sasaran oleh TPD mulai mengalami masalah dan hambatan pada saat implementasi program berjalan selama satu semester. Pada tingkat bawah (kelompok sasaran) masalah yang ditemukan pihak pengelola program, antara lain adanya kredit macet. Kredit macet adalah tersendatnya pengembalian dana pinjaman kelompok sasaran ke pihak Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera. Hambatan berupa kredit macet tersebut terjadi di kelompok-kelompok sasaran lainnya.

Masalah-masalah yang dialami kelompok-kelompok sasaran seharusnya menjadi kajian serius pihak pengelola program. DKP Kabupaten Wakatobi perlu menelaah penyebab timbulnya masalah yang dialami kelompok sasaran, misalnya kredit macet. Tujuannya, agar kelompok-kelompok sasaran tidak terlalu lama menendam masalah yang mereka alami. Kelompok-kelompok yang bermasalah perlu mendapat pendampingan dan bimbingan khusus terutama dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi. Dengan demikian, kelompok-

kelompok sasaran tidak menjadi larut dalam masalah yang justru akan semakin menyengsarakan nelayan penerima dana program PEMP.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi, dalam konteks ini, tampaknya mengalami determinasi kinerja. DKP Kabupaten Wakatobi tidak menempuh langkah-langkah yang bersifat kreatif dalam menangani dana program PEMP. Misalnya saja, pihak DKP Kabupaten Wakatobi dapat mencari dan menemukan solusi dalam menafsirkan program PEMP berdasarkan lokalitas permasalahan yang dihadapi oleh para nelayan penerima dana program.

Hasil wawancara dengan pimpinan proyek program PEMP Kabupaten Wakatobi diperoleh informasi yakni pengelola dana program PEMP kurang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) selama diangkat sebagai pimpinan pelaksana program PEMP. Kalaupun ada, pendidikan dan pelatihan yang diikuti lebih bersifat pembekalan umum, sedangkan untuk hal-hal yang bersifat teknis jarang diikutinya. Pimpinan proyek program PEMP Kabupaten Wakatobi menambahkan kondisi pengelola program PEMP yang semuanya masih baru dalam menangani program pemberdayaan memang menimbulkan berbagai kendala dalam upaya pencapaian keberhasilan program.

Kelemahan SDM pengelola program pada tingkat DKP Kabupaten Wakatobi diketahui dari tanggapan-tanggapan kelompok penerima program. Beberapa responden yang merupakan kelompok penerima program menyampaikan tanggapannya seperti berikut ini.

“Pihak DKP kurang memberikan solusi atas masalah yang kami hadapi.”
(Persepsi La Ode Mustara, Wangi-Wangi, Maret 2008)

“Kalau ada masalah di kelompok kami, pihak DKP hanya menyuruh kami untuk mengurusnya sendiri, tidak mau bantu-bantu berikan pemikiran.”
(Persepsi Ma’ruf, Wangi-Wangi, Maret 2008)

“Orang DKP hanya sok tahu, kalau kita bertanya mereka tidak jawab yang memuaskan.”
(Persepsi Samarudin, Wangi-Wangi, Maret 2008)

“Saya tidak tahu kapan orang Dinas Kelautan dan Perikanan datang dan apa fungsi mereka.”
(Persepsi Sega, Wangi-Wangi, Maret 2008)

Pengimplementasian dana program PEMP Kabupaten Wakatobi membutuhkan pengelola program yang berpengalaman dan berpengetahuan pada proyek-proyek pemberdayaan masyarakat. Pengelola program yang ditunjuk dan diangkat memiliki keterbatasan pengetahuan dan pengalaman sehingga sulit untuk mengharapkan keberhasilan program. Keterbatasan pengetahuan, pengalaman, pendidikan dan pelatihan yang dialami pengelola program sangat mengganggu pelaksanaan program PEMP. Akibatnya, kinerja yang mereka hasilkan masih jauh dari kondisi ideal. Menurut Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sejak ditunjuk menjadi pengendali program PEMP, KPA hanya dua kali mengikuti diklat dan konsultasi dalam waktu yang singkat. Akibatnya, tidak banyak memahami ilmu yang diberikan.

Rendahnya kemampuan pengelola program dalam mengimplementasikan program PEMP di Kabupaten Wakatobi cukup dirasakan oleh pejabat DKP Kabupaten Wakatobi, terutama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi selaku KPA yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program PEMP. Rendahnya kemampuan pegawai yang ditunjuk

sebagai pengelola program dalam mengimplementasikan program PEMP antara lain tercermin dari kemampuan dan pemahaman pengelola program PEMP.

Selain SDM yang lemah pada pengurus DKP Kabupaten Wakatobi, kelemahan SD lainnya terjadi pada Tenaga Pendamping Desa (TPD) yang dipilih dan diangkat oleh DKP Kabupaten Wakatobi. TPD program PEMP kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan dana pemberdayaan masyarakat. Kemampuan sumberdaya manusia TPD sangat rendah padahal sebagian besar kelompok sasaran yang didampingi berpendidikan relatif rendah dan lemah kemampuan jiwa kewirausahaannya. Oleh karena itu, kehadiran TPD ke tengah-tengah kelompok penerima program dalam memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi merupakan tugas yang perlu diemban TPD setiap saat.

Masalah yang dihadapi dalam internal TPD tersebut sama dengan yang dialami oleh pihak DKP Kabupaten Wakatobi yang minim pengetahuan dan pengalaman dalam menangani program-program pemberdayaan masyarakat. Kelemahan sumberdaya manusia TPD program PEMP Kabupaten Wakatobi diungkap oleh responden sebagai berikut ini.

“Tim Pendamping Desa pada saat awal program rajin datang, tapi setelah beberapa bulan kemudian tidak datang-datang lagi.”
(Persepsi La Jama, Wangi-Wangi, Maret 2008)

“Tim Pendamping Desa setahu saya akan mendampingi kami selama kegiatan ini jalan, tapi malas datang.”
(Persepsi Udiasi, Wangi-Wangi, Maret 2008)

“Saya heran Tim Pendamping Desa sudah malas datang sementara kita masih perlu bimbingan.”
(Persepsi Halida, Wangi-Wangi, Maret 2008)

Pengelola program yang bertugas menyalurkan dana program PEMP ke kelompok-kelompok sasaran adalah Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera. Tugas Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera tidak hanya menyalurkan dana program PEMP ke kelompok-kelompok nelayan tetapi juga melakukan penagihan kepada kelompok yang menunggak pembayaran. Pihak koperasi juga melakukan pengontrolan atas jenis usaha yang akan digeluti oleh kelompok penerima dana program PEMP. Hubungan yang terjalin intensif antara kelompok penerima dana program PEMP dengan pihak koperasi berpeluang pada suksesnya pengimplementasian program. Namun dalam kenyataannya, hubungan yang intensif tersebut hanya untuk membicarakan pengembalian dana program PEMP. Pihak koperasi tidak melakukan pengawasan atau pembinaan atas jenis usaha yang digeluti nelayan. Akibatnya, kebutuhan-kebutuhan pokok bagi nelayan kadang tidak tersedia dari jenis usaha yang dikembangkan penerima dana program PEMP.

Sikap Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera tersebut diperparah oleh tidak efektifnya proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh DKP Kabupaten Wakatobi. Akibatnya, jaringan komunikasi yang produktif antara DKP Kabupaten Wakatobi dengan Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera kurang terbangun dengan baik. Informasi yang asimetrik ini memicu tidak adanya penelusuran akar masalah kegagalan masyarakat (*community failure*), khususnya kelompok sasaran dalam memanfaatkan dana program PEMP.

Sikap koperasi yang tidak melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kelompok-kelompok penerima dana program PEMP juga diungkapkan oleh para responden penelitian. Petikan-petikan wawancara berikut ini merupakan persepsi responden tentang Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera.

“Pihak Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera kalau melakukan tagihan jangan terlalu ngotot.”
(Persepsi Ida, Wangi-Wangi, Maret 2008)

“Pihak Koperasi jangan pilih kasih.”
(Persepsi Marnia, Wangi-Wangi, Maret 2008)

“Seharusnya bantuannya bisa dinaikkan lagi jumlahnya.”
(Persepsi Junianto, Wangi-Wangi, Maret 2008)

“Kalau bisa melakukan penagihan pada saat yang tepat.”
(Persepsi Ratmi, Wangi-Wangi, Maret 2008)

Dari beberapa persepsi di atas dapat diketahui bahwa pihak Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera telah melakukan pengawasan berupa penagihan kepada nelayan penerima program. Hanya saja, menurut Ida, pihak koperasi dinilai terlalu memaksakan kehendak saat menagih pinjaman nelayan. Begitu pula halnya dengan permintaan Ratmi yang menyarankan kepada pihak koperasi untuk melakukan penagihan di saat-saat yang tepat. Maksudnya, pihak koperasi jangan melakukan penagihan ketika nelayan sedang membutuhkan keuangan yang besar untuk membiayai anak sekolah, hari raya Idul Fitri, dan kegiatan lain yang membutuhkan pengeluaran yang besar. Nelayan lain, yakni Marnia melihat ada sikap tidak adil yang diperlihatkan pihak koperasi. Menurut Marnia, pihak koperasi bersikap pilih kasih. Penerima program lainnya, yakni Junianto berharap agar bantuan program PEMP yang disalurkan melalui koperasi diperbesar jumlahnya.

Berdasarkan hasil tabulasi persepsi nelayan penerima dana program PEMP di atas, ditemukan penyebab kegagalan sepenuhnya bukan dari kelompok sasaran itu sendiri melainkan juga disebabkan oleh ketidaktuntasan peran-peran implementor dalam mentransfer entitas pengetahuan program PEMP untuk dipahami oleh kelompok sasaran.

Kendala di atas seharusnya dapat dihindari dengan kehadiran TPD yang dipercaya mampu mendampingi kelompok sasaran dan memberikan peran pendampingan yang efektif. Akan tetapi, dalam kenyataannya, TPD hanya berperan mengingatkan kelompok sasaran terhadap masalah persyaratan dan pengembalian dana pinjaman saja. TPD kurang berperan pada penguatan, pemotivasian, dan pemberdayaan kelompok sasaran. Tenaga TPD program PEMP Kabupaten Wakatobi tidak memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan pendampingan masyarakat.

Tim Pedamping Desa pada program PEMP Kabupaten Wakatobi hanya berperan sebagai fasilitator program dan bukan sebagai fasilitator masyarakat. Fasilitator program hanya memprioritaskan tuntutan programnya saja, yakni terpenuhinya hak dan kewajibannya secara formal belaka, sedangkan fasilitator masyarakat lebih menekankan pencapaian keberhasilan pada komunitas atau kelompok dampungannya dan mengabaikan determinasi program.

Selain kegagalan implementor, DKP Kabupaten Wakatobi, TPD, dan Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera, kegagalan yang paling menentukan adalah pada tingkat kelompok sasaran. Kenyataannya, kelompok sasaran tidak memiliki SDM yang memadai dalam mengelola dana program PEMP.

Kurangnya SDM kelompok sasaran disebabkan oleh faktor pendidikan dan pengalaman pada usaha yang dilakoninya masih rendah.

Berdasarkan kegagalan SDM di atas, ditekankan perlunya penguatan pada sejumlah SDM implementor, yakni:

- 1) Pihak DKP Kabupaten Wakatobi dapat memercayakan kepada pihak ketiga dalam mengelola dana program PEMP. Pihak DKP perlu menjalankan sejumlah fungsi pengawasan yang efektif pada setiap tahapan program. Selain itu, pihak DKP perlu meningkatkan pengetahuan dan kompetensi dalam mendiagnosis secara tepat alur program yang nantinya akan memudahkan titik masuk untuk melakukan intervensi. Salah satu sikap yang perlu ditempuh pihak DKP Kabupaten Wakatobi ialah menciptakan pertemuan reguler untuk melihat dan mengevaluasi sejumlah indikator pencapaian program yang jelas dan terukur sebagai perangkat evaluasi.
- 2) Pihak pengelola dana program PEMP (Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera) harus mampu menerjemahkan secara teknis indikator pencapaian program. Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera tidak hanya mampu menerjemahkan prosedur program PEMP dalam konteks proses. Sejumlah target pencapaian harus mampu diterjemahkan oleh TPD.
- 3) Tim Pendamping Desa perlu memiliki pengetahuan tentang penggalian isu, masalah, dan kebutuhan berbasis fakta dalam masyarakat sehingga mampu memerankan fungsi fasilitasi yang

efektif. Pihak pengelola perlu membenahi proses penyaluran dana program PEMP mulai dari tahap inisiasi, rekrutmen TPD, implementasi, monitoring, evaluasi, dan perlu melakukan umpan-balik, baik dengan pihak DKP Kabupaten Wakatobi, TPD, dan kelompok sasaran. Melalui pola seperti ini dimungkinkan pihak pengelola teknis (Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera) menciptakan keberhasilan dalam pengelolaan dana program PEMP dengan indikator capaian yang jelas.

- 4) Kelompok sasaran perlu diseleksi dan diarahkan dengan sebaik-baiknya agar terbentuk secara profesional dan mampu berdiri mandiri. Keberlanjutan program kelompok sasaran sangat ditentukan oleh keprofesionalan kelompok sasaran dalam melaksanakan program PEMP. TPD bertanggung jawab menyinkronkan arah kegiatan kelompok sasaran setelah implementasi dana program PEMP dengan perilaku organisasinya yang sudah berjalan. Dengan demikian, tidak ada pertentangan-pertentangan atau konflik dalam organisasi kelompok tersebut.

b. Faktor penguatan kelembagaan

Kesuksesan sebuah program kegiatan banyak dipengaruhi oleh peran lembaga di sekitar lokasi kegiatan. Begitu pula halnya pada pelaksanaan program PEMP di Kabupaten Wakatobi, peran lembaga baik lembaga formal maupun lembaga nonformal akan memengaruhi kesuksesan atau kegagalan

program PEMP. Pada pelaksanaan program PEMP di Kabupaten Wakatobi, peran kelembagaan belum dilibatkan secara maksimal. Pelaksana program kurang berkoordinasi dengan aparat desa/kelurahan, kecamatan, dan tokoh masyarakat setempat.

Pelibatan peran lembaga yang dimaksud di sini adalah dalam rangka menggali informasi yang signifikan terhadap pengidentifikasian isu, masalah, atau kebutuhan di lokasi program. Pengidentifikasian tersebut berguna sebagai bahan analisis dalam merencanakan sejumlah program yang berkesesuaian dengan lokalitas kelompok sasaran. Selibuhnya, fungsi pelibatan peran lembaga tersebut bisa menjadi alat kontrol yang baik. Penguatan kelembagaan harus meliputi organisasi di tingkat DKP Kabupaten Wakatobi, Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera, serta organisasi di tingkat kelompok sasaran.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kelompok-kelompok sasaran yang menerima dan mengelola dana program PEMP umumnya merupakan kelompok-kelompok baru terbentuk setelah informasi dana program PEMP digulirkan oleh pemerintah. Anggota kelompok sasaran pada umumnya bervariasi, tidak dibentuk berdasarkan kesamaan profesi. Akibatnya, dalam proses pengelolaan program PEMP di tingkat kelompok sasaran tidak ditemukan adanya kerja sama kelompok dalam pengembangan usaha. Sikap yang muncul yakni menciptakan usaha atau kegiatan secara pribadi-pribadi atau individu-individu yang secara administrasi mengatasnamakan kelompok penerima dana program PEMP.

Penguatan kelembagaan pada lembaga-lembaga yang mengelola dan menerima dana program PEMP seharusnya dilakukan sejak awal atau sebelum dana digulirkan. Tujuannya, agar lembaga yang mengelola dan menerima dana program PEMP dapat digunakan sesuai dengan peruntukan dana tersebut. Namun pada kenyataannya, lembaga-lembaga yang ada dibentuk secara terburu-buru. Lembaga penerima dana program PEMP tidak mendapat bimbingan dalam penguatan kelembagaan. Masih lemahnya atau kurang maksimalnya peran kelembagaan pada pengelolaan program dana program PEMP di Kabupaten Wakatobi tergambar dalam petikan persepsi responden berikut ini.

“Kelompok yang dibentuk terkesan dipaksakan, karena baru dibentuk.”
(Persepsi La Jama, Wangi-Wangi, Maret 2008)

“Banyak kelompok yang mendapatkan bantuan, tidak mengikuti sosialisasi sebelumnya.”
(Persepsi Maniu, Wangi-Wangi, Maret 2008)

“Saya heran ternyata, jenis usaha kelompok tidak diperhatikan oleh pengelola dana.”
(Persepsi Maslan, Wangi-Wangi, Maret 2008)

“Pada saat sosialisasi, kita diharapkan memastikan kelompok terbentuk dengan jenis usaha yang mendukung kegiatan nelayan ternyata kenyataannya tidak.”
(Persepsi Caong, Wangi-Wangi, Maret 2008)

“Ternyata jenis usaha kelompok yang lain hanya dibuat-buat saja, paling banyak dengan alasan untuk modal usaha nelayan, tapi banyak yang pinjam hanya jualan kue saja.”
(Persepsi Darwis, Wangi-Wangi, Maret 2008)

Menurut La Jama, Maniu, Maslan, Caong, dan Darwis, kemampuan lembaga, baik pengelola maupun kelompok sasaran, belumlah maksimal. Banyak kelompok sasaran menyalahgunakan dana program PEMP tetapi dibiarkan oleh lembaga pengelola. Kelompok-kelompok penerima dana program

PEMP juga merupakan kelompok dadakan yang minim penguatan kelembagaan. Akibatnya, baik lembaga pengelola maupun lembaga penerima dana kurang mampu memaksimalkan pemanfaatan dana program PEMP yang seharusnya dipakai untuk mendukung menyuplai kebutuhan nelayan.

Penguatan kelembagaan menyangkut penguatan kolaborasi (kerja sama). Kolaborasi yang dimaksud tidak hanya terbatas pada adanya kerja sama atas landasan formalitas program saja. Seharusnya, kolaborasi perlu diperluas hingga penguatan di tingkat proses pemanfaatan dana program PEMP dalam kelompok-kelompok sasaran tadi, di antaranya:

- 1) Melatih anggota kelompok-kelompok sasaran tadi agar memiliki kapasitas dalam manajemen keuangan dan manajemen usaha agar kelompok-kelompok tersebut memiliki kapasitas yang lebih memadai.
- 2) Menetapkan waktu secara reguler untuk memonitoring dan mengevaluasi kelompok-kelompok sasaran, serta menumbuhkan pertukaran informasi antartiap-tiap kelompok sasaran, sehingga dimungkinkan adanya pengetahuan praktis sesama kelompok sasaran.
- 3) Mengintervensi kelompok-kelompok sasaran bila ditemukan ada masalah yang memungkinkan terhambatnya kemajuan kelompok-kelompok sasaran. Intervensi dapat berupa perbaikan kinerja organisasi kelompok atau intervensi berupa arahan pada kelompok-kelompok sasaran untuk menemukan dan mengenali persoalan internal yang dihadapi oleh tiap-tiap kelompok sasaran.

c. Faktor penguatan dana/modal

Selain faktor sumberdaya manusia dan penguatan kelembagaan, faktor penguatan dana (modal usaha) juga sangat dibutuhkan nelayan dalam meningkatkan produktivitas usaha. Semakin besar dana (modal) yang diterima nelayan, maka semakin besar pula peluang meningkatkan usaha. Sebaliknya, jika modal yang diterima jumlahnya terbatas, maka nelayan akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Akan tetapi, penguatan modal perlu dirasionalisasi dengan kemampuan modal awal kelompok sasaran. Tujuannya, penguatan modal tidak menjadi beban yang memberatkan nelayan penerima dana program PEMP di kemudian hari.

Penguatan modal pada dasarnya tidak bisa hanya diartikan sebagai proses penguatan berupa pemberian sejumlah satuan mata uang saja kepada kelompok-kelompok sasaran. Penguatan modal bias berupa barang yang dalam realitasnya bisa diestimasi dengan sejumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kelompok-kelompok sasaran. Realitas kelompok-kelompok sasaran akan tampak dari sarana dan prasarana yang dimilikinya. Realitas tersebut menjadi salah satu acuan bagi pengelola dana (Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera) dalam memberikan penguatan modal kepada kelompok sasaran.

Kendala yang dihadapi oleh Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera, selaku pengelola teknis dana program PEMP setelah pengucuran dana, salah satunya yakni kelompok sasaran tidak tepat waktu dalam mengembalikan dana pinjaman pada masa-masa jatuh tempo per bulan hingga waktu akhir pengembalian. Kelompok-kelompok sasaran meminta perpanjangan waktu

pembayaran agar mereka dapat mengumpulkan dana. Nelayan penerima dana program PEMP beralasan mereka telah menjaminkan sejumlah harta pribadi sehingga mereka sepatutnya mendapat keringanan waktu pengembalian dana pinjaman. Seharusnya, jaminan tersebut dapat dijadikan sebagai tebusan untuk sejumlah tunggakan pada Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera. Jaminan akan diuangkan sebanyak tunggakan dari kelompok sasaran, kelebihan uang dari jaminan tersebut akan dikembalikan kepada kelompok sasaran selaku peminjam dana program PEMP.

Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera melalui TPD kurang efektif dalam menyosialisaikan kegiatan program PEMP. TPD dinilai tidak memberikan informasi yang utuh tentang asal dana program pemberdayaan masyarakat yang diterima nelayan. Nelayan penerima dana program pemberdayaan masyarakat beranggapan, dana yang mereka terima merupakan dana yang dikucurkan dan dimiliki oleh Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera, bukan dana dari program PEMP DKP Kabupaten Wakatobi. Kelompok-kelompok sasaran hanya mengetahui dana tersebut berasal dari dana Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera.

TPD dinilai tidak melakukan pengawasan ketat kepada kelompok-kelompok penerima dana program dan Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera. Beberapa penerima program mengatakan Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera terkesan pilih kasih dalam menyalurkan dana program PEMP ke kelompok-kelompok sasaran. Sejumlah nelayan menyatakan pengelola melakukan pilih kasih saat pengguliran dana. Koperasi Perikanan Wakatobi

Sejahtera dinilai lebih memprioritaskan kelompok yang memiliki keterkaitan atau hubungan kekeluargaan atau kenalan dekat.

“Saya sedikit kecewa saja, bantuan kemarin masih belum mencukupi.”
(Persepsi Sega, Wangi-Wangi, Maret 2008)

“Seharusnya bantuannya bisa dinaikkan lagi jumlahnya.”
(Persepsi Marni, Wangi-Wangi, Maret 2008)

“Kalau bisa suku bunganya diturunkan lagi.”
(Persepsi Minarni, Wangi-Wangi, Maret 2008)

“Kalau bisa melakukan penagihan dalam waktu yang tepat.”
(Persepsi Ahmad, Wangi-Wangi, Maret 2008)

Kekecewaan Sega dan harapan Marni, Minarni, dan Ahmad, merupakan ungkapan perspsi mereka mengenai besaran penguatan modal yang diterima nelayan penerima dana program pemberdayaan. Bantuan yang digulirkan DKP Kabupaten Wakatobi dirasa masih belum cukup menguatkan modal nelayan. Penguatan modal sangat diharapkan oleh nelayan agar mereka dapat lebih leluasa menentukan jenis usaha yang dapat dijalankan. Termasuk pula, penurunan suku bunga pinjaman merupakan bentuk permintaan penguatan modal sebagaimana yang disarankan oleh Minarni (responden penelitian).

Ketiga aspek yang dijelaskan di atas, yakni aspek sumberdaya manusia (SDM), penguatan kelembagaan, dan penguatan modal menjadi sebab yang memengaruhi terbentuknya sejumlah persepsi masyarakat terhadap pengguliran program PEMP. Persepsi masyarakat atas program PEMP berimplikasi langsung pada kesuksesan dan kegagalan pengembangan usaha masyarakat yang menggunakan dana program PEMP.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini berjudul “Persepsi Masyarakat terhadap Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kabupaten Wakatobi”. Hasil temuan dan pembahasan terhadap tiga masalah penelitian sebagaimana yang telah dideskripsikan pada Bab IV disimpulkan sebagai berikut.

- 1) Sebagian besar responden (kelompok sasaran), yakni 59,29% beranggapan bahwa mekanisme penyaluran dana program PEMP tidak (kurang) baik. Responden yang menyatakan bahwa mekanisme penyaluran dana program PEMP telah berjalan dengan baik berjumlah 40,71%. Dengan demikian, sebagian besar responden menyatakan bahwa mekanisme penyaluran dana program PEMP tidak (kurang) baik.
- 2) Persepsi responden terhadap beban pengembalian dana yang dirasakan nelayan yakni sebagian besar responden (57%) menyatakan beban pengembalian dana program PEMP Kabupaten Wakatobi tidak baik. Sebaliknya, 43% responden menyatakan bahwa beban pengembalian dana program PEMP Kabupaten Wakatobi yang ditetapkan pihak implementor telah baik. Dengan demikian, disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan penetapan

pihak implementor tentang beban pengembalian dana program PEMP Kabupaten Wakatobi (besaran modal pinjaman, bunga pinjaman, dan jangka waktu/masa tenggat) oleh pihak implementor tidak (belum) tepat.

- 3) Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi program PEMP di Kabupaten Wakatobi, yakni ketidakefektifan sumberdaya manusia pengelola program (DKP Kabupaten Wakatobi, Tim Pendamping Desa, dan Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera) dan lemahnya manajemen kelembagaan kelompok sasaran penerima program PEMP. Pihak DKP Kabupaten Wakatobi kurang melakukan monitoring dan evaluasi, Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera kurang mampu mengimplementasi program dan mengintervensi nelayan penerima program dalam melakukan pengembangan usaha. Pada aspek kelembagaan, kelompok sasaran mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan dan manajemen usaha. Aspek dana/modal meliputi tidak proporsionalnya jumlah dana yang diberikan dengan volume dan jenis usaha yang dijalankan oleh kelompok sasaran.

B. Saran

Penelitian ini menemukan beberapa kekurangan pengimplementasian program PEMP di Kabupaten Wakatobi sebagaimana yang telah disimpulkan pada bagian simpulan. Kekurangan pengimplementasian program PEMP dapat berdampak pada kecenderungan kegagalan program yang sedang berjalan.

Berikut ini disarankan beberapa hal yang setidaknya dapat menjadi masukan bagi pemerintah, khususnya pengelola dana program PEMP Kabupaten Wakatobi.

- 1) Pihak implementor (DPK Kabupaten Wakatobi, TPD, dan Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera) perlu menata kembali mekanisme penyaluran dana program agar menjadi lebih baik. Mekanisme penyaluran dana program meliputi tahapan-tahapan penyaluran dana, pelaksana penyaluran dana, kelompok sasaran, kegiatan/usaha kelompok, jaminan pinjaman, pertimbangan prioritas dalam pengucuran dana, monitoring, dan evaluasi perkembangan usaha.
- 2) Selain menata kembali mekanisme penyaluran dana program PEMP, pihak implementor juga perlu memperbaiki mode pengembalian dana yang diterima nelayan, yakni besaran modal pinjaman, bunga pinjaman, sistem pengembalian, dan jangka waktu pengembalian (jatuh tempo).
- 3) DKP Kabupaten Wakatobi perlu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola program (DKP Kabupaten Wakatobi, TPD, dan Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera) dan meningkatkan kinerja organisasi dalam mengelola program PEMP. Implementor sebaiknya memberikan solusi atas hambatan atau kesulitan yang dialami oleh kelompok-kelompok sasaran. Penerima program (nelayan) perlu dibekali keterampilan dalam mengelola keuangan kelompok dan jenis usaha yang akan dilakukan kelompok penerima program.



DAFTAR PUSAKA

- Alexander, E. R. (1988). *Approach to planning: Introduction current planning theories, concepts, and issues*. Gordon and Breach Science Publishers.
- Conyers, D., and Hills, P. (1984). *An Introduction to development planning in the third world*. New York: John Willey and Sons, Inc.
- Dahuri, R. et al. (1996). *Pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan lautan secara terpadu*. Jakarta: PT Pradya Paramita.
- Davidoff, J.B. (1975). *Differences in visual perception the individual eye*. Crosby Lockword Staples. London: Grenada Publishing, Ltd.
- Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (2001). *Panduan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir*. Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Elfindri. (2002). *Ekonomi patron-client: Fenomena mikro rumah tangga nelayan dan kebijakan makro*. Medan: Andalas Press.
- J & J Learning. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Yogyakarta.
- Kartasasmita, G. (1997). Power and empowerment: Sebuah telaah mengenai konsep pemberdayaan masyarakat. Dalam Soegijoko, Cahyadi, B.S., dan Kusbiantoro, B.S. (penyunting): *Bunga Rampai Perencanaan Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- (1996). *Pemberdayaan masyarakat: Konsep pembangunan yang berakar pada masyarakat*. Bandung: ITB.
- Mashuri. (1993). *Pasang surut usaha perikanan laut: Tinjauan sosial ekonomi ke nelayan Jawa dan Madura 1850/1940, masyarakat Indonesia*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Moleong, L. (2001). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Natuna, Daeng Ayub. 2004. *Perkembangan biologis dan perseptual anak*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Patton, C.V. dan Sawicki, D.S. (1986). *Basic methods of policy analysis & planning*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.

- Prijono, S.O. dan Pranarka, A.M.W. (1996). *Pemberdayaan: Konsep, kebijakan, dan implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- Sen, A. (2001). *Masih adakah harapan bagi kaum miskin? Sebuah perbincangan tentang etika dan ilmu ekonomi di fajar milenium baru*. Jakarta: Mizan Pustaka.
- Singarimbun, M dan Effendi, S. (1989). *Metode penelitian survai*. Jakarta: LP3ES.
- Siswanto, S. (1997). *Manajemen terapan bank*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Sugianto, Purnomo, S., dan Marguerita. S.R. (1993). *Bunga rampai pembiayaan pertanian pedesaan*. Institut Bankir Indonesia.
- Sumodiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan masyarakat dan JPS*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- (1998). *Membangun perekonomian rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan IDEA.
- Sutrisno, T., Edi, S.H., dan Mubyarto. (1990). *Kredit pedesaan di Indonesia*. Badan Pusat Statistik. Jakarta: Badan Pusat Statistik Jakarta.
- Thoha, M. (2002). *Perilaku organisasi: Konsep dasar dan aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Van Meter D. & Van Horn, C.E. (1978). *The policy implementation process*. Beverly Hill: a Conceptual framework in administration and society.
- Wahab, S.A. (1997). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2008). *Teori & proses kebijakan publik*. Yogyakarta: Media Presindo.

- Prijono, S.O. dan Pranarka, A.M.W. (1996). *Pemberdayaan: Konsep, kebijakan, dan implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- Sen, A. (2001). *Masih adakah harapan bagi kaum miskin? Sebuah perbincangan tentang etika dan ilmu ekonomi di fajar milenium baru*. Jakarta: Mizan Pustaka.
- Singarimbun, M dan Effendi, S. (1989). *Metode penelitian survai*. Jakarta: LP3ES.
- Siswanto, S. (1997). *Manajemen terapan bank*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Sugianto, Purnomo, S., dan Marguerita. S.R. (1993). *Bunga rampai pembiayaan pertanian pedesaan*. Institut Bankir Indonesia.
- Sumodiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan masyarakat dan JPS*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- (1998). *Membangun perekonomian rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan IDEA.
- Sutrisno, T., Edi, S.H., dan Mubyarto. (1990). *Kredit pedesaan di Indonesia*. Badan Pusat Statistik. Jakarta: Badan Pusat Statistik Jakarta.
- Thoha, M. (2002). *Perilaku organisasi: Konsep dasar dan aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Van Meter D. & Van Horn, C.E. (1978). *The policy implementation process*. Beverly Hill: a Conceptual framework in administration and society.
- Wahab, S.A. (1997). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2008). *Teori & proses kebijakan publik*. Yogyakarta: Media Presindo.

kelompok sasaran tidak menjadi larut dalam masalah yang justru akan semakin menyengsarakan nelayan penerima dana program PEMP.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi, dalam konteks ini, tampaknya mengalami determinasi kinerja. DKP Kabupaten Wakatobi tidak menempuh langkah-langkah yang bersifat kreatif dalam menangani dana program PEMP. Misalnya saja, pihak DKP Kabupaten Wakatobi dapat mencari dan menemukan solusi dalam menafsirkan program PEMP berdasarkan lokalitas permasalahan yang dihadapi oleh para nelayan penerima dana program.

Hasil wawancara dengan pimpinan proyek program PEMP Kabupaten Wakatobi diperoleh informasi yakni pengelola dana program PEMP kurang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) selama diangkat sebagai pimpinan pelaksana program PEMP. Kalaupun ada, pendidikan dan pelatihan yang diikuti lebih bersifat pembekalan umum, sedangkan untuk hal-hal yang bersifat teknis jarang diikutinya. Pimpinan proyek program PEMP Kabupaten Wakatobi menambahkan kondisi pengelola program PEMP yang semuanya masih baru dalam menangani program pemberdayaan memang menimbulkan berbagai kendala dalam upaya pencapaian keberhasilan program.

Kelemahan SDM pengelola program pada tingkat DKP Kabupaten Wakatobi diketahui dari tanggapan-tanggapan kelompok penerima program. Beberapa responden yang merupakan kelompok penerima program menyampaikan tanggapannya seperti berikut ini.

“Pihak DKP kurang memberikan solusi atas masalah yang kami hadapi.”
(Persepsi La Ode Mustara, Wangi-Wangi, Maret 2008)



Lampiran 2

**IDENTITAS MASYARAKAT KENA SAMPEL DI DESA MOLA UTARA
KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN**

NO.	NAMA	L/P	UMUR	STATUS	PENDIDIKAN	JENIS USAHA		
						PENGUATAN MODAL NELAYAN	KEDAI PESISIR	SPDN
1.	MASLAM	L	35	KEL	TIDAK TAMAT SD	√	-	-
2.	H.M. KASIM	L	58	IND	TIDAK TAMAT SD	√	-	-
3.	MARNIA	P	43	IND	TIDAK TAMAT SD	√	-	-
4.	CAONG	L	34	KEL	SD	√	-	-
5.	SEGA	L	35	KEL	SMP	√	-	-
6.	IDA	P	40	IND	SMP	√	-	-
7.	SAHARIA	P	45	IND	SMA	√	-	-
8.	SARIU	L	39	KEL	SMA	√	-	-
9.	ATI	P	36	KEL	TIDAK TAMAT SD	√	-	-
10.	H.M. GEGA	L	55	IND	TIDAK TAMAT SD	√	-	-
11.	NURMIN	P	43	IND	TIDAK TAMAT SD	√	-	-
12.	SRIHANDAYANI	P	32	KEL	SD	√	-	-
13.	MINARNI	P	30	KEL	SMP	√	-	-
14.	Hj. SITI NUR	P	46	IND	TIDAK TAMAT SD	√	-	-
15.	MARNI	P	34	KEL	TIDAK TAMAT SD	√	-	-
16.	HERLIATI	P	41	IND	TIDAK TAMAT SD	√	-	-
17.	AHMAD	L	42	IND	TIDAK TAMAT SD	√	-	-
18.	NUR CAHAYA	P	36	KEL	SD	√	-	-
19.	SAMARUDIN	L	29	KEL	SMP	√	-	-
20.	DARWIS	L	31	KEL	SMA	√	-	-
21.	JONO	L	35	IND	SMA	√	-	-
22.	SIPU	L	36	IND	SMP	√	-	-
23.	JUNASENG	L	33	KEL	SMA	√	-	-
24.	NURSANA	P	37	KEL	TIDAK TAMAT SD	√	-	-
25.	SUPIATI	P	40	KEL	TIDAK TAMAT SD	√	-	-
26.	Hj. SITI FATMAH	P	43	IND	TIDAK TAMAT SD	√	-	-
27.	PESOL	L	30	KEL	SMA	√	-	-
28.	TOTO B.	L	27	IND	SMA	√	-	-
29.	ASTI	P	32	IND	SMA	√	-	-
30.	RENALDI	L	28	KEL	SMP	√	-	-

NO.	NAMA	L/P	UMUR	STATUS	PENDIDIKAN	JENIS USAHA		
						PENGUATAN MODAL NELAYAN	KEDAI PESISIR	SPDN
31.	JAMIL	L	47	KEL	TIDAK TAMAT SD	√	-	-
32.	LUKMAN	L	37	IND	SMP	√	-	-
33.	SANTY	P	41	KEL	TIDAK TAMAT SD	√	-	-
34.	SUMAIL	L	39	KEL	TIDAK TAMAT SD	√	-	-
35.	ANDI	L	32	KEL	SD	√	-	-
36.	Hj. SUA	P	42	IND	TIDAK TAMAT SD	-	√	-
37.	DUMARDIN	L	26	KEL	SMP	-	√	-
38.	RENI	P	44	KEL	TIDAK TAMAT SD	-	√	-
39.	RESTA	L	32	IND	TIDAK TAMAT SD	-	√	-
40.	RATNO	L	45	KEL	TIDAK TAMAT SD	-	√	-
41.	NURASIA	P	39	KEL	SMP	-	√	-
42.	SUWESTI	P	35	IND	SMA	-	√	-
43.	RASNA	P	32	KEL	SD	-	√	-
44.	SALMIA	P	37	KEL	SD	-	√	-
45.	NANDE	L	35	IND	TIDAK TAMAT SD	-	√	-
46.	NUSTIA	P	41	KEL	TIDAK TAMAT SD	-	-	√
47.	PESMI	L	35	KEL	TIDAK TAMAT SD	-	-	√
48.	HERMAN	L	31	IND	SD	-	-	√
49.	DURAHMAN	L	37	KEL	SMP	-	-	√
50.	SARDIN WINDI	L	40	KEL	SD	-	-	√
JUMLAH (ORANG)						35	10	5

Lampiran 3

**DATA KAJIAN HASIL SOSIALISASI PADA MASYARAKAT
KENA SAMPEL DI DESA WAHA KECAMATAN WANGI-WANGI**

NO.	NAMA	TANGGAPAN	INDIKATOR	
			BAIK	TIDAK BAIK
1.	LA JAMA	Bagi saya, materi yang disampaikan mudah dimengerti.	√	
2.	UDIASI	Materi yang disampaikan banyak menggunakan istilah asing.		√
3.	MANIU	Tidak senang karena peserta yang mengikuti sosialisasi, ternyata bukan hanya nelayan.		√
4.	ADIHU	Apa yang disampaikan sangat sesuai dengan kebutuhan saya.	√	
5.	ABUYADIN	Banyak menggunakan istilah yang saya tidak tahu.		√
6.	SALEH	Saya mendapatkan banyak informasi yang berhubungan dengan kegiatan nelayan saya.	√	
7.	LA UDIN	Banyak informasi yang menarik yang disampaikan.	√	
8.	HAENUDIN	Saya kurang menguasai Informasi yang disampaikan.		√
9.	WA NARU	Saya tertarik dengan informasi pemberdayaan yang disampaikan .	√	
10.	BUDI	Banyak informasi yang saya kurang pahami.		√
11.	WA ALUFIA	Saya senang dengan informasi akan ada bantuan usaha.	√	
12.	LA RAMA	Banyak informasi yang saya tidak tahu artinya.		√
13.	HURAEDA	Merasa senang karena ada bantuan.	√	
14.	SUMARDIN	Saya kecewa, informasi akan ada sosialisasi, saya terlambat mengetahuinya.		√
15.	USAILI	Informasi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan saya.	√	
16.	SUDI	Banyak istilah yang saya tidak tahu.		√
17.	LA POA	Saya kira hanya nelayan yang akan ikut tetapi ternyata banyak yang berprofesi lain yang hadir.		√
18.	AHLANI	Informasi yang disampaikan sangat menarik.	√	
19.	ASWAHID	Secara umum, informasi mengenai persyaratan peminjaman uang memberatkan saya.		√
20.	LA DIRA	Saya senang karena ada informasi pemberdayaan.	√	
21.	SITI NORMA	Banyak informasi yang saya tidak tahu.		√
22.	JASMIN	Saya tertarik dengan informasi bantuan usaha yang disampaikan.	√	
23.	HALIDA	Informasi sosialisasi saya terlambat tahu.		√
24.	NURLIA	Yang disampaikan banyak yang saya kurang pahami.		√
25.	MULIADIN	Bisa membantu usaha yang saya lakukan.	√	

NO.	NAMA	L/P	UMUR	STATUS	PENDIDIKAN	JENIS USAHA		
						PENGUATAN MODAL NELAYAN	KEDAI PESISIR	SPDN
31.	ASMUDIN	L	36	IND	S1	-	√	-
32.	SAMSUL	L	38	KEL	SMA	-	√	-
33.	HARUMIATI	P	32	IND	SMP	-	√	-
34.	JUNianto	L	27	KEL	SMA	-	√	-
35.	ASNI	P	31	KEL	SMP	-	√	-
36.	ASNA	P	33	IND	SMP	-	√	-
37.	WA YODU	P	40	KEL	SD	-	√	-
38.	HARSINA	P	34	KEL	SD	-	√	-
39.	JUMIANI	P	39	KEL	D2	-	√	-
40.	JAMARUDIN	L	38	KEL	TDK TAMAT SD	-	√	-
41.	RAHMAT	L	29	IND	SMA	-	√	-
42.	LD MUSTARA	L	36	IND	SMP	-	√	-
43.	LD SAHIRUDIN	L	30	KEL	SMA	-	√	-
44.	MA'RUF	L	45	IND	TDK TAMAT SD	-	-	√
45.	LA ODE SAMU	L	46	IND	TDK TAMAT SD	-	-	√
46.	HUWIATI	P	40	KEL	TDK TAMAT SD	-	-	√
47.	HAYANI	P	35	KEL	SMP	-	-	√
48.	HIDIH	P	37	KEL	SMP	-	-	√
49.	SALIM	L	29	KEL	SMA	-	-	√
50.	RATMI	P	45	KEL	TDK TAMAT SD	-	-	√
JUMLAH (ORANG)						27	16	7

UNIVERSITAS TERBUKA

NO.	NAMA	TANGGAPAN	INDIKATOR	
			BAIK	TIDAK BAIK
26.	LD ASWADIN	Saya merasa kecewa, informasi akan ada sosialisasi, saya terlambat mengetahuinya.		√
27.	MASKUR	Terlalu banyak menggunakan istilah yang saya tidak tahu.		√
28.	HATJAH	saya senang karena mendapatkan banyak informasi yang berhubungan dengan kegiatan nelayan saya.	√	
29.	DARMAN	Saya kurang menguasai Informasi yang disampaikan.		√
30.	LA TUNA	Banyak informasi yang menarik yang disampaikan.	√	
31.	ASMUDIN	Saya tertarik dengan informasi pemberdayaan yang disampaikan .	√	
32.	SAMSUL	Saya senang dengan informasi akan ada bantuan usaha.	√	
33.	HARUMIATI	Banyak informasi yang saya kurang pahami.		√
34.	JUNianto	Bagi saya, materi yang disampaikan agak sukar saya dimengerti.		√
35..	ASNI	Materi yang disampaikan banyak menggunakan istilah asing.		√
36.	ASNA	Saya hanya heran ternyata peserta yang mengikuti sosialisasi, ternyata bukan hanya nelayan.		√
37.	WA YODU	Apa yang disampaikan sangat sesuai dengan kebutuhan suami saya.	√	
38.	HARSINA	Banyak menggunakan istilah yang saya tidak tahu.		√
39.	JUMIANI	Saya terlambat mengetahui informasi mengenai kegiatan sosialisasi.		√
40.	JAMARUDIN	Banyak informasi yang saya tidak tahu maknanya.		√
41.	RAHMAT	Saya kurang menguasai Informasi yang disampaikan.		√
42.	LD MUSTARA	Banyak yang saya kurang pahami.		√
43.	LD SAHIRUDIN	Saya hanya heran ternyata banyak yang hadir yang bukan nelayan.		√
44.	MA'RUF	Saya terlambat mendapatkan informasi kegiatan sosialisasi		√
45.	LA ODE SAMU	Bagi saya, materi yang disampaikan agak sulit saya mengerti.		√
46.	HUWIATI	Materi yang disampaikan banyak menggunakan istilah asing.		√
47.	HAYANI	Saya kaget, Peserta yang mengikuti sosialisasi, ternyata dari kalangan petani juga.		√
48.	HIDIH	Kalau bukan karena teman duduk saya, saya tidak akan mengerti pokok penyampaian yang dilakukan.		√
49.	SALIM	Banyak menggunakan istilah yang saya tidak tahu.		√
50.	RATMI	Saya tidak tahu sama sekali bila ada kegiatan sosialisasi.		√
Jumlah			17	33

Lampiran 4

**DATA KAJIAN HASIL SOSIALISASI PADA
MASYARAKAT KENA SAMPEL DI DESA MOLA UTARA
KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN**

NO.	NAMA	TANGGAPAN	INDIKATOR	
			BAIK	TIDAK BAIK
1.	MASLAM	Penyampaian yang diberikan sulit dimengerti.		√
2.	H.M. KASIM	Apa yang disampaikan akan membantu usaha masyarakat.	√	
3.	MARNIA	Senang karena akan membantu usaha nelayan yang kami lakukan.	√	
4.	CAONG	Apa yang disampaikan agak sulit saya mengerti.		√
5.	SEGA	Bantuan yang akan diberikan akan membantu semua kebutuhan nelayan.	√	
6.	IDA	Saya terlambat mendapatkan informasi kegiatan sosialisasi.		√
7.	SAHARIA	Banyak informasi yang menarik yang disampaikan.	√	
8.	SARIU	Saya kurang menguasai Informasi yang disampaikan.		√
9.	ATI	Saya tidak tahu bila ada kegiatan sosialisasi.		√
10.	H.M. GEGA	Bantuan yang nantinya diberikan akan sangat membantu usaha nelayan yang kami lakukan.	√	
11.	NURMIN	Terlambat saya mengetahui kegiatan sosialisasi.		√
12.	SRI HANDAYANI	Banyak informasi yang saya tidak tahu artinya.		√
13.	MINARNI	Merasa senang karena ada bantuan.	√	
14.	Hj. SITI NURHAYATI	Saya kecewa, informasi akan ada sosialisasi, saya terlambat mengetahuinya.		√
15.	MARNI	Informasi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan saya.	√	
16.	HERLIATI	Saya sekeluarga merasa akan terbantu dengan bantuan yang diberikan.	√	
17.	AHMAD	Sangat senang dengan kegiatan tersebut, saya merasa diringankan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.	√	
18.	NUR CAHAYA	Informasi yang disampaikan agak sulit saya mengerti.		√
19.	SAMARUDIN	Informasi mengenai persyaratan peminjaman uang kalau bisa diringankan sedikit.		√
20.	DARWIS	Saya terlambat mengikuti kegiatan sosialisasi.		√

NO.	NAMA	TANGGAPAN	INDIKATOR	
			BAIK	TIDAK BAIK
21.	JONO	Banyak informasi yang saya tidak tahu.		√
22.	SIPU	Saya tertarik dengan informasi bantuan usaha yang disampaikan.	√	
23.	JUNASENG	Kegiatan sosialisasi saya tidak tahu.		√
24.	NURSANA	Informasi yang disampaikan banyak yang saya tidak tahu.		√
25.	SUPIATI	Kalau bisa bunganya diturunkan.		√
26.	Hj. SITI FATIMAH	Kecewa, informasi kegiatan sosialisasi tidak disampaikan secara merata.		√
27.	PESOL	Banyak pakai istilah yang saya tidak paham.		√
28.	TOTO B.	Saya tidak senang karena pegawai negeri dan yang kaya-kaya juga ikut sosialisasi.		√
29.	ASTI	Saya sulit menguasai informasi yang disampaikan.		√
30.	RENALDI	Saya hanya merasa tidak senang karena informasi mengenai sosialisasi terlambat saya tahu.		√
31.	JAMIL	Saya kurang mengerti apa yang disampaikan.		√
32.	LUKMAN	Saya kesulitan memahami penyampaian yang diberikan.		√
33.	SANTY	Informasi yang diberikan saya kurang pahami.		√
34.	SUMAIL	Materi yang disampaikan sukar saya dimengerti.		√
35.	ANDI	Penyampaian yang diberikan banyak menggunakan istilah asing.		√
36.	Hj. SUA	Saya terlambat tahu kegiatan sosialisasi.		√
37.	DUMARDIN	Banyak haji-haji yang ikut kegiatan sosialisasi, jangan sampai mereka juga ikut meminta bantuan.		√
38.	RENI	Sering menggunakan istilah yang saya tidak tahu.		√
39.	RESTA	Cara menjelaskan agak sulit saya mengerti.		√
40.	RATNO	Informasi yang diberikan saya tidak tahu maknanya.		√
41.	NURASIA	Saya kurang pahami mengenai Informasi yang disampaikan.		√
42.	SUWESTI	Banyak yang saya kurang pahami.		√
43.	RASNA	Ternyata banyak yang hadir juga orang-orang kaya, bukanlah hanya untuk nelayan yang tidak mampu saja.		√
44.	SALMIA	Terlambat saya mendapatkan informasi kegiatan sosialisasi.		√
45.	NANDE	Materi yang disampaikan agak sulit saya mengerti.		√
46.	NUSTIA	Penyampaian yang diberikan banyak menggunakan istilah asing.		√
47.	PESMI	Saya kaget, peserta yang mengikuti sosialisasi, ternyata banyak juga orang kaya.		√
48.	HERMAN	Saya tidak tahu kalau ada kegiatan sosialisasi.		√
49.	DURAHMAN	Sering menggunakan istilah yang saya tidak tahu.		√
50.	SARDIN WINDI	Saya kadang kesulitan memahami penyampaian yang diberikan.		√
	Jumlah		10	40

Lampiran 5

**DATA KAJIAN HASIL PEMBENTUKAN KELOMPOK PADA
MASYARAKAT KENA SAMPEL DESA WAHA**

NO.	NAMA	TANGGAPAN	INDIKATOR	
			BAIK	TIDAK BAIK
1.	LA JAMA	Kelompok yang dibentuk terkesan dipaksakan, karena baru dibentuk.		√
2.	UDIASI	Walaupun kelompok kami baru terbentuk, namun bagi kami sangat berterima kasih telah dijadikan target sasaran.	√	
3.	MANIU	Banyak kelompok yang mendapatkan bantuan, tidak mengikuti sosialisasi sebelumnya.		√
4.	ADIHU	Senang, karena kelompok yang kami bentuk menjadi salah satu penerima bantuan	√	
5.	ABUYADIN	Merasa dimudahkan dengan tidak ketatnya seleksi kelompok yang diterima.	√	
6.	SALEH	Agak kecewa ternyata yang dibantu termasuk kelompok yang baru saja dibentuk.		√
7.	LA UDIN	Saya berterima kasih karena kelompok yang baru saja kami bentuk mendapatkan bantuan.	√	
8.	HAENUDIN	Sangat senang sehubungan dengan dimudahkannya mendapatkan bantuan.	√	
9.	WA NARU	Saya heran, ternyata biar kelompok yang baru dibentuk dibantu juga.		√
10.	BUDI	Walaupun saya dan kelompok yang kami bentuk tidak mengikuti sosialisasi mendapatkan bantuan juga.	√	
11.	WA ALUFIA	Saya kecewa, kelihatannya yang diutamakan adalah kelompok dari kalangan keluarga pengelola dana saja.		√
12.	LA RAMA	Senang, karena dimudahkan dalam pembentukan kelompok.	√	
13.	HURAEDA	Kelihatannya banyak yang dibuatkan kelompok dari kalangan keluarga pengelola dana saja.		√
14.	SUMARDIN	Sangat senang, karena merasa diperhatikan dalam pembentukan kelompok.	√	
15.	USAILI	Saya merasa kecewa ternyata yang dibantu termasuk kelompok yang baru saja dibentuk.		√
16.	SUDI	Agak heran ternyata yang dibantu termasuk kelompok yang baru saja dibentuk.		√
17.	LA POA	Saya merasa heran dalam penyaluran dana ini, banyak dibentuk kelompok dadakan agar bisa disalurkan dana bantuan.		√
18.	AHLANI	Saya merasa senang karena dapat dibantu.	√	
19.	ASWAHID	Senang karena dimudahkan dalam mendapatkan bantuan.	√	
20.	LA DIRA	Saya agak kecewa karena merasa kurang diperhatikan awalnya dalam pembentukan kelompok saya.		√

NO.	NAMA	TANGGAPAN	INDIKATOR	
			BAIK	TIDAK BAIK
21.	SITI NORMA	Senang karena dimudahkan dalam pembentukan kelompok bantuan.	√	
22.	JASMIN	Agak kecewa ternyata yang dibantu termasuk kelompok yang baru saja dibentuk.		√
23.	HALIDA	Sangat senang sehubungan dengan dimudahkannya mendapatkan bantuan.	√	
24.	NURLIA	Tidak senang, karena ada kelompok yang dibantu tidak ikut sosialisasi sama sekali.		√
25.	MULIADIN	Kecewa, karena dari kalangan kerabat pengelola dana saja yang kelihatannya diutamakan.		√
26.	LA ODE ASWADIN	Merasa senang karena kelompokku dapat dibantu.	√	
27.	MASKUR	Sangat kecewa, kelompokku lama baru diterima untuk dibantu.		√
28.	HATIHAH	Kecewa, karena dari kalangan kerabat pengelola dana saja yang kelihatannya diutamakan.		√
29.	DARMAN	Senang, karena kelompok yang kami bentuk menjadi salah satu penerima bantuan.	√	
30.	LA TUNA	Heran, karena kita yang ikut sosialisasinya tidak didahulukan untuk mendapatkan dana bantuan.		√
31.	ASMUDIN	Merasa senang karena kelompok yang saya bentuk dapat dibantu.	√	
32.	SAMSUL	Senang, karena dapat dibantu.	√	
33.	HARUMIATI	Senang, karena kita merasa diperhatikan dalam pengusulan bantuan.	√	
34.	JUNianto	Saya merasa kecewa ternyata yang dibantu termasuk kelompok yang baru saja dibentuk.		√
35.	ASNI	Kecewa, karena dari kalangan kerabat pengelola dana saja yang kelihatannya diutamakan.		√
36.	ASNA	Heran, karena kita yang ikut sosialisasinya tidak didahulukan untuk mendapatkan dana bantuan.		√
37.	WA YODU	Tidak senang, karena ada kelompok yang dibantu tidak ikut sosialisasi sama sekali.		√
38.	HARSINA	Senang karena dengan mudah kelompok kami dibentuk dan mendapatkan bantuan.	√	
39.	JUMIANI	Saya merasa kecewa karena kelihatannya diutamakan adalah keluarga pendamping saja.		√
40.	JAMARUDIN	Saya kecewa, kelihatannya yang diutamakan adalah kelompok dari kalangan keluarga pengelola dana saja yang dapat.		√
41.	RAHMAT	Yang ikut sosialisasi tidak didahulukan untuk mendapatkan dana bantuan.		√
42.	LA ODE MUSTARA	Merasa kecewa karena kelompok yang saya bentuk lama baru dilayani.		√
43.	LA ODE SAHIRUDIN	Saya merasa kecewa, karena kelihatannya yang dilayani duluan adalah kelompok-kelompok yang dekat dengan pengelola.		√
44.	MA'RUF	Saya tidak senang karena terlambat mengetahui penyaluran dana melalui kelompok.		√
45.	LA ODE SAMU	Saya heran, ternyata biar kelompok yang baru dibentuk dibantu juga.		√

NO.	NAMA	TANGGAPAN	INDIKATOR	
			BAIK	TIDAK BAIK
46.	HUWIATI	Sebetulnya saya kurang simpatik, karena walaupun kita dikelompokkan, tetapi pada dasarnya kita bertanggung jawab sendiri-sendiri.		√
47.	HAYANI	Saya kecewa, kelihatannya yang diutamakan adalah kelompok dari kalangan keluarga pengelola dana saja.		√
48.	HIDIH	Ternyata biar kelompok yang baru dibentuk jga dibantu.		√
49.	SALIM	Saya heran, kita yang ikut sosialisasi tidak didahulukan pembentukan kelompoknya.		√
50.	RATMI	Saya sedikit kecewa, karena terlambat bentuk kelompok.		√
	Jumlah		18	32

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 6

**DATA KAJIAN HASIL PEMBENTUKAN KELOMPOK PADA
MASYARAKAT KENA SAMPEL DI DESA MOLA UTARA
KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN**

NO.	NAMA	TANGGAPAN	INDIKATOR	
			BAIK	TIDAK BAIK
1.	MASLAM	Banyak kelompok yang mendapatkan bantuan, tidak mengikuti sosialisasi sebelumnya.		√
2.	H.M. KASIM	Kesannya pengelola hanya menekankan persyaratan administrasi ditandai dengan dadakannya kelompok-kelompok dibentuk.		√
3.	MARNIA	Kelompok yang dibentuk terkesan dipaksakan, karena baru dibentuk.		√
4.	CAONG	Agak kecewa ternyata yang dibantu termasuk kelompok yang baru saja dibentuk.		√
5.	SEGA	Saya heran ternyata biar kelompok yang baru dibentuk dibantu juga.		√
6.	IDA	Banyak kelompok yang mendapatkan bantuan, tidak mengikuti sosialisasi sebelumnya.		√
7.	SAHARIA	Pengelola hanya menekankan persyaratan administrasi saja.		√
8.	SARIU	Kelompok yang dibentuk terkesan dipaksakan, karena baru dibentuk.		√
9.	ATI	Agak kecewa ternyata yang dibantu termasuk kelompok yang baru saja dibentuk.		√
10.	H.M. GEGA	Banyak kelompok yang mendapatkan bantuan, tidak mengikuti sosialisasi sebelumnya.		√
11.	NURMIN	Kesannya, pengelola hanya menekankan persyaratan administratif, ditandai dengan dadakannya kelompok-kelompok yang dibentuk.		√
12.	SRI HANDAYANI	Kelompok yang dibentuk terkesan dipaksakan karena baru dibentuk.		√
13.	MINARNI	Agak kecewa ternyata yang dibantu termasuk kelompok yang baru saja dibentuk.		√
14.	Hj. SITI NURHAYATI	Saya merasa kecewa ternyata yang dibantu termasuk kelompok yang baru saja dibentuk.		√
15.	MARNI	Sangat senang, karena merasa diperhatikan dalam pembentukan kelompok.	√	
16.	HERLIATI	Senang karena dimudahkan dalam mendapatkan bantuan.	√	
17.	AHMAD	Saya merasa heran dalam penyaluran dana ini, banyak dibentuk kelompok dadakan agar bisa disalurkan dana bantuan.		√
18.	NUR CAHAYA	Saya merasa senang karena dapat dibantu.	√	
19.	SAMARUDIN	Agak heran ternyata yang dibantu termasuk kelompok yang baru saja dibentuk.		√
20.	DARWIS	Senang karena dimudahkan dalam pembentukan kelompok bantuan.	√	

NO.	NAMA	TANGGAPAN	INDIKATOR	
			BAIK	TIDAK BAIK
21.	JONO	Saya merasa agak kecewa karena kurang diperhatikan awalnya dalam pembentukan kelompok saya.		√
22.	SIPU	Agak kecewa ternyata yang dibantu termasuk kelompok yang baru saja dibentuk.		√
23.	JUNASENG	Sangat senang sehubungan dengan dimudahkannya mendapatkan bantuan.	√	
24.	NURSANA	Tidak senang, karena ada kelompok yang dibantu tidak ikut sosialisasi sama sekali.		√
25.	SUPIATI	Kecewa karena dari kalangan kerabat pengelola dana saja yang kelihatannya diutamakan.		√
26.	Hj. SITI FATIMAH	Senang karena kelompokku dapat dibantu.	√	
27.	PESOL	Sangat kecewa, kelompokku lama baru diterima untuk dibantu.		√
28.	TOTO B.	Senang karena kelompok yang saya bentuk dapat dibantu.	√	
29.	ASTI	Senang karena kelompok yang kami bentuk menjadi salah satu penerima bantuan	√	
30.	RENALDI	Senang karena kelompokku dapat dibantu.	√	
31.	JAMIL	Heran karena kita yang ikut sosialisasinya tidak didahulukan untuk mendapatkan dana bantuan.		√
32.	LUKMAN	Sangat kecewa, kelompokku lama baru diterima untuk dibantu.		√
33.	SANTY	Sangat kecewa, kelompokku lama baru diterima untuk dibantu.		√
34.	SUMAIL	Saya merasa kecewa ternyata yang dibantu termasuk kelompok yang baru saja dibentuk.		√
35.	ANDI	Kecewa, karena dari kalangan kerabat pengelola dana saja yang kelihatannya diutamakan.		√
36.	Hj. SUA	Heran karena kita yang ikut sosialisasinya tidak didahulukan dapat dana bantuan.		√
37.	DUMARDIN	Tidak senang, karena ada kelompok yang dibantu tidak ikut sosialisasi sama sekali.		√
38.	RENI	Kecewa karena kelompok yang saya bentuk, lama baru dilayani.		√
39.	RESTA	Kecewa karena kelihatannya yang diutamakan keluarga pendamping saja.		√
40.	RATNO	Saya kecewa, kelihatannya yang diutamakan adalah kelompok dari kalangan keluarga pengelola dana saja.		√
41.	NURASIA	Yang ikut sosialisasi tidak didahulukan untuk mendapatkan dana bantuan.		√
42.	SUWESTI	Kecewa karena kelompok yang saya bentuk lama baru dilayani.		√
43.	RASNA	Kecewa karena kelihatannya yang dilayani duluan adalah kelompok yang dekat dengan pengelola.		√
44.	SALMIA	Saya tidak senang karena terlambat mengetahui penyaluran dana melalui kelompok.		√
45.	NANDE	Saya heran, ternyata biar kelompok yang baru dibentuk dibantu juga.		√
46.	NUSTIA	Sebetulnya saya kurang simpatik karena walaupun kita dikelompokkan, tetapi pada dasarnya kita bertanggung jawab sendiri-sendiri.		√

NO.	NAMA	TANGGAPAN	INDIKATOR	
			BAIK	TIDAK BAIK
47.	PESMI	Saya kecewa, kelihatannya yang diutamakan hanya kelompok dari keluarga pengelola dana saja.		√
48.	HERMAN	Ternyata biar kelompok yang baru dibentuk dibantu juga.		√
49.	DURAHMAN	Saya heran, kita yang ikut sosialisasi tidak didahulukan pembentukan kelompoknya.		√
50.	SARDIN WINDI	Saya sedikit kecewa karena terlambat bentuk kelompok.		√
Jumlah			9	41

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 7

**DATA KAJIAN HASIL PENENTUAN JENIS KELOMPOK PADA
MASYARAKAT KENA SAMPEL DI DESA WAHA
KECAMATAN WANGI-WANGI**

NO.	NAMA	TANGGAPAN	INDIKATOR	
			BAIK	TIDAK BAIK
1.	LA JAMA	Saya heran ternyata, jenis usaha kelompok tidak diperhatikan oleh pengelola dana.		√
2.	UDIASI	Saat sosialisasi, kita diharapkan memastikan kelompok terbentuk dengan jenis usaha yang mendukung kegiatan nelayan ternyata kenyataannya tidak.		√
3.	MANIU	Ternyata jenis usaha kelompok tidak diperhatikan, akhirnya jenis usaha kelompok macam-macam.		√
4.	ADIHU	Saya tidak mempersoalkan jenis usaha kelompok yang dibantu yang penting bisa lancar usahanya.	√	
5.	ABUYADIN	Saya kira ketiga jenis usaha nelayan itu akan ada, ternyata kenyataannya usaha kelompok macam-macam jenisnya.		√
6.	SALEH	Saya khawatir setelah bantuan tersebut tidak diarahkan hanya yang berhubungan dengan nelayan saja, jadinya kayak bantuan yang lain-lain yang pernah ada.		√
7.	LA UDIN	Saya senang dengan jenis usaha kelompok saya sekarang, tidak mesti ditentukan yang penting jalan saja.	√	
8.	HAENUDIN	Ternyata bantuan ini, sama dengan bantuan sebelumnya, tidak diperhatikan jenis usaha kelompok yang dijalani.		√
9.	WA NARU	Walaupun untuk jenis usaha yang lain yang penting lancar saja pengembaliannya.	√	
10.	BUDI	Saya mendukung jenis usaha apapun yang dilakukan yang penting jalan.	√	
11.	WA ALUFIA	Ternyata sama dengan bantuan yang sebelum-sebelumnya, tidak ada bedanya.		√
12.	LA RAMA	Jenis usaha yang kami jalankan sudah sesuai dengan petunjuk sebelumnya, yakni usaha nelayan.	√	
13.	HURAEDA	Saya heran, kenyataan di lapangan tidak diarahkan sesuai petunjuk mengenai jenis usaha kelompok yang sesuai.		√
14.	SUMARDIN	Jenis usaha urusan belakangan yang penting diberikan bantuan dulu..	√	
15.	USAILI	Walaupun untuk kelompokku saya anggap sudah sesuai, tetapi jenis usaha yang lain tidak ada, sehingga tidak mencerminkan usaha yang saling mendukung dengan yang lainnya.		√
16.	SUDI	Saya senang dengan bantuan ini, karena jenis usaha yang saya lakukan sudah sesuai.	√	

NO.	NAMA	TANGGAPAN	INDIKATOR	
			BAIK	TIDAK BAIK
17.	LA POA	Ternyata jenis usaha kelompok yang lain hanya dibuat buat saja, paling banyak dengan alasan untuk modal usaha nelayan, tapi banyak yang pinjam hanya jualan kue saja.		√
18.	AHLANI	Saya sedikit kecewa, pas mau cari minyak ternyata agak jauh yang jual bukan teman-teman yang dapat bantuan kemarin.		√
19.	ASWAHID	Saya pada akhirnya kurang tertarik dengan bantuan ini, semua teman-teman menggunakannya untuk jenis usaha yang sama.		√
20.	LA DIRA	Saya merasa terbantu, karena jenis usaha yang saya usulkan sudah itu yang saya lakukan.	√	
21.	SITI NORMA	Walaupun bukan untuk jenis usaha nelayan toh, yang penting bisa dikembalikan.	√	
22.	JASMIN	Walaupun kurang sesuai dengan yang diharapkan, mudah-mudahan kelompok saya bisa lancar pengembaliannya.		√
23.	HALIDA	Jenis usaha kelompok saya sudah sesuai dengan petunjuk yang ada.	√	
24.	NURLIA	Terus terang pengelolanya kurang tegas, buktinya jenis usaha kelompok saya kurang sesuai, tapi kan dibantu juga.		√
25.	MULIADIN	Saya sangat senang dengan kelompok saya, saya kira jenis usaha yang saya lakukan sudah sesuai.	√	
26.	LA ODE ASWADIN	Walaupun kurang sesuai dengan yang diharapkan, mudah-mudahan kelompok saya bisa lancar pengembaliannya.		√
27.	MASKUR	Saya sedikit kecewa, pas mau cari minyak ternyata agak jauh yang jual bukan teman-teman yang dapat bantuan kemarin.		√
28.	HATIHAH	Saya senang dengan bantuan ini, karena jenis usaha yang saya lakukan sudah sesuai.	√	
29.	DARMAN	Saya kira ketiga jenis usaha nelayan itu akan ada, ternyata kenyataannya usaha kelompok macam-macam jenisnya.		√
30.	LA TUNA	Saya khawatir setelah bantuan tersebut tidak diarahkan hanya yang berhubungan dengan nelayan saja, jadinya kayak bantuan yang lain-lain yang pernah ada.		√
31.	ASMUDIN	Saya tidak mempersoalkan jenis usaha kelompok yang dibantu yang penting bisa lancar usahanya.	√	
32.	SAMSUL	Saya heran ternyata, jenis usaha kelompok tidak diperhatikan oleh pengelola dana.		√
33.	HARUMIATI	Pada saat sosialisasi, kita diharapkan memastikan kelompok terbentuk dengan jenis usaha yang mendukung kegiatan nelayan ternyata kenyataannya tidak.		√
34.	JUNianto	Ternyata jenis usaha kelompok tidak diperhatikan, akhirnya jenis usaha kelompok macam-macam jenisnya.		√
35.	ASNI	Saya senang dengan bantuan ini, karena jenis usaha yang saya lakukan sudah sesuai.	√	

NO.	NAMA	TANGGAPAN	INDIKATOR	
			BAIK	TIDAK BAIK
36.	ASNA	Saya kira ketiga jenis usaha nelayan itu akan ada, ternyata kenyataannya usaha kelompok macam-macam jenisnya.		√
37.	WA YODU	Saya khawatir setelah bantuan tersebut tidak diarahkan hanya yang berhubungan dengan nelayan saja, jadinya kayak bantuan yang lain-lain yang pernah ada.		√
38.	HARSINA	Saya kira ketiga jenis usaha nelayan itu akan ada, ternyata kenyataannya usaha kelompok macam-macam jenisnya.		√
39.	JUMIANI	Saya khawatir setelah bantuan tersebut tidak diarahkan hanya yang berhubungan dengan nelayan saja, jadinya kayak bantuan yang lain-lain yang pernah ada.		√
40.	JAMARUDIN	Jenis usaha kelompok saya sudah sesuai dengan petunjuk yang ada.	√	
41.	RAHMAT	Ternyata sama dengan bantuan yang sebelum-sebelumnya, tidak ada bedanya.		√
42.	LA ODE MUSTARA	Ternyata sama dengan bantuan yang sebelum-sebelumnya, tidak ada bedanya.		√
43.	LA ODE SAHIRUDIN	Ternyata jenis usaha kelompok tidak diperhatikan, akhirnya jenis usaha kelompok macam-macam jenisnya.		√
44.	MA'RUF	Ternyata jenis usaha kelompok tidak diperhatikan, akhirnya jenis usaha kelompok macam-macam jenisnya.		√
45.	LA ODE SAMU	Walaupun untuk kelompokku saya anggap sudah sesuai, tetapi jenis usaha yang lain tidak ada, sehingga tidak mencerminkan usaha yang saling mendukung dengan yang lainnya.		√
46.	HUWIATI	Ternyata jenis usaha kelompok tidak diperhatikan, akhirnya jenis usaha kelompok macam-macam jenisnya.		√
47.	HAYANI	Pada saat sosialisasi, kita diharapkan memastikan kelompok terbentuk dengan jenis usaha yang mendukung kegiatan nelayan ternyata kenyataannya tidak.		√
48.	HIDIH	Ternyata jenis usaha kelompok tidak diperhatikan, akhirnya jenis usaha kelompok macam-macam jenisnya.		√
49.	SALIM	Walaupun kurang sesuai dengan yang diharapkan, mudah-mudahan kelompok saya bisa lancar pengembaliannya.		√
50.	RATMI	Saya sedikit kecewa, pas mau cari minyak ternyata agak jauh yang jual bukan teman-teman yang dapat bantuan kemarin.		√
		Jumlah	16	34

Lampiran 8

**DATA KAJIAN HASIL PENENTUAN JENIS USAHA KELOMPOK
PADA MASYARAKAT KENA SAMPEL DI DESA MOLA UTARA
KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN**

NO.	NAMA	TANGGAPAN	INDIKATOR	
			BAIK	TIDAK BAIK
1.	MASLAM	Saya heran ternyata, jenis usaha kelompok tidak diperhatikan oleh pengelola dana.		√
2.	H.M. KASIM	Saya tidak mempersoalkan jenis usaha kelompok yang dibantu yang penting bisa lancar usahanya.	√	
3.	MARNIA	Walaupun untuk jenis usaha yang lain yang penting lancar saja pengembaliannya	√	
4.	CAONG	Pada saat sosialisasi, kita diharapkan memastikan kelompok terbentuk dengan jenis usaha yang mendukung kegiatan nelayan ternyata kenyataannya tidak.		√
5.	SEGA	Jenis usaha yang kami jalankan sudah sesuai dengan petunjuk sebelumnya, yakni usaha nelayan	√	
6.	IDA	Saya khawatir setelah bantuan tersebut tidak diarahkan hanya yang berhubungan dengan nelayan saja, jadinya kayak bantuan yang lain-lain yang pernah ada.		√
7.	SAHARIA	Saya senang dengan jenis usaha kelompok saya sekarang, tidak mesti ditentukan yang penting jalan.	√	
8.	SARIU	Ternyata bantuan ini, sama dengan bantuan sebelumnya, tidak diperhatikan jenis usaha kelompok yang dijalani.		√
9.	ATI	Ternyata jenis usaha kelompok tidak diperhatikan, akhirnya jenis usaha kelompok macam-macam jenisnya.		√
10.	H.M. GEGA	Saya mendukung jenis usaha apapun yang dilakukan yang penting jalan	√	
11.	NURMIN	Ternyata sama dengan bantuan yang sebelum-sebelumnya, tidak ada bedanya		√
12.	SRI HANDAYANI	Saya kira ketiga jenis usaha nelayan itu akan ada, ternyata kenyataannya usaha kelompok macam-macam jenisnya		√
13.	MINARNI	Jenis usaha urusan belakangan yang penting diberikan bantuan dulu.	√	
14.	Hj. SITI NURHAYATI	Saya heran, kenyataan di lapangan tidak diarahkan sesuai petunjuk mengenai jenis usaha kelompok		√
15.	MARNI	Walaupun bukan untuk jenis usaha nelayan toh, yang penting bisa dikembalikan.	√	
16.	HERLIATI	Saya senang dengan bantuan ini, karena jenis usaha yang saya lakukan sudah sesuai.	√	
17.	AHMAD	Saya sangat senang dengan kelompok saya, saya kira jenis usaha yang saya lakukan sudah sesuai	√	
18.	NUR CAHAYA	Saya sedikit kecewa, pas mau cari minyak ternyata agak jauh yang jual bukan teman-teman yang dapat bantuan kemarin.		√

NO.	NAMA	TANGGAPAN	INDIKATOR	
			BAIK	TIDAK BAIK
19.	SAMARUDIN	Saya merasa terbantu, karena jenis usaha yang saya usulkan sudah itu yang saya lakukan.	√	
20.	DARWIS	Ternyata jenis usaha kelompok yang lain hanya dibuat-buat saja, paling banyak dengan alasan untuk modal usaha nelayan, tapi banyak yang pinjam hanya jualan kue saja.		√
21.	JONO	Walaupun untuk kelompokku saya anggap sudah sesuai, tetapi jenis usaha yang lain tidak ada, sehingga tidak mencerminkan usaha yang saling mendukung dengan yang lainnya.		√
22.	SIPU	Jenis usaha kelompok saya sudah sesuai dengan petunjuk yang ada.	√	
23.	JUNASENG	Walaupun kurang sesuai dengan yang diharapkan, mudah-mudahan kelompok saya bisa lancar pengembaliannya.		√
24.	NURSANA	Terus terang pengelolanya kurang tegas, buktinya jenis usaha kelompok saya kurang sesuai, tapi kan dibantu juga.		√
25.	SUPIATI	Saya pada akhirnya kurang tertarik dengan bantuan ini, semua teman-teman menggunakannya untuk jenis usaha yang sama		√
26.	Hj. SITI FATIMAH	Walaupun kurang sesuai dengan yang diharapkan, mudah-mudahan kelompok saya bisa lancar pengembaliannya.		√
27.	PESOL	Saya sedikit kecewa, pas mau cari minyak ternyata agak jauh yang jual bukan teman-teman yang dapat bantuan kemarin		√
28.	TOTO B.	Saya sedikit kecewa, pas mau cari minyak ternyata agak jauh yang jual bukan teman-teman yang dapat bantuan kemarin.		√
29.	ASTI	Saya kira ketiga jenis usaha nelayan itu akan ada, ternyata kenyataannya usaha kelompok macam-macam jenisnya.		√
30.	RENALDI	Saya khawatir setelah bantuan tersebut tidak diarahkan hanya yang berhubungan dengan nelayan saja, jadinya kayak bantuan lain yang pernah ada.		√
31..	JAMIL	Saya sedikit kecewa, pas mau cari minyak ternyata agak jauh yang jual bukan teman-teman yang dapat bantuan kemarin.		√
32.	LUKMAN	Saya heran ternyata, jenis usaha kelompok tidak diperhatikan oleh pengelola dana.		√
33.	SANTY	Seat sosialisasi kita diharapkan memastikan kelompok terbentuk dengan jenis usaha yang mendukung kegiatan nelayan ternyata kenyataannya tidak.		√
34.	SUMAIL	Ternyata jenis usaha kelompok tidak diperhatikan, akhirnya jenis usaha kelompok macam-macam.		√
35.	ANDI	Saya sedikit kecewa, pas mau cari minyak ternyata agak jauh yang jual bukan teman-teman yang dapat bantuan kemarin.		√
36.	Hj. SUA	Saya kira ketiga jenis usaha nelayan itu akan ada, ternyata kenyataannya usaha kelompok macam-macam jenisnya.		√

NO.	NAMA	TANGGAPAN	INDIKATOR	
			BAIK	TIDAK BAIK
37.	DUMARDIN	Saya khawatir setelah bantuan tersebut tidak diarahkan hanya yang berhubungan dengan nelayan saja, jadinya kayak bantuan yang lain-lain yang pernah ada		√
38.	RENI	Saya kira ketiga jenis usaha nelayan itu akan ada, ternyata kenyataannya usaha kelompok macam-macam jenisnya		√
39.	RESTA	Saya khawatir setelah bantuan tersebut tidak diarahkan hanya yang berhubungan dengan nelayan saja, jadinya kayak bantuan yang lain-lain yang pernah ada		√
40.	RATNO	Ternyata jenis usaha kelompok tidak diperhatikan, akhirnya jenis usaha kelompok macam-macam jenisnya		√
41.	NURASIA	Ternyata sama dengan bantuan yang sebelum-sebelumnya, tidak ada bedanya		√
42.	SUWESTI	Ternyata sama dengan bantuan yang sebelum-sebelumnya, tidak ada bedanya		√
43.	RASNA	Ternyata jenis usaha kelompok tidak diperhatikan, akhirnya jenis usaha kelompok macam-macam jenisnya		√
44.	SALMIA	Ternyata jenis usaha kelompok tidak diperhatikan, akhirnya jenis usaha kelompok macam-macam jenisnya		√
45.	NANDE	Walaupun untuk kelompokku saya anggap sudah sesuai, tetapi jenis usaha yang lain tidak ada, sehingga tidak mencerminkan usaha yang saling mendukung dengan yang lainnya		√
46.	NUSTIA	Ternyata jenis usaha kelompok tidak diperhatikan, akhirnya jenis usaha kelompok macam-macam jenisnya		√
47.	PESMI	Pada saat sosialisasi, kita diharapkan memastikan kelompok terbentuk dengan jenis usaha yang mendukung kegiatan nelayan ternyata kenyataannya tidak		√
48.	HERMAN	Ternyata jenis usaha kelompok tidak diperhatikan, akhirnya jenis usaha kelompok macam-macam jenisnya		√
49.	DURAHMAN	Walaupun kurang sesuai dengan yang diharapkan, mudah-mudahan kelompok saya bisa lancar pengembaliannya		√
50.	SARDIN WINDI	Saya sedikit kecewa, pas mau cari minyak ternyata agak jauh yang jual bukan teman-teman yang dapat bantuan kemarin		√
		Jumlah	11	39

Lampiran 9

**DATA KAJIAN HASIL PENILAIAN MASYARAKAT TERHADAP
DKP KABUPATEN WAKATOBI PADA MASYARAKAT KENA SAMPEL DI
DESA WAHA KECAMATAN WANGI-WANGI**

NO.	NAMA	TANGGAPAN	INDIKATOR	
			BAIK	TIDAK BAIK
1.	LA JAMA	Saya tidak mengetahui, pada saat kapan orang Dinas Kelautan dan Perikanan datang ke desa kami		√
2.	UDIASI	Kalau saya tidak salah pihak Dinas Kelautan dan Perikanan itu datang pada saat kegiatan sosialisasi	√	
3.	MANIU	Saya tidak tahu kapan orang Dinas Kelautan dan Perikanan datang dan apa fungsi mereka		√
4.	ADIHU	Waktu sosialisasi, kayaknya ada dari Dinas Kelautan dan perikanan yang menyampaikan tentang potensi sumberdaya alam Wakatobi	√	
5.	ABUYADIN	Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan pernah sampaikan keunggulan-keunggulan sumber daya laut di Kabupaten Wakatobi dibanding kabupaten lain	√	
6.	SALEH	Terus terang saya tidak tahu menahu kapan orang Dinas Kelautan dan Perikanan datang dan apa fungsi mereka		√
7.	LA UDIN	Yang saya tahu, tugas Dinas Kelautan dan Perikanan adalah mengawasi pelaksanaan penyaluran dana bantuan	√	
8.	HAENUDIN	Dinas Kelautan dan Perikanan bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dana bantuan tersebut	√	
9.	WA NARU	Saya tidak pernah tahu apa fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan ini		√
10.	BUDI	Setahu saya pihak Dinas Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab dalam kegiatan ini	√	
11.	WA ALUFIA	Saya tidak tahu yang mana pihak Dinas Kelautan dan Perikanan		√
12.	LA RAMA	Pihak yang bertanggung jawab adalah pihak Dinas Kelautan dan Perikanan	√	
13.	HURAEDA	Saya tidak pernah melihat orang Dinas Kelautan dan Perikanan		√
14.	SUMARDIN	Dinas Perikanan dan Kelautan yang mengawasi keberhasilan kegiatan ini	√	
15.	USAILI	Saya tidak mengenali orang Dinas Kelautan dan Perikanan		√
16.	SUDI	Saya tidak pernah melihat orang Dinas Kelautan dan Perikanan		√
17.	LA POA	Saya tidak tahu yang mana pihak Dinas Kelautan dan Perikanan		√
18.	AHLANI	Waktu sosialisasi, kayaknya ada dari Dinas Kelautan dan perikanan yang menyampaikan tentang potensi sumberdaya alam Wakatobi	√	

NO.	NAMA	TANGGAPAN	INDIKATOR	
			BAIK	TIDAK BAIK
19.	ASWAHID	Kalau saya tidak salah pihak Dinas Kelautan dan Perikanan itu datang pada saat kegiatan sosialisasi	√	
20.	LA DIRA	Saya tidak mengetahui, pada saat kapan orang Dinas Kelautan dan Perikanan datang ke desa kami		√
21.	SITI NORMA	Saya tidak tahu yang mana pihak Dinas Kelautan dan Perikanan	√	
22.	JASMIN	Saya tidak mengenali orang Dinas Kelautan dan Perikanan		√
23.	HALIDA	Waktu sosialisasi, kayaknya ada dari Dinas Kelautan dan perikanan yang menyampaikan tentang potensi sumber daya alam Wakatobi	√	
24.	NURLIA	Terus terang saya tidak tahu menahu kapan orang Dinas Kelautan dan Perikanan datang dan apa fungsi mereka		√
25.	MULIADIN	Saya tidak pernah melihat orang Dinas Kelautan dan Perikanan		√
26.	LA ODE ASWADIN	Kalau saya tidak salah pihak Dinas Kelautan dan Perikanan itu datang pada saat kegiatan sosialisasi	√	
27.	MASKUR	Saya tidak mengenali orang Dinas Kelautan dan Perikanan		√
28.	HATIHAH	Saya tidak pernah melihat orang Dinas Kelautan dan Perikanan		√
29.	DARMAN	Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan memakai baju dinas waktu kegiatan sosialisasi	√	
30.	LA TUNA	Yang saya tahu Pihak Dinas Perikanan dan Kelautan itu mengawasi tapi selama kegiatan mungkin cuma satu kali datang		√
31.	ASMUDIN	Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan kegiatan ini	√	
32.	SAMSUL	Pihak DKP pernah hadir menyampaikan secara umum arah kegiatan ini	√	
33.	HARUMIATI	Orang Dinas Kelautan dan Perikanan pernah datang satu kali dalam rapat itu hari	√	
34.	JUNianto	Walaupun mungkin pihak Dinas Kelautan dan Perikanan sering datang tapi saya tidak mengenal mereka		√
35.	ASNI	Saya tahu yang mana pihak DKP tapi saya sayangkan setelah sosialisasi itu hari tidak pernah lagi bertatap muka dengan kita		√
36.	ASNA	Saya heran Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan hampir tidak pernah kita ketemu		√
37.	WA YODU	Saya tidak mengenali orang Dinas Kelautan dan Perikanan		√
38.	HARSINA	Kalau saya tidak salah pihak Dinas Kelautan dan Perikanan itu datang pada saat kegiatan sosialisasi	√	
39.	JUMIANI	Walaupun mungkin pihak Dinas Kelautan dan Perikanan sering datang tapi saya tidak mengenal mereka		√
40.	JAMARUDIN	Saya tahu yang mana pihak DKP tapi saya sayangkan setelah sosialisasi itu hari tidak pernah lagi bertatap muka dengan kita		√

NO.	NAMA	TANGGAPAN	INDIKATOR	
			BAIK	TIDAK BAIK
41.	RAHMAT	Saya heran pihak Dinas Kelautan dan Perikanan hampir tidak pernah kita ketemu.		√
42.	LA ODE .MUSTARA	Pihak DKP kurang memberikan solusi atas masalah yang kam hadapi.		√
43.	LA ODE SAHIRUDIN	Saya tidak mengenali orang Dinas Kelautan dan Perikanan		√
44.	MA'RUF	Kalau ada masalah di kelompok kami, pihak DKP hanya menyuruh kami untuk mengurusnya sendiri, tidak mau bantu-bantu berikan pemikiran.		√
45.	LA ODE SAMU	Saya tidak tahu yang mana pihak Dinas Kelautan dan Perikanan		√
46.	HUWIATI	Terus terang saya tidak tahu menahu kapan orang Dinas Kelautan dan Perikanan datang dan apa fungsi mereka		√
47.	HAYANI	Saya tidak pernah melihat orang Dinas Kelautan dan Perikanan		√
48.	HIDIH	Saya tidak mengenali orang Dinas Kelautan dan Perikanan		√
49.	SALIM	Saya tidak pernah melihat orang Dinas Kelautan dan Perikanan		√
50.	RATMI	Yang saya tahu Pihak Dinas Perikanan dan Kelautan itu mengawasi tapi selama kegiatan mungkin Cuma satu kali datang		√
Jumlah			18	32

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 10

**DATA KAJIAN HASIL PENILAIAN MASYARAKAT TERHADAP DKP
KABUPATEN WAKATOBI PADA MASYARAKAT KENA SAMPEL DI
DESA MOLA UTARA KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN**

NO.	NAMA	TANGGAPAN	INDIKATOR	
			BAIK	TIDAK BAIK
1.	MASLAM	Kalau saya tidak salah pihak Dinas Kelautan dan Perikanan itu datang pada saat kegiatan sosialisasi	√	
2.	H.M. KASIM	Saya tidak mengetahui, pada saat kapan orang Dinas Kelautan dan Perikanan datang ke desa kami		√
3.	MARNIA	Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan pernah menyampaikan keunggulan-keunggulan sumber daya laut di Kabupaten Wakatobi dibanding kabupaten lain	√	
4.	CAONG	Waktu sosialisasi, kayaknya ada dari Dinas Kelautan dan perikanan yang menyampaikan tentang potensi sumber daya alam Wakatobi	√	
5.	SEGA	Saya tidak tahu kapan orang Dinas Kelautan dan Perikanan datang dan apa fungsi mereka		√
6.	IDA	Dinas Kelautan dan Perikanan bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dana bantuan tersebut	√	
7.	SAHARIA	Yang saya tahu, Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan adalah mengawasi pelaksanaan penyaluran dana bantuan	√	
8.	SARIU	Terus terang saya tidak tahu menahu kapan orang Dinas Kelautan dan Perikanan datang dan apa fungsi mereka		√
9.	ATI	Setahu saya pihak Dinas Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab dalam kegiatan ini	√	
10.	H.M. GEGA	Saya tidak pernah tahu apa fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan ini		√
11.	NURMIN	Pihak yang bertanggung jawab adalah pihak Dinas Kelautan dan Perikanan	√	
12.	SRI HANDAYANI	Saya tidak tahu yang mana pihak Dinas Kelautan dan Perikanan		√
13.	MINARNI	Dinas Perikanan dan Kelautan yang mengawasi keberhasilan kegiatan ini	√	
14.	Hj. SITI NURHAYATI	Saya tidak pernah melihat orang Dinas Kelautan dan Perikanan		√
15.	MARNI	Saya tidak mengenali orang Dinas Kelautan dan Perikanan		√
16.	HERLIATI	Saya tidak pernah melihat orang Dinas Kelautan dan Perikanan		√
17.	AHMAD	Kalau saya tidak salah, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan itu datang pada saat kegiatan sosialisasi	√	
18.	NUR CAHAYA	Waktu sosialisasi, kayaknya ada dari Dinas Kelautan dan perikanan yang menyampaikan tentang potensi sumber daya alam Wakatobi	√	

NO.	NAMA	TANGGAPAN	INDIKATOR	
			BAIK	TIDAK BAIK
19.	SAMARUDIN	Orang DKP hanya sok tahu, kalau kita bertanya mereka tidak jawab yang memuaskan.		√
20.	DARWIS	Waktu sosialisasi, kayaknya ada dari Dinas Kelautan dan perikanan yang menyampaikan tentang potensi sumber daya alam Wakatobi	√	
21.	JONO	Saya tidak tahu yang mana pihak Dinas Kelautan dan Perikanan		√
22.	SIPU	Kalau saya tidak salah pihak Dinas Kelautan dan Perikanan itu datang pada saat kegiatan sosialisasi	√	
23.	JUNASENG	Saya tidak mengetahui, pada saat kapan orang Dinas Kelautan dan Perikanan datang ke desa kami		√
24.	NURSANA	Terus terang saya tidak tahu menahu kapan orang Dinas Kelautan dan Perikanan datang dan apa fungsi mereka		√
25.	SUPIATI	Orang Dinas Kelautan dan Perikanan pernah datang satu kali dalam rapat itu hari	√	
26.	Hj. SITI FATIMAH	Saya tidak mengenali orang Dinas Kelautan dan Perikanan		√
27.	PESOL	Saya tidak mengenali orang Dinas Kelautan dan Perikanan		√
28.	TOTO B.	Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan memakai baju dinas waktu kegiatan sosialisasi	√	
29.	ASTI	Saya tidak pernah melihat orang Dinas Kelautan dan Perikanan		√
30.	RENALDI	Yang saya tahu pihak Dinas Perikanan dan Kelautan itu mengawasi tapi selama kegiatan mungkin cuma satu kali datang	√	
31.	JAMIL	Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan kegiatan ini	√	
32.	LUKMAN	Pihak DKP pernah hadir menyampaikan secara umum arah kegiatan ini	√	
33.	SANTY	Saya tidak pernah melihat orang Dinas Kelautan dan Perikanan		√
34.	SUMAIL	Walaupun mungkin pihak Dinas Kelautan dan Perikanan sering datang tapi saya tidak mengenal mereka		√
35.	ANDI	Saya tahu yang mana pihak DKP tapi saya sayangkan setelah sosialisasi itu hari tidak pernah lagi bertatap muka dengan kita		√
36.	Hj. SUA	Saya heran pihak Dinas Kelautan dan Perikanan hampir tidak pernah kita ketemu		√
37.	DUMARDIN	Kalau saya tidak salah pihak Dinas Kelautan dan Perikanan itu datang pada saat kegiatan sosialisasi	√	
38.	RENI	saya tidak mengenali orang Dinas Kelautan dan Perikanan		√
39.	RESTA	Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan kegiatan ini	√	
40.	RATNO	Saya tahu yang mana pihak DKP tapi saya sayangkan setelah sosialisasi itu hari tidak pernah lagi bertatap muka dengan kita		√

NO.	NAMA	TANGGAPAN	INDIKATOR	
			BAIK	TIDAK BAIK
41.	NURASIA	Pihak DKP pernah hadir menyampaikan secara umum arah kegiatan ini	√	
42.	SUWESTI	Saya tidak mengenali orang DKP.		√
43.	RASNA	Pihak Dinas Perikanan dan Kelautan itu mengawasi tapi selama kegiatan mungkin cuma satu kali datang	√	
44.	SALMIA	Saya tidak pernah melihat orang Dinas Kelautan dan Perikanan		√
45.	NANDE	Pihak DKP memakai baju dinas waktu kegiatan sosialisasi	√	
46.	NUSTIA	Terus terang saya tidak tahu menahu kapan orang DKP datang dan apa fungsi mereka		√
47.	PESMI	Kalau saya tidak salah, pihak DKP itu datang pada saat kegiatan sosialisasi.	√	
48.	HERMAN	Waktu sosialisasi, kayaknya ada dari DKP yang menyampaikan tentang potensi sumber daya alam Wakatobi.	√	
49.	DURAHMAN	Saya tidak pernah melihat orang DKP.		√
50.	SARDIN WINDI	Saya tahu pihak DKP itu mengawasi tapi selama kegiatan mungkin cuma satu kali datang saja.		√
		Jumlah	25	25

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 11

**DATA KAJIAN HASIL PENILAIAN MASYARAKAT TERHADAP TPD
PADA MASYARAKAT KENA SAMPEL DI DESA WAHA
KECAMATAN WANGI-WANGI**

NO.	NAMA	TANGGAPAN	INDIKATOR	
			BAIK	TIDAK BAIK
1.	LA JAMA	Tim Pendamping Desa pada saat awal program rajin datang, tapi setelah beberapa bulan kemudian tidak datang-datang lagi		√
2.	UDIASI	Tim Pendamping Desa setahu saya akan mendampingi kami selama kegiatan ini jalan, tapi malas datang		√
3.	MANIU	Terus terang tugas Tim Pendamping Desa sangat baik di awa-awal program ini	√	
4.	ADIHU	Tim Pendamping Desa malas		√
5.	ABUYADIN	Saya heran Tim Pendamping Desa tidak datang-datang lagi		√
6.	SALEH	Bila Tim Pendamping Desa itu aktif, sangat baik sekali	√	
7.	LA UDIN	Tim Pendamping Desa tidak datang-datang lagi		√
8.	HAENUDIN	Saya senang bila Tim Pendamping Desa aktif	√	
9.	WA NARU	Bila ada Tim Pendamping Desa kita bisa banyak mendapatkan informasi tentang banyak hal	√	
10.	BUDI	Saya sayangkan ketidakaktifan Tim Pendamping Desa		√
11.	WA ALUFIA	Bila Tim Pendamping Desa itu aktif, sangat baik	√	
12.	LA RAMA	Saya sering mempertanyakan ketidakaktifan Tim Pendamping Desa		√
13.	HURAEDA	Saya berharap Tim Pendamping Desa bisa aktif lagi	√	
14.	SUMARDIN	Saya juga heran mengapa Tim Pendamping Desa jadi malas		√
15.	USAILI	Kalau saja Tim Pendamping Desa aktif seperti dulu, tentu kita sangat bersyukur	√	
16.	SUDI	Tim Pendamping Desa malas sekali datang lagi ke sini		√
17.	LA POA	Saya kecewa atas ketidakaktifan Tim Pendamping Desa		√
18.	AHLANI	Tim Pendamping Desa sudah tidak aktif lagi		√
19.	ASWAHID	Saya masih berharap Tim Pendamping Desa rajin datang lagi	√	
20.	LA DIRA	Mudah-mudahan Tim Pendamping Desa bisa rajin lagi	√	
21.	SITI NORMA	Saya menyayangkan ketidakaktifan Tim Pendamping Desa		√
22.	JASMIN	Pada masa-masa awal program, saya sangat salut dengan kehadiran Tim Pendamping Desa	√	
23.	HALIDA	Saya heran Tim Pendamping Desa sudah malas datang sementara kita masih perlu bimbingan		√
24.	NURLIA	Mudah-mudahan Tim Pendamping Desa bisa datang lagi	√	
25.	MULIADIN	Saya merasa bukan hanya saya yang kecewa atas malas Tim Pendamping Desa		√

NO.	NAMA	TANGGAPAN	INDIKATOR	
			BAIK	TIDAK BAIK
26.	LA ODE ASWADIN	Saya menyayangkan ketidakaktifan Tim Pendamping Desa		√
27.	MASKUR	Saya masih berharap Tim Pendamping Desa rajin datang lagi	√	
28.	HATIHAH	Tim Pendamping Desa tidak datang-datang lagi		√
29.	DARMAN	Tim Pendamping Desa malas		√
30.	LA TUNA	Kalau saja Tim Pendamping Desa aktif seperti dulu, tentu kita sangat bersyukur	√	
31.	ASMUDIN	Tim Pendamping Desa setahu saya akan mendampingi kami selama kegiatan ini jalan, tapi malas datang		√
32.	SAMSUL	Saya masih berharap Tim Pendamping Desa rajin datang lagi	√	
33.	HARUMIATI	Mudah-mudahan Tim Pendamping Desa bisa rajin lagi	√	
34.	JUNIANTO	Saya juga heran mengapa Tim Pendamping Desa jadi malas	√	
35.	ASNI	Tim Pendamping Desa malas sekali datang lagi ke sini		√
36.	ASNA	Saya kecewa atas ketidakaktifan Tim Pendamping Desa		√
37.	WA YODU	Tim Pendamping Desa malas		√
38.	HARSINA	Saya heran Tim Pendamping Desa tidak datang-datang lagi		√
39.	JUMIANI	Mudah-mudahan Tim Pendamping Desa bisa rajin lagi	√	
40.	JAMARUDIN	Tim Pendamping Desa pada saat awal program rajin datang, tapi setelah beberapa bulan kemudian tidak datang-datang lagi		√
41.	RAHMAT	Tim Pendamping Desa setahu saya akan mendampingi kami selama kegiatan ini jalan, tapi malas datang		√
42.	LA ODE MUSTARA	Tim Pendamping Desa malas		√
43.	LA ODE SAHIRUDIN	Saya heran Tim Pendamping Desa tidak datang-datang lagi		√
44.	MA'RUF	Tim Pendamping Desa setahu saya akan mendampingi kami selama kegiatan ini jalan, tapi malas datang		√
45.	LA ODE SAMU	Tim Pendamping Desa pada saat awal program rajin datang, tapi setelah beberapa bulan kemudian tidak datang-datang lagi		√
46.	HUWIATI	Tim Pendamping Desa setahu saya akan mendampingi kami selama kegiatan ini jalan, tapi malas datang		√
47.	HAYANI	Saya merasa bukan hanya saya yang kecewa atas malas Tim Pendamping Desa		√
48.	HIDIH	Saya menyayangkan ketidakaktifan Tim Pendamping Desa		√
49.	SALIM	Tim Pendamping Desa tidak datang-datang lagi		√
50.	RATMI	Tim Pendamping Desa malas		√
		Jumlah	17	33

Lampiran 12

**DATA KAJIAN HASIL PENILAIAN MASYARAKAT TERHADAP TPD
PADA MASYARAKAT KENA SAMPEL DI DESA MOLA UTARA
KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN**

NO.	NAMA	TANGGAPAN	INDIKATOR	
			BAIK	TIDAK BAIK
1	MASLAM	Terus terang tugas Tim Pendamping Desa sangat baik di awal-awal program ini.	√	
2.	H.M. KASIM	Bila Tim Pendamping Desa itu aktif, sangat baik sekali	√	
3.	MARNIA	TPD pada saat awal program rajin datang, tapi setelah beberapa bulan kemudian tidak datang-datang lagi.		√
4.	CAONG	Bila ada Tim Pendamping Desa kita bisa banyak mendapatkan informasi tentang banyak hal.	√	
5.	SEGA	Bila Tim Pendamping Desa itu aktif, sangat baik.	√	
6.	IDA	Tim Pendamping Desa setahu saya akan mendampingi kami selama kegiatan ini jalan, tapi malas datang.		√
7.	SAHARIA	Saya berharap Tim Pendamping Desa bisa aktif lagi.	√	
8.	SARIU	Saya senang bila Tim Pendamping Desa aktif.	√	
9.	ATI	Saya heran Tim Pendamping Desa tidak datang-datang lagi.		√
10.	H.M. GEGA	Kalau saja Tim Pendamping Desa aktif seperti dulu, tentu kita sangat bersyukur.	√	
11.	NURMIN	Saya juga heran mengapa Tim Pendamping Desa jadi malas.		√
12.	SRI HANDAYANI	Saya berharap Tim Pendamping Desa bisa aktif lagi.	√	
13.	MINARNI	Saya sering mempertanyakan ketidakaktifan Tim Pendamping Desa.		√
14.	Hj. SITI NURHAYATI	Mudah-mudahan Tim Pendamping Desa bisa rajin lagi.		√
15.	MARNI	Saya sayangkan ketidakaktifan Tim Pendamping Desa.		√
16.	HERLIATI	Tim Pendamping Desa malas sekali datang lagi ke sini.		√
17.	AHMAD	Saya kecewa atas ketidakaktifan Tim Pendamping Desa.		√
18.	NUR CAHAYA	Mudah-mudahan Tim Pendamping Desa bisa datang lagi.	√	
19.	SAMARUDIN	Saya masih berharap Tim Pendamping Desa rajin datang lagi.	√	
20.	DARWIS	Tim Pendamping Desa sudah tidak aktif lagi		√
21.	JONO	Pada masa-masa awal program, saya sangat salut dengan kehadiran Tim Pendamping Desa.	√	
22.	SIPU	Saya menyayangkan ketidakaktifan Tim Pendamping Desa.		√
23.	JUNASENG	Kalau saja Tim Pendamping Desa aktif seperti dulu, tentu kita sangat bersyukur.	√	
24.	NURSANA	Saya heran Tim Pendamping Desa sudah malas datang sementara kita masih perlu bimbingan.		√

NO.	NAMA	TANGGAPAN	INDIKATOR	
			BAIK	TIDAK BAIK
25.	SUPIATI	Saya merasa bukan hanya saya yang kecewa atas malas Tim Pendamping Desa.		√
26.	Hj. SITI FATIMAH	Saya masih berharap Tim Pendamping Desa rajin datang lagi.	√	
27.	PESOL	Saya menyayangkan ketidakaktifan Tim Pendamping Desa.		√
28.	TOTO B.	Tim Pendamping Desa tidak datang-datang lagi		√
29.	ASTI	Kalau saja Tim Pendamping Desa aktif seperti dulu, tentu kita sangat bersyukur.	√	
30.	RENALDI	Tim Pendamping Desa malas.		√
31.	JAMIL	Mudah-mudahan Tim Pendamping Desa bisa rajin lagi		√
32.	LUKMAN	Saya masih berharap Tim Pendamping Desa rajin datang lagi.		√
33.	SANTY	Mudah-mudahan Tim Pendamping Desa bisa rajin lagi		√
34.	SUMAIL	Saya juga heran mengapa Tim Pendamping Desa jadi malas.		√
35.	ANDI	Tim Pendamping Desa malas sekali datang lagi ke sini.		√
36.	Hj. SUA	Saya kecewa atas ketidakaktifan Tim Pendamping Desa.		√
37.	DUMARDIN	Tim Pendamping Desa malas.		√
38.	RENI	Mudah-mudahan Tim Pendamping Desa bisa rajin lagi		√
39.	RESTA	Saya heran Tim Pendamping Desa tidak datang-datang lagi		√
40.	RATNO	Saya masih berharap Tim Pendamping Desa rajin datang lagi.		√
41.	NURASIA	Tim Pendamping Desa setahu saya akan mendampingi kami selama kegiatan ini jalan, tapi malas datang		√
42.	SUWESTI	Mudah-mudahan Tim Pendamping Desa bisa rajin lagi.		√
43.	RASNA	Saya heran Tim Pendamping Desa tidak datang-datang lagi.		√
44.	SALMIA	Mudah-mudahan Tim Pendamping Desa bisa rajin lagi.		√
45.	NANDE	Tim Pendamping Desa pada saat awal program rajin datang, tapi setelah beberapa bulan kemudian tidak datang-datang lagi.		√
46.	NUSTIA	Terus terang tugas Tim Pendamping Desa sangat baik di awal-awal program ini.	√	
47.	PESMI	Saya merasa bukan hanya saya yang kecewa atas malas Tim Pendamping Desa.		√
48.	HERMAN	Saya menyayangkan ketidakaktifan Tim Pendamping Desa.		√
49.	DURAHMAN	Bila Tim Pendamping Desa itu aktif, sangat baik sekali.	√	
50.	SARDIN WINDI	Tim Pendamping Desa malas.		√
		Jumlah	16	34

Lampiran 13

**DATA KAJIAN HASIL PENILAIAN MASYARAKAT TERHADAP
KOPERASI PERIKANAN WAKATOBI SEJAHTERA PADA
MASYARAKAT KENA SAMPEL DI DESA WAHA
KECAMATAN WANGI-WANGI**

NO.	NAMA	TANGGAPAN	INDIKATOR	
			BAIK	TIDAK BAIK
1.	LA JAMA	Terima kasih kepada Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera yang telah memberikan bantuan.	√	
2.	UDIASI	Kepada pihak koperasi kalau melakukan tagihan jangan terlalu ngotot.		√
3.	MANIU	Pihak koperasi jangan pilih kasih.		√
4.	ADIHU	Saya merasa banyak terbantu dengan hadirnya koperasi.	√	
5.	ABUYADIN	Saya sedikit kecewa saja, bantuan kemarin masih belum mencukupi.		√
6.	SALEH	Saya senang, bagaimanapun kami mendapatkan bantuan dana.	√	
7.	LA UDIN	Seharusnya bantuannya masih bisa ditambah lagi.		√
8.	HAENUDIN	Kalau melakukan penagihan mohon lebih sopan lagi.		√
9.	WA NARU	Terima kasih sudah membantu.	√	
10.	BUDI	kalau bisa jangan pilih kasih.		√
11.	WA ALUFIA	Terima kasih atas bantuannya.	√	
12.	LA RAMA	Kalau bisa suku bunganya diturunkan lagi.		√
13.	HURAEDA	Saya merasa banyak diringankan dengan adanya bantuan ini.	√	
14.	SUMARDIN	Kalau bisa bunga pinjaman diturunkan.		√
15.	USAILI	Seharusnya bantuannya bisa dinaikkan lagi jumlahnya.		√
16.	SUDI	Jangan pilih kasih.		√
17.	LA POA	Kalau bisa melakukan penagihan dalam waktu yang tepat.		√
18.	AHLANI	Kehadiran koperasi banyak meringankan kebutuhan saya.	√	
19.	ASWAHID	Saya kira suku bunga pinjaman diturunkan lagi.		√
20.	LA DIRA	Saya merasa terbantu dengan kehadiran koperasi.	√	
21.	SITI NORMA	Seharusnya bantuannya bisa dinaikkan lagi jumlahnya.		√
22.	JASMIN	Terima kasih sudah membantu.	√	
23.	HALIDA	Kepada pihak Koperasi Nelayan Wakatobi Sejahtera kalau melakukan tagihan jangan terlalu ngotot.		√
24.	NURLIA	Pihak Koperasi jangan pilih kasih .		√
25.	MULIADIN	Saya merasa banyak diringankan dengan adanya bantuan ini.	√	
26.	LA ODE ASWADIN	Seharusnya bantuannya masih bisa ditambah lagi.		√
27.	MASKUR	Kalau melakukan penagihan mohon lebih sopan lagi.		√
28.	HATIJAH	Saya merasa banyak terbantu dengan hadirnya koperasi.	√	

NO.	NAMA	TANGGAPAN	INDIKATOR	
			BAIK	TIDAK BAIK
29.	DARMAN	Kalau bisa suku bunganya diturunkan lagi.		√
30.	LA TUNA	Saya senang, bagaimanapun kami mendapatkan bantuan dana	√	
31.	ASMUDIN	Saya senang, bagaimanapun kami mendapatkan bantuan dana.	√	
32.	SAMSUL	Saya merasa terbantu dengan kehadiran koperasi.	√	
33.	HARUMIATI	Kalau bisa bunga pinjaman diturunkan.		√
34.	JUNIANTO	Seharusnya bantuannya bisa dinaikkan lagi jumlahnya.		√
35.	ASNI	Jangan pilih kasih.		√
36.	ASNA	Kalau bisa melakukan penagihan pada saat yang tepat.		√
37.	WA YODU	Saya merasa banyak diringankan dengan adanya bantuan ini.	√	
38.	HARSINA	Kalau bisa bunga pinjaman diturunkan.		√
39.	JUMIANI	Seharusnya bantuannya bisa dinaikkan lagi.		√
40.	JAMARUDIN	Jangan pilih kasih.		√
41.	RAHMAT	Kalau bisa melakukan penagihan dalam waktu yang tepat.		√
42.	LA ODE MUSTARA	Kalau bisa bunga pinjaman diturunkan.		√
43.	LA ODE SAHIRUDIN	Seharusnya bantuannya bisa dinaikkan lagi jumlahnya.		√
44.	MA'RUF	Jangan pilih kasih.		√
45.	LA ODE SAMU	Kalau bisa melakukan penagihan dalam waktu yang tepat.		√
46.	HUWIATI	Kalau bisa jangan pilih kasih.		√
47.	HAYANI	Kalau bisa jangan pilih kasih		√
48.	HIDIH	Kalau melakukan penagihan mohon lebih sopan lagi.		√
49.	SALIM	Jangan pilih kasih .		√
50.	RATMI	Kalau bisa melakukan penagihan pada saat yang tepat.		√
		Jumlah	19	31

Lampiran 14

**DATA KAJIAN HASIL PENILAIAN MASYARAKAT
TERHADAP KOPERASI PERIKANAN WAKATOBI SEJAHTERA
PADA MASYARAKAT KENA SAMPEL DI DESA MOLA UTARA
KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN**

NO.	NAMA	TANGGAPAN	INDIKATOR	
			BAIK	TIDAK BAIK
1.	MASLAM	Terima kasih kepada koperasi yang telah memberikan bantuan.	√	
2.	H.M. KASIM	Saya senang, bagaimanapun kami mendapatkan bantuan dana.	√	
3.	MARNIA	Pihak Koperasi jangan pilih kasih.		√
4.	CAONG	Saya merasa banyak terbantu dengan hadirnya koperasi.	√	
5.	SEGA	Saya sedikit kecewa saja, bantuan kemarin masih belum mencukupi.		√
6.	IDA	Pihak Koperasi Nelayan Wakatobi Sejahtera kalau melakukan tagihan jangan terlalu ngotot.		√
7.	SAHARIA	Terima kasih sudah membantu.	√	
8.	SARIU	Terima kasih atas bantuannya.	√	
9.	ATI	Kalau melakukan penagihan mohon lebih sopan.		√
10.	H.M. GEGA	Terima kasih sudah membantu.	√	
11.	NURMIN	Kalau bisa jangan pilih kasih .		√
12.	SRI HANDAYANI	Saya merasa banyak diringankan dengan adanya bantuan ini.	√	
13.	MINARNI	Kalau bisa suku bunganya diturunkan lagi.		√
14.	Hj. SITI NURHAYATI	Terima kasih sudah membantu.	√	
15.	MARNI	Seharusnya bantuannya bisa dinaikkan lagi jumlahnya.		√
16.	HERLIATI	Jangan pilih kasih.		√
17.	AHMAD	Kalau bisa melakukan penagihan dalam waktu yang tepat.		√
18.	NUR CAHAYA	Kehadiran koperasi banyak meringankan kebutuhan saya.	√	
19.	SAMARUDIN	Saya merasa terbantu dengan kehadiran koperasi.	√	
20.	DARWIS	Kalau bisa suku bunganya diturunkan lagi.		√
21.	JONO	Terima kasih sudah membantu.	√	
22.	SIPU	Seharusnya bantuannya bisa dinaikkan lagi jumlahnya.		√
23.	JUNASENG	Saya merasa banyak diringankan dengan adanya bantuan ini.	√	
24.	NURSANA	Pihak Koperasi jangan pilih kasih.		√
25.	SUPIATI	Seharusnya bantuannya bisa dinaikkan lagi jumlahnya.		√
26.	Hj. SITI FATIMAH	Seharusnya bantuannya masih bisa ditambah lagi.		√
27.	PESOL	Kalau melakukan penagihan mohon lebih sopan lagi.		√

NO.	NAMA	TANGGAPAN	INDIKATOR	
			BAIK	TIDAK BAIK
28.	TOTO B.	Kalau bisa suku bunganya diturunkan lagi.		√
29.	ASTI	Saya merasa banyak terbantu dengan hadirnya koperasi.	√	
30.	RENALDI	Kalau bisa bunga pinjaman diturunkan.		√
31.	JAMIL	Saya senang, bagaimanapun kami mendapatkan bantuan dana.	√	
32.	LUKMAN	Saya merasa terbantu dengan kehadiran koperasi	√	
33.	SANTY	Saya senang, bagaimanapun kami mendapatkan bantuan dana.	√	
34.	SUMAIL	Seharusnya bantuannya bisa dinaikkan lagi jumlahnya.		√
35.	ANDI	Jangan pilih kasih.		√
36.	Hj. SUA	Kalau bisa melakukan penagihan dalam waktu yang tepat.		√
37.	DUMARDIN	Kalau bisa bunga pinjaman diturunkan.		√
38.	RENI	Saya merasa banyak diringankan dengan adanya bantuan ini.	√	
39.	RESTA	Seharusnya bantuannya bisa dinaikkan lagi jumlahnya.		√
40.	RATNO	Saya merasa terbantu dengan kehadiran koperasi.	√	
41.	NURASIA	Kalau bisa melakukan penagihan dalam waktu yang tepat.		√
42.	SUWESTI	Saya merasa banyak diringankan dengan adanya bantuan ini.	√	
43.	RASNA	Seharusnya bantuannya bisa dinaikkan lagi jumlahnya.		√
44.	SALMIA	Terima kasih sudah membantu.	√	
45.	NANDE	Kalau bisa melakukan penagihan dalam waktu yang tepat.		√
46.	NUSTIA	Kehadiran koperasi banyak meringankan kebutuhan saya.	√	
47.	PESMI	Kalau bisa jangan pilih kasih.		√
48.	HERMAN	Terima kasih kepada Koperasi Perikanan Wakatobi Sejahtera yang telah memberikan bantuan.	√	
49.	DURAHMAN	Saya senang, bagaimanapun kami mendapatkan bantuan dana.	√	
50.	SARDIN WINDI	Kalau bisa melakukan penagihan dalam waktu yang tepat.		√
		Jumlah	24	26

Lampiran 15

**PEDOMAN WAWANCARA
TERHADAP INFORMAN (RESPONDEN) PENELITIAN MENGENAI
“PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR (PEMP)
DI KABUPATEN WAKATOBI”**

A. Identitas Responden

1. Status :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Pendidikan :
5. Pekerjaan :

B. Manfaat Program

1. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui tentang program PEMP?
 - a. Apa tujuan program PEMP?
.....
.....
 - b. Dari mana mendapatkan informasi itu?
.....
.....
 - c. Kapan mengetahuinya?
.....
.....
2. Apakah Bapak/Ibu di dalam program PEMP diadakan pelatihan?
 - a. Berapa kali diadakan pelatihan?
.....
 - b. Apa yang disampaikan di dalam pelatihan?
.....
.....
 - c. Apakah sekarang ini masih mendapat pelatihan?
.....
.....
3. Apakah Bapak/Ibu mendapatkan manfaat dari program PEMP?
 - a. Apa keuntungannya?
.....
 - b. Apa kerugiannya?
.....
.....
4. Sebelum mengikuti program PEMP, apa usaha atau kegiatan Bapak/Ibu?
.....
.....

5. Apakah yang mendorong atau yang memotivasi Bapak/Ibu mengikuti program PEMP?
.....
.....
6. Sumbangsih atau bantuan apa, yang Bapak/Ibu berikan untuk keberhasilan program PEMP?
.....
.....
7. Apakah semua itu sesuai keinginan Bapak/Ibu untuk keberhasilan program PEMP?
.....
8. Apakah Bapak/Ibu dalam program PEMP mendapatkan bantuan berupa uang atau bentuk yang lainnya?
.....
.....
9. Apakah program PEMP ini dalam pembangunan ekonomi produktif masyarakat menggunakan pola apa, dalam penyaluran dana?
- a. Dana hibah?
.....
.....
 - b. Dana kredit?
.....
.....
 - a. Revolving Fund?
.....
.....
10. Bagaimana Bapak/Ibu dipilih menjadi anggota program PEMP?
- a. Sejak kapan?
.....
.....
 - b. Apa kriteria menjadi anggota?
.....
.....
 - c. Apakah kriteria tersebut bisa dilaksanakan atau dijalankan?
.....
.....
 - d. Apakah ada penyimpangan?
.....
.....
11. Apakah program PEMP menyenangkan atau tidak?
- Ya
.....
.....
- Tidak
.....
.....

12. Apakah modal yang diberikan sesuai tujuannya?

.....

C. Peran Pendamping

1. Apakah Bapak/Ibu di dalam program PEMP ini mendapat pendampingan (fasilitator)?

a. Apakah pendamping itu ditunjuk langsung?

.....

b. Apakah atas keinginan kelompok (organisasi)?

.....

2. Apakah Bapak/Ibu dalam bantuan teknis ini (Pendamping) mendapat kemudahan?

.....

3. Apakah Bapak/Ibu merasakan peranan pendamping terlalu dominan dalam program PEMP?

.....

4. Apakah menurut Bapak/Ibu tidak perlu ada pendampingan (fasilitator)?

.....

5. Apakah pendamping (fasilitator) setelah pasca proyek PEMP masih dipertahankan?

.....

.....

D. Peranan Birokrasi

1. Apakah program PEMP ini menurut Bapak/Ibu di dalam pengurusan surat-surat atau bentuk yang lain terlalu birokrasi?

.....

2. Apakah menurut Bapak/Ibu dalam program PEMP ini birokrasi tidak perlu dilibatkan atau sebaliknya?

.....

3. Apakah menurut Bapak/Ibu birokrasi membantu pelaksanaan program PEMP?

.....

.....

E. Peranan Kelompok Masyarakat Pemanfaat Program PEMP

1. Apakah Bapak/Ibu membentuk KMP ini secara:

a. Musyawarah mufakat?

.....

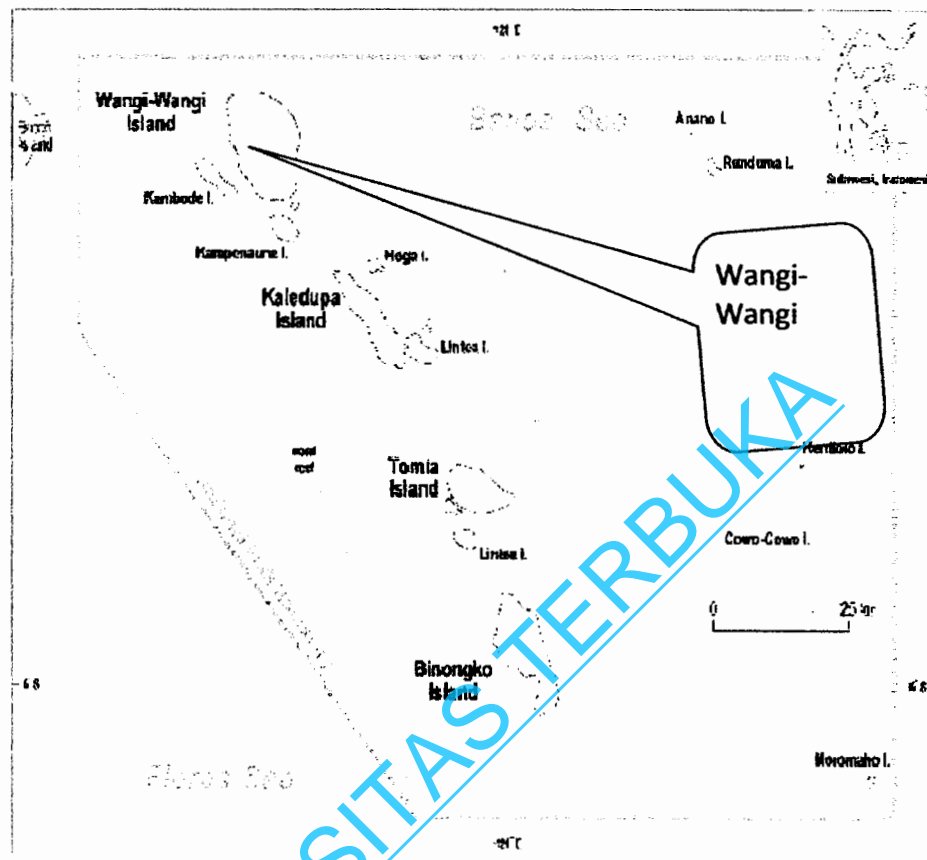
.....

- b. Ditunjuk langsung?
.....
.....
2. Apakah Bapak/Ibu menjadi anggota KMP ini atas:
- a. Kemauan sendiri?
.....
.....
- b. Karena sesuai dengan pekerjaan(nelayan)?
.....
- c. Karena ditunjuk langsung
.....
.....
- d. Karena ada kedekatan dengan aparat desa (famili)?
.....
.....
3. Apakah Bapak/Ibu dengan adanya KMP ini mendapat kemudahan dan manfaat?
.....
.....
4. Apakah penggunaan dana secara berkelompok dianggap tepat?
Ya.
.....
.....
Tidak,
.....
.....
- F. Harapan dan Kenyataan terhadap Program PEMP**
.....
.....

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 16

Peta Lokasi Penelitian



Wakatobi Marine National Park, South East Sulawesi